

**LAPORAN PEREKONOMIAN  
PROVINSI ACEH  
NOVEMBER 2022**



## VISI

Menjadi Kantor Perwakilan yang kredibel dalam pelaksanaan tugas BI dan kontributif bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

## MISI

Menjalankan kebijakan BI dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

## FUNGSI

1. Fungsi *Advisory* Kebijakan
2. Fungsi Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah
3. Fungsi Sistem Pembayaran
4. Fungsi Pengembangan UMKM dan Keuangan Inklusif
5. Fungsi *Regional Financial Surveillance* (RFS)
6. Fungsi Pengelolaan Uang Rupiah (PUR)
7. Fungsi Pengawasan SP dan PUR
8. Fungsi Komunikasi Kebijakan

## TUGAS POKOK

1. Memberikan masukan kepada Dewan Gubernur kondisi ekonomi dan keuangan daerah di wilayah kerjanya.
2. Memberikan saran kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, yang didukung dengan penyediaan informasi berdasarkan hasil kajian/riset serta memfasilitasi pengendalian inflasi, pemberdayaan sektor riil dan UMKM
3. Melaksanakan kegiatan perizinan dan pengawasan serta operasionalisasi sistem pembayaran tunai dan non tunai sesuai dengan kebutuhan ekonomi daerah di wilayah kerjanya.
4. Melaksanakan kebijakan stabilitas keuangan, program perluasan dan pemerataan akses dan keterjangkauan keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
5. Mengelola sumber daya internal yang dibutuhkan sebagai faktor pendukung fungsi-fungsi utama.

## Kalender Publikasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Aceh

Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Mei	Agustus	November	Februari

## Penerbit :

Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah  
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh  
Jl. Cut Meutia No.15, Banda Aceh - Indonesia  
Telp : 0651-33200 / Fax : 0651-34116  
Publikasi LPP secara online dapat diperoleh di:

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/aceh/Default.aspx>

# Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga buku "Laporan Perekonomian Provinsi Aceh November 2022" ini dapat dipublikasikan. Buku ini memaparkan informasi mengenai perkembangan beberapa indikator perekonomian daerah, diantaranya pertumbuhan ekonomi, perbankan, sistem pembayaran dan keuangan daerah yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan informasi internal maupun eksternal Bank Indonesia. Secara umum, ringkasan hasil kajian atas perkembangan ekonomi regional Provinsi Aceh periode triwulan laporan adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi Aceh pada triwulan III 2022 ekonomi Aceh tumbuh sebesar 2,13% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,36% (yoy). Pada sisi permintaan, perlambatan pertumbuhan didorong oleh kontraksi komponen Belanja Pemerintah dan PMTB. Sementara, pada sisi Lapangan Usaha (LU), perlambatan pertumbuhan ekonomi utamanya disumbangkan oleh LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, LU Pertambangan dan Penggalian, serta LU Konstruksi.
2. Laju inflasi Aceh pada triwulan III 2022 tercatat terakselerasi. Pada periode laporan, Provinsi Aceh mengalami inflasi sebesar 7,38% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,99% (yoy).
3. Pertumbuhan perekonomian Aceh pada tahun 2022 diperkirakan meningkat dibanding tahun 2021. Kondisi tersebut utamanya diperkirakan oleh perbaikan konsumsi rumah tangga dan investasi. Lebih lanjut, program vaksinasi massal dan vaksin *booster* tahap ketiga juga diperkirakan akan mendongkrak aktivitas dan mobilitas masyarakat. Di sisi lain, optimalisasi realisasi belanja pemerintah daerah perlu terus didorong.

Dalam kesempatan ini, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Harapan kami, kerja sama yang telah tercipta dapat terus berlanjut dan ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa kualitas dan informasi yang disajikan masih perlu terus disempurnakan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran membangun dari seluruh pihak yang berkepentingan dengan buku ini.

Kami berharap, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Banda Aceh, November 2022  
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh

Achris Sarwani  
Kepala Perwakilan

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH.....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	xi
<b>BAB 1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH.....</b>	<b>1</b>
1.1. GAMBARAN UMUM.....	2
1.2. SISI PERMINTAAN.....	3
1.3. SISI LAPANGAN USAHA.....	8
<b>BAB 2. PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH.....</b>	<b>14</b>
2.1. GAMBARAN UMUM.....	15
2.2. PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN DAERAH.....	15
2.3. BELANJA PEMERINTAH PUSAT.....	17
<b>BAB 3. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH.....</b>	<b>19</b>
3.1. PERKEMBANGAN UMUM INFLASI.....	20
3.2. ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI.....	20
3.3. <i>TRACKING</i> INFLASI TRIWULAN II 2022.....	26
3.4. AKTIVITAS TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) ACEH.....	27
<b>BAB 4. STABILITAS KEUANGAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN UMKM.....</b>	<b>33</b>
4.1. KINERJA PERBANKAN.....	34
4.2. INTERMEDIASI PERBANKAN.....	35
4.3. KINERJA KORPORASI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN.....	41
4.4. KINERJA PEMBIAYAAN/KREDIT RUMAH TANGGA.....	42
4.5. LANGKAH PENINGKATAN AKSES KEUANGAN UMKM.....	43
<b>BAB 5. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH.....</b>	<b>47</b>
5.1. SISTEM PEMBAYARAN TUNAI.....	48
5.2. SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI.....	50
5.3. KEGIATAN KUPVA BB.....	53
5.4. INKLUSI KEUANGAN.....	54
<b>BAB 6. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN.....</b>	<b>58</b>
6.1. KETENAGAKERJAAN.....	59
6.2. KEMISKINAN.....	61
<b>BAB 7. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH.....</b>	<b>64</b>
7.1. PROSPEK MAKROEKONOMI.....	65
7.2. PROSPEK INFLASI.....	67
7.3. REKOMENDASI KEBIJAKAN.....	68

# DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera Tw III 2022 .....	2
Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	2
Grafik 1.3 Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan dari Sisi Permintaan .....	3
Grafik 1.4 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga.....	3
Grafik 1.5 Perkembangan Kredit Konsumsi .....	4
Grafik 1.6 Perkembangan Hasil Survei Konsumen.....	4
Grafik 1.7 Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah.....	5
Grafik 1.8 Pertumbuhan Investasi.....	5
Grafik 1.9 Realisasi Investasi.....	6
Grafik 1.10 SKDU Investasi.....	6
Grafik 1.11 Pertumbuhan Ekspor Luar Negeri.....	6
Grafik 1,12 Perkembangan Ekspor Batubara .....	7
Grafik 1.13 Pertumbuhan Impor Luar Negeri Aceh .....	7
Grafik 1.14 Pertumbuhan Defisit Net Ekspor Antar Daerah .....	8
Grafik 1.15 Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Aceh dari Sisi LU Utama .....	8
Grafik 1.16 Perkembangan Penumpang Angkutan Udara dan Laut.....	9
Grafik 1.17 Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian .....	9
Grafik 1.18 Nilai Tukar Petani .....	9
Grafik 1.19 Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan.....	10
Grafik 1.20 Pertumbuhan Penjualan Kendaraan.....	10
Grafik 1.21 Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi.....	11
Grafik 1.22 Pertumbuhan Pengadaan Semen.....	11
Grafik 1.23 Pertumbuhan LU Pertambangan .....	12
Grafik 2.1 Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Aceh.....	18
Grafik 3.1 Perbandingan Inflasi Sumatera Tw I 2022.....	20
Grafik 3.2 Perkembangan Harga Uang Basah.....	21
Grafik 3.3 Perkembangan Harga Minyak Kelapa Sawit.....	21
Grafik 3.4 Produksi Cabai Merah .....	21
Grafik 3.5 Perkembangan Harga Bawang Merah .....	22
Grafik 3.6 Perkembangan Harga Emas Dunia .....	26
Grafik 3.7 Pergerakan Inflasi Kota Pantauan di Aceh .....	27
Grafik 4.1 Perkembangan Intermediasi Perbankan di Provinsi Aceh.....	32
Grafik 4.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) (% , yoy).....	33
Grafik 4.3 Realisasi Belanja APBD dan Perkembangan Giro .....	33
Grafik 4.4 Perkembangan Nilai Tabungan .....	33
Grafik 4.5 Jumlah Rekening per Saldo .....	34
Grafik 4.6 Proporsi DPK per Jenis.....	34
Grafik 4.7 Proporsi DPK per Kepemilikan .....	35

Grafik 4.8 DPK Spasial .....	35
Grafik 4.9 Perkembangan Pembiayaan Berdasarkan Lokasi Proyek dan Jenis Penggunaan .....	35
Grafik 4.10 Penyaluran Kredit Spasial .....	37
Grafik 4.11 Perkembangan NPL/NPF.....	37
Grafik 4.12 Perkembangan Penyaluran Kredit/Pembiayaan UMKM .....	38
Grafik 4.13 Penyaluran Pembiayaan UMKM Spasial .....	38
Grafik 4.14 Penyaluran Kredit/Pembiayaan Korporasi.....	39
Grafik 4.15 Tenaga Kerja Berdasarkan LU.....	40
Grafik 4.16 Proporsi Kredit RT.....	41
Grafik 5.1 <i>Netflow</i> Kas .....	46
Grafik 5.2 Pertumbuhan Inflow dan Outflow .....	46
Grafik 5.3 Transaksi Kas Titipan Triwulanan.....	47
Grafik 5.4 Transaksi Kas Titipan .....	47
Grafik 5.5 Nominal SKNBI .....	48
Grafik 5.6 Volume SKNBI.....	48
Grafik 5.7 Nominal BI RTGS .....	48
Grafik 5.8 Volume BI RTGS.....	49
Grafik 5.9 Transaksi ATM debet .....	49
Grafik 5.10 Transaksi Kartu Kredit.....	50
Grafik 5.11 Perkembangan Transaksi Uang Elektronik .....	50
Grafik 5.12 Pertumbuhan <i>Merchant</i> QRIS .....	50
Grafik 5.13 Transaksi KUPVA BB.....	51
Grafik 5.14 Disagregasi Transaksi UKA.....	52
Grafik 5.15 Penyaluran PKH (KPM).....	53
Grafik 5.16 Penyaluran PKH (Nominal).....	53
Grafik 5.17 Perkembangan Program Sembako (Nominal).....	53
Grafik 5.18 Perkembangan Program Sembako (KPM).....	54
Grafik 6.1 Tingkat Pengangguran di Wilayah Sumatera .....	58
Grafik 6.2 Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota .....	60
Grafik 6.3 Penduduk Miskin Provinsi di Sumatera .....	61
Grafik 6.4 Perkembangan Rasio Gini di Aceh .....	62

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Belanja APBD Triwulan I 2022 .....	15
Tabel 2.2 Realisasi Belanja Transfer dan Dana Desa Triwulan I 2022.....	16
Tabel 2.3 Realisasi Pendapatan APBD se-Provinsi Aceh Triwulan I 2022.....	16
Tabel 2.4 Realisasi Belanja APBN di Aceh Triwulan I 2022 .....	17
Tabel 2.5 Realisasi Pendapatan APB di Provinsi Aceh Triwulan I 2022.....	17
Tabel 2.6 Data Realisasi APBD se-Provinsi Aceh .....	18
Tabel 2.7 Data Realisasi APBN di Provinsi Aceh .....	18
Tabel 3.1 Inflasi Kelompok Barang .....	20
Tabel 3.2 Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau .....	20
Tabel 3.3 Inflasi Kelompok Pakaian dan Alas Kaki .....	22
Tabel 3.4 Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar .....	22
Tabel 3.5 Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rumah Tangga .....	23
Tabel 3.6 Inflasi Kelompok Kesehatan.....	23
Tabel 3.7 Inflasi Kelompok Transportasi.....	24
Tabel 3.8 Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Keuangan.....	24
Tabel 3.9 Inflasi Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya.....	25
Tabel 3.10 Inflasi Kelompok Pendidikan .....	25
Tabel 3.11 Inflasi Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran.....	25
Tabel 3.12 Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya.....	25
Tabel 5.1 Rasio Ketersediaan Layanan Lembaga Keuangan Formal .....	52
Tabel 6.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	58
Tabel 6.2 Perkembangan TPT.....	58
Tabel 6.3 Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor .....	59
Tabel 6.4 Tenaga Kerja Menurut Pendidikan.....	59
Tabel 6.5 Tenaga Kerja Berdasarkan Pekerjaan .....	59
Tabel 6.6 Nilai Tukar Petani .....	60
Tabel 6.7 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan.....	61
Tabel 6.8 Indeks Kemiskinan .....	61

# TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH

## A. PDRB

### PDRB ADHK Berdasarkan Lapangan Usaha (Sektoral)

Sektoral (Rp Triliun)	2019				2020				2021				2022		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.06	9.18	9.26	9.13	9.64	9.23	9.78	9.25	9.17	9.47	9.46	9.61	9.25	9.63	9.11
Pertambangan dan Penggalian	2.41	2.35	2.5	2.43	2.33	2.98	2.73	2.45	2.49	2.15	2.98	2.76	2.63	2.70	2.77
Industri Pengolahan	1.47	1.67	1.64	1.55	1.39	1.61	1.62	1.44	1.53	1.62	1.65	1.42	1.43	1.68	1.67
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Konstruksi	2.81	2.66	3.18	3.91	3.35	3.3	3.64	3.61	3.32	3.21	3.53	3.77	3.04	2.96	3.51
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.01	5.27	5.01	5.03	4.74	4.78	4.69	5.03	4.48	5.18	4.96	5.41	4.90	5.27	5.19
Transportasi dan Pergudangan	2.43	2.39	2.54	2.49	2.32	1.18	1.76	1.8	2.12	1.93	2.06	2.31	2.25	2.18	2.27
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.43	0.46	0.45	0.45	0.41	0.39	0.4	0.44	0.36	0.34	0.35	0.5	0.47	0.51	0.53
Informasi dan Komunikasi	1.12	1.15	1.16	1.19	1.28	1.35	1.29	1.26	1.34	1.33	1.45	1.46	1.47	1.51	1.61
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.57	0.57	0.58	0.62	0.62	0.6	0.58	0.57	0.57	0.55	0.58	0.53	0.60	0.45	0.51
Real Estate	1.34	1.38	1.39	1.4	1.41	1.35	1.35	1.34	1.37	1.37	1.53	1.4	1.42	1.43	1.59
Jasa Perusahaan	0.21	0.22	0.21	0.23	0.21	0.2	0.21	0.22	0.20	0.19	0.23	0.22	0.23	0.25	0.26
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.56	3.02	3.01	3.26	2.67	2.94	2.81	3.05	2.62	3.30	2.98	3.29	2.56	3.04	3.27
Jasa Pendidikan	0.78	0.89	0.92	0.94	0.84	0.91	0.92	0.99	0.88	0.84	0.88	1.1	0.95	0.95	0.91
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.9	1.02	1.03	1.04	0.97	0.95	1.06	1.18	1.07	1.09	1.16	1.25	1.32	1.34	1.30
Jasa lainnya	0.45	0.47	0.48	0.48	0.48	0.45	0.48	0.51	0.48	0.44	0.47	0.56	0.54	0.56	0.57
<b>PDRB</b>	<b>31.62</b>	<b>32.8</b>	<b>33.43</b>	<b>34.2</b>	<b>32.71</b>	<b>32.3</b>	<b>33.4</b>	<b>33.21</b>	<b>32.07</b>	<b>33.10</b>	<b>33.34</b>	<b>35.66</b>	<b>33.13</b>	<b>34.54</b>	<b>35.14</b>
<b>PDRB Non Migas</b>	<b>29.21</b>	<b>30.44</b>	<b>30.93</b>	<b>31.8</b>	<b>30.38</b>	<b>29.3</b>	<b>30.67</b>	<b>30.75</b>	<b>29.58</b>	<b>30.95</b>	<b>31.36</b>	<b>32.89</b>	<b>30.50</b>	<b>31.84</b>	<b>32.37</b>

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

## PDRB ADHK Berdasarkan Pengeluaran

Komponen (Rp Triliun)	2019				2020				2021				2022		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
- Konsumsi Rumah Tangga	18.01	18.5	18.58	18.65	18.67	18.5	18.28	17.82	17.72	18.55	18.83	19.04	18.84	19.34	19.21
- Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga	0.68	0.69	0.64	0.65	0.65	0.65	0.66	0.61	0.60	0.58	0.63	0.63	0.65	0.64	0.66
- Konsumsi Pemerintah	3.03	5.94	6.12	8.26	3.24	5.95	5.85	6.44	5.24	6.54	5.87	7.56	3.17	5.30	5.32
- Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	10.02	10.02	11.35	12.13	10.92	10.78	11.53	11.92	10.32	10.97	11.36	11.88	11.01	11.04	11.11
- Perubahan Inventori	-0.01	0.01	0	0	-0.11	-0.29	0.05	0.28	0.18	-0.05	0.01	0.03	0.13	0.03	-0.02
- Ekspor Luar Negeri	0.95	1.09	1.06	1.12	1.33	0.76	0.74	0.78	1.27	0.94	1.00	1.75	1.61	1.55	1.61
- Impor Luar Negeri	0.37	0.77	1.12	0.52	0.27	0.07	0.06	0.2	0.08	0.19	0.12	0.15	0.19	0.37	0.19
- Net Ekspor Antarprovinsi	-0.7	-2.68	-3.21	-6.06	-1.72	-4	-3.64	-4.45	-3.17	-4.24	-3.26	-5.03	-2.10	-2.98	-2.56
<b>PDRB</b>	<b>31.62</b>	<b>32.8</b>	<b>33.43</b>	<b>34.2</b>	<b>32.71</b>	<b>32.3</b>	<b>33.4</b>	<b>33.21</b>	<b>32.07</b>	<b>33.10</b>	<b>###</b>	<b>35.66</b>	<b>33.13</b>	<b>###</b>	<b>35.14</b>
<b>PDRB Non Migas</b>	<b>29.21</b>	<b>30.44</b>	<b>30.93</b>	<b>31.8</b>	<b>30.38</b>	<b>29.3</b>	<b>30.67</b>	<b>30.75</b>	<b>1.4665</b>	<b>30.95</b>	<b>31.36</b>	<b>32.89</b>	<b>30.50</b>	<b>31.84</b>	<b>32.37</b>

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

## B. Inflasi

Inflasi (%, yoy)	2019				2020				2021				2022		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
<b>Banda Aceh</b>	2,01	2,77	2,22	1,38	3,72	1,31	1,90	3,46	1,25	1,87	2,07	2,41	3,95	6,31	7,85
<b>Lhokseumawe</b>	1,50	1,97	1,89	1,20	3,36	1,08	1,67	3,55	2,31	3,18	2,52	1,97	2,97	5,23	6,10
<b>Meulaboh</b>	1,74	4,38	5,21	4,28	5,49	2,13	2,30	4,23	1,62	2,86	1,48	2,08	3,56	6,22	8,02
<b>Aceh</b>	<b>1,82</b>	<b>2,73</b>	<b>2,51</b>	<b>1,69</b>	<b>3,84</b>	<b>1,36</b>	<b>1,89</b>	<b>3,59</b>	<b>1,61</b>	<b>2,37</b>	<b>2,12</b>	<b>2,24</b>	<b>3,62</b>	<b>5,99</b>	<b>7,38</b>

Kota	Kelompok (% , yoy)												
	Makanan, Minuman, dan Tembakau	Pakaian dan Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar RT	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Trans.	Infokom, dan Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	Pend.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	Total	
<b>Banda Aceh</b>	7.06	1.91	7.41	3.50	4.17	21.36	0.08	-1.14	0.22	8.15	6.35	7.85	
<b>Lhokseumawe</b>	7.72	4.13	2.92	5.53	0.08	21.80	-0.73	3.55	1.13	3.44	2.69	6.10	
<b>Meulaboh</b>	11.11	1.05	3.86	5.64	5.75	18.03	-1.88	2.49	2.54	4.44	4.90	8.02	
<b>Aceh</b>	<b>7.93</b>	<b>2.55</b>	<b>5.81</b>	<b>4.42</b>	<b>2.71</b>	<b>21.00</b>	<b>-0.39</b>	<b>0.77</b>	<b>0.57</b>	<b>6.41</b>	<b>4.99</b>	<b>7.38</b>	

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

## C. Perbankan

### Indikator Umum

Indikator	2019				2020				2021				2022		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
<b>Total Aset (Rp Triliun)</b>	<b>52,73</b>	<b>57,79</b>	<b>54,64</b>	<b>58,01</b>	<b>55,23</b>	<b>56,85</b>	<b>59,96</b>	<b>58,14</b>	<b>55,08</b>	<b>52,85</b>	<b>50,47</b>	<b>52,25</b>	<b>49,86</b>	<b>52,90</b>	<b>52,58</b>
Pertumbuhan (yoy)%	7,69	8,12	2,23	5,82	4,74	-1,61	9,73	0,22	-0,27	-7,04	-15,83	10,13	-9,48	0,09	0,00
Pertumbuhan (mtm)%	0,66	9,40	0,91	2,64	3,74	8,93	-0,46	1,57	-0,74	-5,47	0,61	3,52	-0,89	0,63	0,00
<b>DPK (Rp Triliun)</b>	<b>38,46</b>	<b>42,45</b>	<b>39,68</b>	<b>42,24</b>	<b>39,02</b>	<b>40,23</b>	<b>43,39</b>	<b>41,72</b>	<b>38,46</b>	<b>38,96</b>	<b>39,90</b>	<b>39,50</b>	<b>38,47</b>	<b>41,11</b>	<b>40,14</b>
Pertumbuhan (yoy)%	5,49	7,60	-0,58	6,48	1,45	-5,23	9,37	-1,25	-1,43	-3,17	-8,04	-5,47	0,03	5,52	0,00
Pertumbuhan (mtm)%	-0,59	13,85	1,80	1,45	1,90	7,95	-0,60	-0,41	-1,61	-0,55	6,38	6,21	0,75	1,40	0,00
<b>Kredit/Pembiayaan (Rp Triliun)</b>	<b>36,37</b>	<b>36,63</b>	<b>37,92</b>	<b>38,27</b>	<b>37,62</b>	<b>37,66</b>	<b>37,32</b>	<b>36,84</b>	<b>35,12</b>	<b>33,82</b>	<b>33,16</b>	<b>31,02</b>	<b>31,92</b>	<b>32,65</b>	<b>33,45</b>
Pertumbuhan (yoy)%	8,29	7,69	8,07	6,62	3,42	2,83	-1,57	-3,74	-6,63	-10,12	-11,15	15,30	-9,13	-3,46	0,00
Pertumbuhan (mtm)%	2,19	0,22	1,25	2,61	2,56	7,65	-1,30	1,95	-1,04	-3,30	0,71	-6,45	2,30	1,03	0,00
<b>LDR %</b>	<b>94,58</b>	<b>86,28</b>	<b>95,56</b>	<b>90,59</b>	<b>96,42</b>	<b>93,61</b>	<b>86,00</b>	<b>88,30</b>	<b>91,33</b>	<b>86,81</b>	<b>83,09</b>	<b>78,99</b>	<b>82,97</b>	<b>79,42</b>	<b>83,33</b>
<b>NPL-gross %</b>	<b>1,61</b>	<b>1,71</b>	<b>1,63</b>	<b>1,01</b>	<b>1,44</b>	<b>1,87</b>	<b>2,50</b>	<b>2,26</b>	<b>1,84</b>	<b>2,25</b>	<b>2,86</b>	<b>1,94</b>	<b>2,02</b>	<b>1,92</b>	<b>1,78</b>
<b>NPL-Nominal (Rp Triliun)</b>	<b>0,58</b>	<b>0,63</b>	<b>0,62</b>	<b>0,39</b>	<b>0,54</b>	<b>0,70</b>	<b>0,93</b>	<b>0,83</b>	<b>0,65</b>	<b>0,76</b>	<b>0,95</b>	<b>0,60</b>	<b>0,64</b>	<b>0,63</b>	<b>0,60</b>

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

### Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)/Simpanan

Simpanan	2019				2020				2021				2022		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
<b>Total (Rp Triliun)</b>	<b>38,46</b>	<b>42,45</b>	<b>39,68</b>	<b>42,24</b>	<b>39,02</b>	<b>40,23</b>	<b>43,39</b>	<b>41,72</b>	<b>38,46</b>	<b>38,96</b>	<b>39,90</b>	<b>39,50</b>	<b>38,46</b>	<b>41,10</b>	<b>40,13</b>
Pertumbuhan (yoy)%	5,49	7,60	-0,58	6,48	1,45	-5,23	9,37	-1,25	-1,43	-3,17	-8,04	-5,32	0,03	5,52	0,58
<b>Giro (Rp Triliun)</b>	<b>8,70</b>	<b>12,01</b>	<b>9,15</b>	<b>8,63</b>	<b>7,80</b>	<b>8,25</b>	<b>11,20</b>	<b>9,23</b>	<b>7,30</b>	<b>7,97</b>	<b>7,99</b>	<b>9,05</b>	<b>10,61</b>	<b>9,25</b>	<b>7,28</b>
Pertumbuhan (yoy)%	24,04	28,12	12,96	22,49	10,32	31,21	22,39	6,97	-6,33	-3,54	28,71	-1,95	45,23	16,16	-8,71
<b>Tabungan (Rp Triliun)</b>	<b>18,98</b>	<b>19,92</b>	<b>20,21</b>	<b>24,41</b>	<b>20,54</b>	<b>21,19</b>	<b>21,81</b>	<b>23,33</b>	<b>19,4</b>	<b>19,33</b>	<b>21,04</b>	<b>22,09</b>	<b>20,27</b>	<b>21,45</b>	<b>21,49</b>
Pertumbuhan (yoy)%	3,38	4,20	6,52	9,88	8,20	6,38	7,92	-4,41	-5,54	-8,77	-3,51	-5,31	4,50	10,95	2,13
<b>Deposito (Rp Triliun)</b>	<b>10,78</b>	<b>10,52</b>	<b>10,32</b>	<b>9,21</b>	<b>10,67</b>	<b>10,77</b>	<b>10,38</b>	<b>9,16</b>	<b>11,75</b>	<b>11,66</b>	<b>10,88</b>	<b>8,15</b>	<b>7,58</b>	<b>10,40</b>	<b>11,35</b>
Pertumbuhan (yoy)%	-2,75	-4,00	-1,03	11,60	-0,95	2,42	0,66	-0,57	10,03	8,14	4,74	11,02	35,47	10,76	4,40

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

### Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan

Pinjaman	2019				2020				2021				2022		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
<b>Total Kredit (Rp Triliun)</b>	<b>36,37</b>	<b>36,63</b>	<b>37,92</b>	<b>38,27</b>	<b>37,62</b>	<b>37,66</b>	<b>37,32</b>	<b>36,84</b>	<b>35,12</b>	<b>33,82</b>	<b>33,16</b>	<b>31,20</b>	<b>31,91</b>	<b>32,46</b>	<b>33,45</b>
Pertumbuhan (yoy) %	8,29	7,69	8,07	6,62	3,42	2,83	-1,57	-3,74	-6,63	-10,21	-11,15	-15,30	-9,13	-3,46	0,87
<b>Modal Kerja (Rp Triliun)</b>	<b>10,95</b>	<b>10,96</b>	<b>11,76</b>	<b>11,14</b>	<b>9,87</b>	<b>11,17</b>	<b>10,74</b>	<b>10,32</b>	<b>9,63</b>	<b>8,47</b>	<b>8,26</b>	<b>7,36</b>	<b>7,33</b>	<b>7,54</b>	<b>7,26</b>
Pertumbuhan (yoy)%	10,20	7,16	10,40	-1,36	-9,82	1,95	-8,69	-7,41	-2,48	-24,21	-23,06	-28,68	-23,78	-10,87	-12,08
<b>Investasi (Rp Triliun)</b>	<b>4,47</b>	<b>4,53</b>	<b>4,60</b>	<b>4,50</b>	<b>4,17</b>	<b>3,81</b>	<b>3,67</b>	<b>3,52</b>	<b>2,63</b>	<b>2,61</b>	<b>2,50</b>	<b>2,59</b>	<b>2,74</b>	<b>2,94</b>	<b>3,29</b>
Pertumbuhan (yoy)%	16,62	15,12	13,99	17,54	-6,66	-15,77	-20,28	-21,92	-36,90	-31,58	-31,77	-26,42	4,30	12,56	31,82
<b>Konsumsi (Rp Triliun)</b>	<b>20,95</b>	<b>21,13</b>	<b>21,55</b>	<b>22,61</b>	<b>23,57</b>	<b>22,66</b>	<b>22,91</b>	<b>23,00</b>	<b>22,86</b>	<b>22,73</b>	<b>22,39</b>	<b>21,24</b>	<b>21,83</b>	<b>22,15</b>	<b>22,88</b>
Pertumbuhan (yoy)%	5,73	6,49	5,68	8,96	12,50	7,27	6,31	1,70	-3,01	0,29	-2,26	-7,65	-4,51	-2,54	2,19

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Pinjaman	2019				2020				2021				2022		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
<b>Total Kredit (Rp Triliun)</b>	<b>42.57</b>	<b>42.78</b>	<b>43.51</b>	<b>43.98</b>	<b>43.88</b>	<b>43.00</b>	<b>43.54</b>	<b>41.64</b>	<b>40.62</b>	<b>42.37</b>	<b>44.86</b>	<b>46,46</b>	<b>47,21</b>	<b>47,57</b>	<b>47,09</b>
Pertumbuhan (yoy) %	6.69	2.76	0.49	4.21	3.07	0.52	0.07	(5.32)	(7.43)	(1.48)	3.03	11,58	16,22	12,28	5,00
<b>Modal Kerja (Rp Triliun)</b>	<b>12.42</b>	<b>12.59</b>	<b>13.48</b>	<b>12.55</b>	<b>12.16</b>	<b>13.20</b>	<b>13.73</b>	<b>12.13</b>	<b>11.77</b>	<b>11.49</b>	<b>14.38</b>	<b>13,70</b>	<b>14,03</b>	<b>13,63</b>	<b>12,24</b>
Pertumbuhan (yoy)%	6.25	(0.75)	0.25	(2.10)	(2.05)	4.82	1.86	(3.30)	(3.24)	(12.98)	4.73	12,94	19,23	18,67	-14,48
<b>Investasi (Rp Triliun)</b>	<b>7.77</b>	<b>7.66</b>	<b>7.22</b>	<b>7.32</b>	<b>7.07</b>	<b>6.40</b>	<b>6.27</b>	<b>5.86</b>	<b>5.17</b>	<b>6.86</b>	<b>5.93</b>	<b>8,89</b>	<b>8,96</b>	<b>9,38</b>	<b>9,59</b>
Pertumbuhan (yoy)%	10.98	1.26	(8.42)	3.12	(9.00)	(16.36)	(13.10)	(19.87)	(26.89)	7.08	(5.46)	51,64	73,56	36,89	61,89
<b>Konsumsi (Rp Triliun)</b>	<b>22.39</b>	<b>22.53</b>	<b>22.81</b>	<b>24.11</b>	<b>24.65</b>	<b>23.40</b>	<b>23.54</b>	<b>23.64</b>	<b>23.68</b>	<b>24.02</b>	<b>24.55</b>	<b>23,86</b>	<b>12,20</b>	<b>24,55</b>	<b>25,25</b>
Pertumbuhan (yoy)%	5.51	5.37	3.83	8.20	10.10	3.85	3.19	(1.95)	(3.92)	2.67	4.29	0,95	2,22	2,20	2,88

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Proyek, diolah

## Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor (Rp Triliun)	2019				2020				2021				2022		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
<b>Pertanian</b>	3.02	3.05	3.59	3.55	3.29	3.6	3.47	2.63	1.78	1.99	1.81	1.29	1.27	1.23	1.39
<b>Pertambangan</b>	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.41
<b>Industri Pengolahan</b>	3	2.73	2.72	1.99	1.68	1.77	1.45	2.29	1.94	1.02	0.69	0.81	0.86	0.89	0.05
<b>Listrik Gas dan Air</b>	0.14	0.14	0.14	0.12	0.11	0.1	0.1	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.89
<b>Konstruksi</b>	0.84	0.92	1.08	1.09	0.88	0.94	0.98	0.98	0.82	0.68	0.72	0.56	0.47	0.57	0.06
<b>Perdagangan</b>	6.67	6.59	6.62	6.54	5.78	5.83	5.64	5.19	4.97	4.9	5.04	4.39	4.43	5.02	0.65
<b>Pengangkutan</b>	0.22	0.23	0.23	0.25	0.22	0.33	0.21	0.2	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	5.19
<b>Jasa Dunia Usaha</b>	0.36	0.35	0.36	0.37	0.36	0.37	0.3	0.33	0.32	0.15	0.14	0.12	0.14	0.15	0.16
<b>Jasa Masyarakat</b>	0.94	0.96	0.99	0.66	0.6	0.63	0.63	0.58	0.56	0.56	0.4	0.77	0.74	0.68	0.54
<b>Lainnya</b>	20.95	21.13	22.15	22.54	24.66	24.04	24.47	24.49	24.41	24.21	24.06	21.24	21.83	22.16	22.88
<b>Total</b>	<b>35.55</b>	<b>36.63</b>	<b>37.92</b>	<b>38.27</b>	<b>37.62</b>	<b>37.66</b>	<b>37.32</b>	<b>36.84</b>	<b>35.12</b>	<b>33.82</b>	<b>33.16</b>	<b>31.2</b>	<b>31.92</b>	<b>32.65</b>	<b>33.45</b>

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Sektor (Rp Triliun)	2019				2020				2021				2022		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
<b>Pertanian</b>	3.76	3.82	3.75	3.95	3.74	3.83	3.82	3.66	2.89	2.55	3.53	2.47	2.41	2.41	2.59
<b>Perikanan</b>	0.11	0.11	0.14	0.16	0.19	0.33	0.36	0.34	0.40	0.40	0.39	0.76	0.69	0.42	0.42
<b>Pertambangan</b>	1.55	1.38	1.51	1.19	1.35	1.16	1.24	0.98	1.08	1.06	0.87	3.91	4.78	4.94	4.72
<b>Ind. Pengolahan</b>	3.75	3.45	3.71	3.03	3.27	3.28	3.76	2.87	2.62	2.55	2.34	1.47	1.58	2.44	1.73
<b>Listrik, Gas &amp; Air</b>	0.63	0.65	0.50	0.49	0.52	0.62	0.63	0.60	0.60	2.63	0.78	0.49	0.37	0.36	0.35
<b>Konstruksi</b>	0.99	1.24	1.43	1.50	1.51	1.53	1.60	1.55	1.38	1.38	1.43	1.02	0.86	0.88	0.93
<b>Perdagangan</b>	7.10	7.23	7.23	7.14	6.34	6.30	6.02	5.54	5.53	5.45	6.70	6.31	6.18	6.70	6.83
<b>Hotel &amp; Restoran</b>	0.32	0.34	0.37	0.39	0.39	0.47	0.48	0.45	0.48	0.46	0.72	0.65	0.63	0.63	0.63
<b>Transportasi, Gudang &amp; Kom.</b>	0.49	0.50	0.50	0.52	0.49	0.45	0.44	0.40	0.38	0.33	0.98	0.92	1.00	0.41	0.40
<b>Perantara Keuangan</b>	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.01	0.17	0.01
<b>Perumahan, usaha sewa &amp; Js. Perusahaan</b>	0.37	0.40	0.39	0.40	0.40	0.41	0.40	0.39	0.39	0.34	1.22	3.31	3.35	2.39	2.33
<b>Adm Pemerintahan,</b>	0.09	0.08	0.08	0.05	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
<b>Jasa Pendidikan</b>	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04
<b>Jasa Kesehatan &amp; Keg. Sosial</b>	0.17	0.17	0.21	0.21	0.19	0.18	0.18	0.19	0.18	0.18	0.19	0.19	0.21	0.22	0.22
<b>Jasa Kemasyarakatan</b>	0.72	0.73	0.74	0.72	0.65	0.66	0.66	0.60	0.59	0.59	0.47	0.81	0.79	0.72	0.57
<b>Jasa Perseorangan</b>	0.06	0.08	0.08	0.08	0.07	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.22	0.15	0.12	0.09	0.08
<b>Badan Internasional</b>	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00
<b>Keg. Yg. Blm Jelas Keg-nya</b>	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.20	0.26	0.27	0.28	0.27	0.39	-	0.00	0.00	0.00
<b>Penerima Kredit Bukan Lap. Usaha</b>	22.39	22.53	22.81	24.11	24.65	23.40	23.54	23.64	23.68	24.02	24.55	23.86	24.21	24.70	25.25
<b>Total</b>	<b>42.57</b>	<b>42.78</b>	<b>43.51</b>	<b>43.98</b>	<b>43.88</b>	<b>43.00</b>	<b>43.54</b>	<b>41.64</b>	<b>40.62</b>	<b>42.37</b>	<b>44.86</b>	<b>46.46</b>	<b>47.21</b>	<b>47.51</b>	<b>47.10</b>

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Proyek, diolah

# RINGKASAN EKSEKUTIF

## Perkembangan Ekonomi Daerah

Pada triwulan III 2022 ekonomi Aceh tumbuh sebesar 3,12% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,36% (yoy).

Pada triwulan III 2022 ekonomi Aceh tumbuh sebesar 2,13% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,36% (yoy). Pada sisi permintaan, perlambatan pertumbuhan didorong oleh kontraksi komponen Belanja Pemerintah dan PMTB. Sementara, pada sisi Lapangan Usaha (LU), perlambatan pertumbuhan ekonomi utamanya disumbangkan oleh LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, LU Pertambangan dan Penggalian, serta LU Konstruksi.

## Perkembangan Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah pada triwulan III 2022 secara umum mengalami akselerasi, utamanya didorong oleh kenaikan realisasi anggaran APBA.

Kinerja keuangan daerah pada triwulan III 2022 secara umum mengalami akselerasi, utamanya didorong oleh kenaikan realisasi anggaran APBA. Di sisi lain realisasi belanja dan pendapatan APBN mengalami peningkatan baik secara nominal maupun persentase. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah melalui alokasi APBA dan APBK hingga triwulan III 2022 mencapai 53,39% dari total pagu belanja (Rp44,73 triliun) atau sebesar Rp23,88 triliun, realisasi tumbuh 10,67% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

## Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi Provinsi Aceh pada triwulan III 2022 tercatat sebesar 7,38% (yoy) atau lebih tinggi dibanding triwulan

Pada triwulan III 2022 inflasi Aceh mengalami peningkatan utamanya disebabkan oleh kelompok transportasi, serta kelompok makanan,

sebelumnya yang tercatat sebesar 5,99% (yoy).

minuman, dan tembakau. Lebih lanjut pada triwulan IV 2022, laju inflasi Aceh diperkirakan akan melambat dibandingkan dengan periode sebelumnya, seiring dengan deflasi pada beberapa komoditas pangan yang menunjukkan kebutuhan telah tercukupi. Kendati demikian, masih terdapat potensi inflasi seiring dengan buruknya cuaca pada akhir tahun yang berpotensi banjir.

## Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan UMKM

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan III 2022 tetap terjaga.

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan III 2022 tetap terjaga. Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Provinsi Aceh yang tercermin dari indikator Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan, dan *Non Performing Financing* (NPF) tetap terjaga dan melanjutkan tren perbaikan. *Financing to Deposit Ratio* pun juga meningkat seiring pembiayaan yang meningkat, terutama untuk jenis penggunaan investasi sektor prioritas.

## Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Selama triwulan III 2022, perkembangan sistem pembayaran konsisten berjalan lancar dalam menopang pemulihan perekonomian Provinsi Aceh.

Selama triwulan III 2022, perkembangan sistem pembayaran secara konsisten berjalan lancar dalam menopang pemulihan perekonomian Provinsi Aceh. Sistem pembayaran tunai berjalan sesuai dengan pola historisnya dimana terdapat penurunan pada *outflow* dan *inflow* pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara sistem pembayaran nontunai, baik nilai besar maupun ritel, terus menunjukkan tren peningkatan. Di sisi lain, penggunaan kartu ATM/debit dan Uang Elektronik tumbuh positif pada triwulan laporan.

## Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan kemiskinan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode berjalan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Begitupula halnya dengan aspek kemiskinan yang juga menunjukkan penurunan. Jika dibandingkan dengan seluruh provinsi di Sumatera, TPT Aceh berada pada urutan keempat sedangkan kemiskinan berada pada peringkat pertama.

## Prospek Perekonomian

Perekonomian Aceh pada tahun 2022 diperkirakan akan melanjutkan pertumbuhan positif dari tahun sebelumnya.

Kinerja perekonomian Aceh pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh 2,83%-3,63%(yoy) atau lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (2,79%, yoy). Kondisi tersebut utamanya diperkirakan oleh perbaikan konsumsi rumah tangga dan investasi. Laju inflasi tahun 2022 diperkirakan berada di atas sasaran inflasi nasional sebesar  $3\pm 1\%$ , dengan perkiraan peningkatan inflasi didorong oleh komponen *administered prices* dan *volatile foods*.



## BAB I

# PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

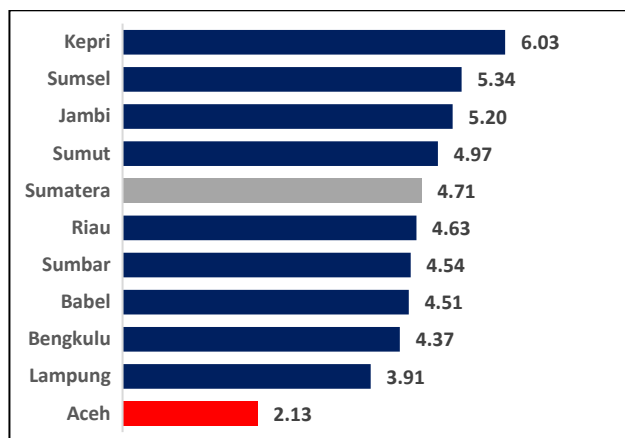
Pada triwulan III 2022 ekonomi Aceh tumbuh sebesar 2,13% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,36% (yoy). Pada sisi permintaan, perlambatan pertumbuhan didorong oleh kontraksi komponen Belanja Pemerintah dan PMTB. Sementara, pada sisi Lapangan Usaha (LU), perlambatan pertumbuhan ekonomi utamanya disumbangkan oleh LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, LU Pertambangan dan Penggalian, serta LU Konstruksi

## 1.1. Gambaran umum

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2022 melanjutkan kinerja yang positif dari triwulan sebelumnya. Perekonomian nasional tumbuh sebesar 5,72% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,44% (yoy).

Berbeda dengan nasional, meski perekonomian Sumatera pada triwulan III 2022 juga tumbuh positif sebesar 4,71% (yoy), realisasi tersebut menurun dari periode sebelumnya yang tumbuh 4,95% (yoy). Berdasarkan wilayah regional Sumatera (Grafik 1.1), semua wilayah mengalami pertumbuhan yang positif diatas 2,0% (yoy). Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 6,03%, diikuti oleh Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,34% dan Provinsi Jambi sebesar 5,20%.

**Grafik 1.1.** Pert. Ekonomi Prov. di Sumatera Tw III 2022 (% ,yoy)



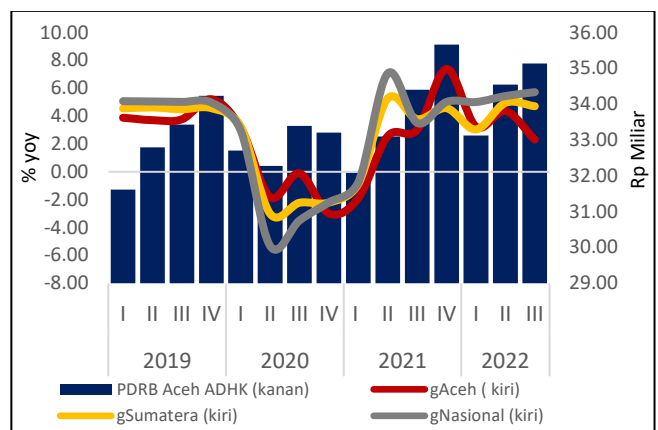
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Jika dilihat secara spasial, Aceh tercatat memiliki pangsa sebesar 5,55% terhadap perekonomian Sumatera. Sumbangan tersebut relatif tidak mengalami perubahan dibanding periode-periode sebelumnya. Dengan proporsi tersebut, Aceh masih menjadi provinsi dengan perekonomian ketiga terkecil di Sumatera setelah Bengkulu (1,97%) dan Kepulauan Bangka Belitung (2,31%). Sementara itu, Sumatera Utara (23,02%), Riau (21,38%), dan Sumatera Selatan (13,95%) masih menjadi provinsi dengan sumbangan ekonomi paling dominan di Sumatera dengan pangsa dari ketiga provinsi tersebut mencapai lebih dari 50%

dari total ekonomi Sumatera.

Ekonomi Aceh triwulan III tercatat tumbuh sebesar 2,13% (yoy) (Grafik 1.2), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,36% (yoy). Ditinjau dari sisi permintaan, perlambatan perekonomian Aceh pada triwulan laporan utamanya disebabkan oleh terkontraksinya komponen Belanja Pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Sementara itu, dari sisi lapangan usaha, penurunan disebabkan oleh terkontraksinya Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian, serta Lapangan Usaha Konstruksi.

**Grafik 1.2.** Pertumbuhan Ekonomi

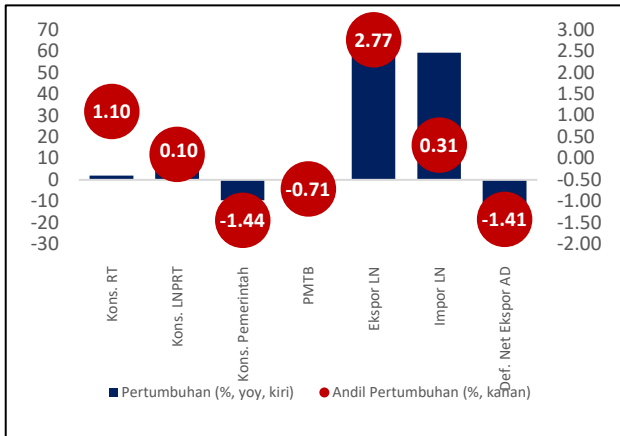


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

## 1.2. Sisi Permintaan

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan III 2022 utamanya didorong oleh ekspor luar negeri dan konsumsi rumah tangga. Komponen ekspor luar negeri menjadi komponen yang memberikan andil akselerasi tertinggi sebesar (2,77%) pada triwulan laporan yang diikuti konsumsi rumah tangga (1,10%), dan impor luar negeri (0,31%) (Grafik 1.3).

**Grafik 1.3.** Pert. dan Andil Pert. Sisi Permintaan Tw III 2022

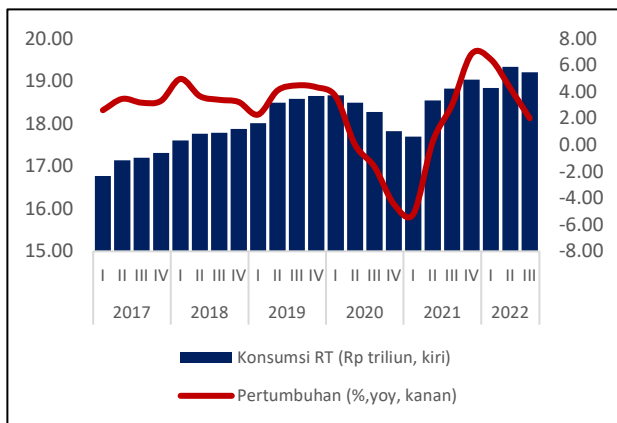


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

### Konsumsi Rumah Tangga

Pada triwulan III 2022, konsumsi rumah tangga tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 2,01% (yoy) atau melambat dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,27% (yoy). Meskipun melambat, konsumsi rumah tangga mampu memberikan andil sebesar 1,10%. (Grafik 1.4). Pertumbuhan tersebut didorong oleh kondisi perekonomian yang telah berangsur pulih pasca pandemi COVID-19, sehingga berdampak pada peningkatan permintaan secara agregat. Angka pertumbuhan pada komponen ini dipengaruhi oleh meningkatnya kegiatan masyarakat yang sudah lebih banyak beraktivitas di luar rumah. Hal tersebut juga didukung oleh adanya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha dan Tahun Baru Islam diikuti oleh perayaan Meugang yang mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi barang terutama pangan.

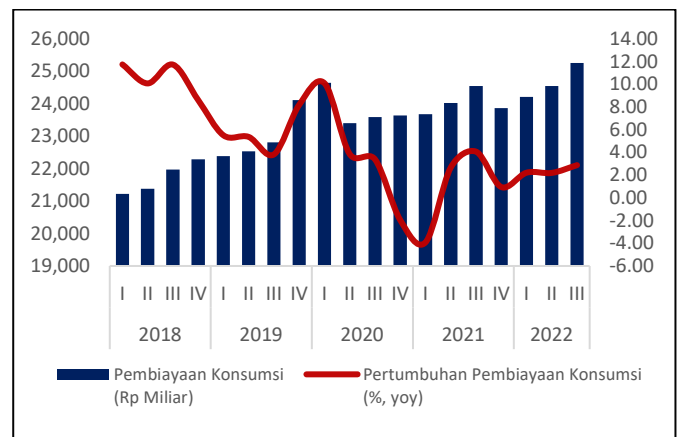
**Grafik 1.4.** Pertumbuhan Konsumsi RT



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Namun demikian, penyaluran penyaluran pembiayaan konsumsi masih menunjukkan kenaikan pada periode laporan. Nominal pembiayaan kepada rumah tangga tercatat sebesar Rp 25,2 triliun, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, namun melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Grafik 1.5). Peningkatan kinerja pembiayaan rumah tangga terjadi pada seluruh jenis pembiayaan, terutama pembiayaan dengan penggunaan yang bersifat multiguna.

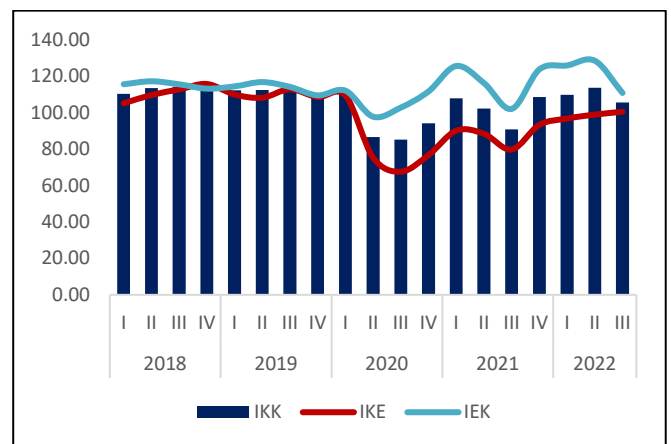
**Grafik 1.5.** Perkembangan Kredit Konsumsi



Sumber: Laporan Bank Umum, lokasi proyek, diolah

Lebih lanjut, kinerja konsumsi rumah tangga yang melambat sejalan dengan perlambatan optimisme masyarakat pada triwulan III 2022. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) (Grafik 1.6) mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan III 2022 IKK tercatat sebesar 105,72, sementara itu pada triwulan II 2022, IKK tercatat sebesar 113,80.

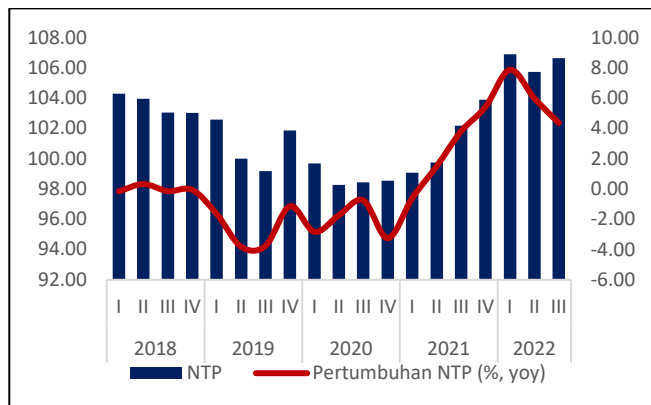
**Grafik 1.6.** Perkembangan Hasil Survei Konsumen



Sumber : Survei Konsumen, Bank Indonesia

Indikator konsumsi selanjutnya adalah Nilai Tukar Petani (NTP) (Grafik 1.7), NTP pada triwulan III mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, NTP tercatat sebesar 106,65. Meskipun demikian, nilai tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang sebesar 102,19. NTP menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan biaya produksi dan barang dan jasa yang dikonsumsi. Artinya pada triwulan laporan, daya tukar petani masih cukup baik, dimana indeks yang diterima lebih besar daripada indeks yang dibayarkan. Meskipun, pertumbuhan indeks mulai melambat sejalan dengan perlambatan konsumsi rumah tangga.

**Grafik 1.7.** Perkembangan Nilai Tukar Petani



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

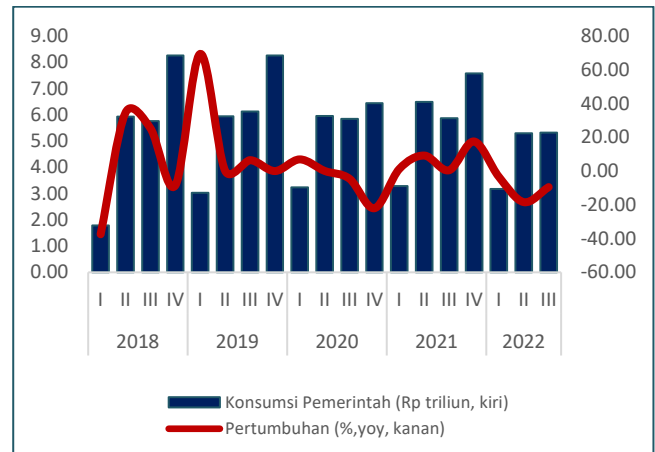
## Konsumsi Pemerintah

Kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan III 2022 mengalami kontraksi yang melambat sebesar -9,50% (yoy), tidak lebih dalam dibandingkan dari kontraksi triwulan sebelumnya yang tercatat -18,42% (yoy) (Grafik 1.8). Pertumbuhan konsumsi pemerintah pada triwulan III tersebut didorong oleh realisasi belanja pemerintah, baik APBN maupun APBD yang pada triwulan laporan mampu tumbuh secara tahunan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh, realisasi belanja APBN sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp32,52 triliun (70,13% dari total pagu), meningkat 7,03% (yoy). Secara proporsi, realisasi belanja APBN tersebut meliputi 29,36%

merupakan kontribusi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan 70,64% merupakan kontribusi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Sementara itu, realisasi belanja pemerintah daerah pada triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp23,88 triliun (53,99% dari total pagu).

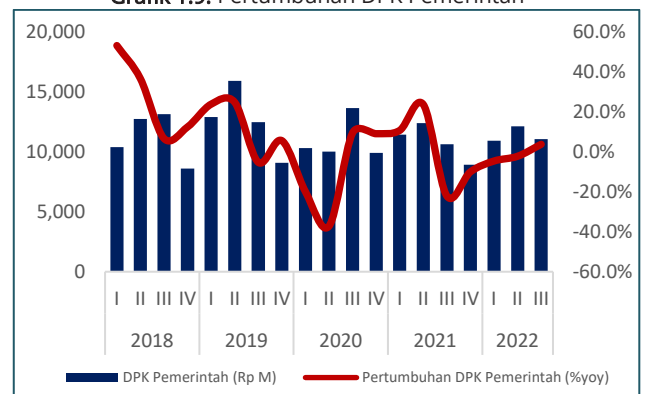
**Grafik 1.8.** Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kenaikan realisasi belanja pemerintah pada triwulan laporan secara nominal pada triwulan laporan sejalan dengan dana simpanan pemerintah daerah di perbankan yang lebih rendah daripada triwulan sebelumnya. Pada triwulan III 2022, Dana Pihak Ketiga (DPK) Pemerintah tercatat sebesar Rp11,07 triliun, menurun dari triwulan sebelumnya sebesar Rp12,14 triliun (Grafik 1.9).

**Grafik 1.9.** Pertumbuhan DPK Pemerintah



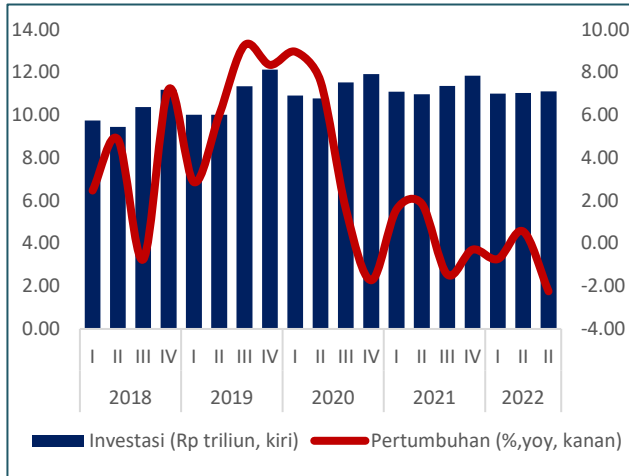
Sumber: Laporan Bank Umum, lokasi proyek, diolah

Meskipun demikian, perlambatan konsumsi pemerintah pada triwulan III tersebut didorong oleh realisasi belanja modal yang menurun jika dibandingkan dengan triwulan III 2021. Penurunan tersebut terjadi pada 23 Kementrian/Lembaga dari total 36 Kementrian/Lembaga di Aceh.

## Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/Investasi

Pada triwulan III 2022, PMTB/investasi di wilayah Aceh berkontraksi sebesar -2,24% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,56% (yoy) (Grafik 1.10).

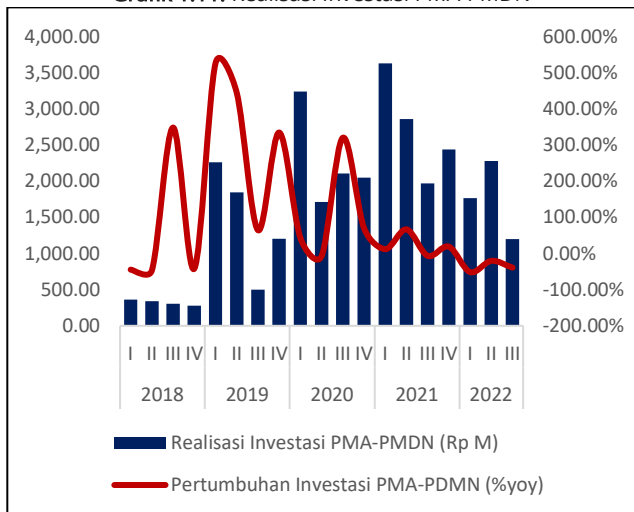
Grafik 1.10. Pertumbuhan PMTB/Investasi



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Konstraksi tersebut sejalan dengan penurunan realisasi penanaman modal asing (PMA) dan dari dalam negeri (PMDN). Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Aceh, pada triwulan III 2022, investasi tercatat sebesar Rp1.200,72 Miliar lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp2.280,02 Miliar. Secara tahunan, investasi juga tercatat mengalami perlambatan sebesar -39,05% (yoy) (Grafik 1.11).

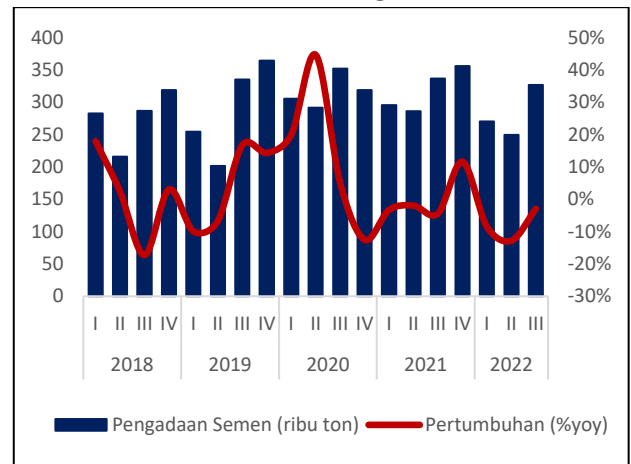
Grafik 1.11. Realisasi Investasi PMA-PMDN



Sumber: Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), diolah

Di sisi lain, investasi bangunan yang diindikasikan dari pengadaan semen mengalami peningkatan pada triwulan III 2022. Pengadaan semen pada triwulan III 2022 berkontraksi sebesar -2,91% (yoy), tidak lebih dalam dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -12,81% (yoy) (Grafik 1.12). Hal ini mengindikasikan terjadi realisasi proyek pemerintah maupun swasta yang lebih tinggi.

Grafik 1.12. Realisasi Pengadaan Semen

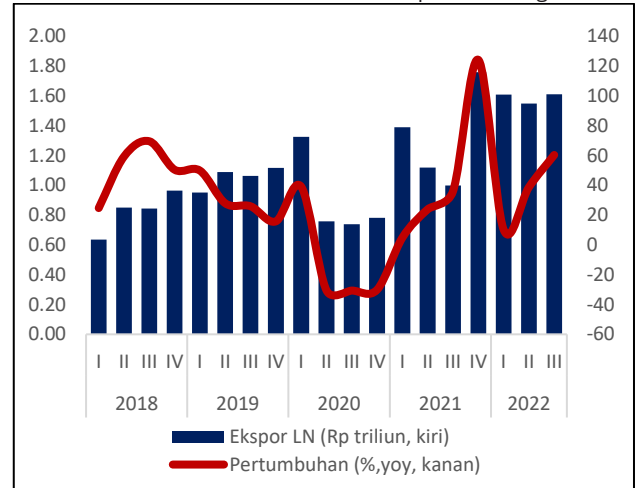


Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (ASI), diolah

## Ekspor Luar Negeri

Ekspor luar negeri Provinsi Aceh pada triwulan III 2022 tercatat meningkat sebesar 60,41% (yoy), dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik 1.13). Dengan laju tersebut, ekspor luar negeri Aceh memberikan andil positif sebesar 2,77% terhadap kinerja ekonomi Aceh secara keseluruhan pada triwulan III 2022.

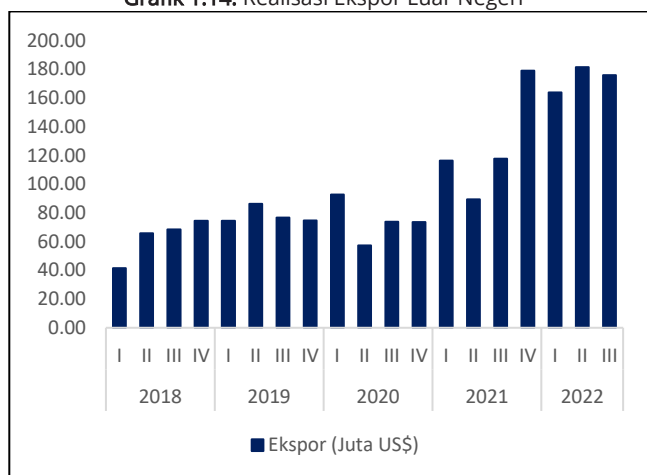
Grafik 1.13. Pertumbuhan PDRB Ekspor Luar Negeri



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Perbaikan kinerja komponen ekspor luar negeri tersebut didukung oleh realisasi ekspor barang asal Provinsi Aceh yang lebih tinggi pada tahun 2022. Nilai ekspor barang asal Provinsi Aceh pada triwulan III 2022 secara nominal tercatat sebesar 175,02 juta USD (Grafik 1.14). Keseluruhan ekspor pada triwulan laporan semuanya berupa komoditas nonmigas terutama dari kelompok bahan bakar mineral; kopi, teh, rempah-rempah; dan buah-buahan.

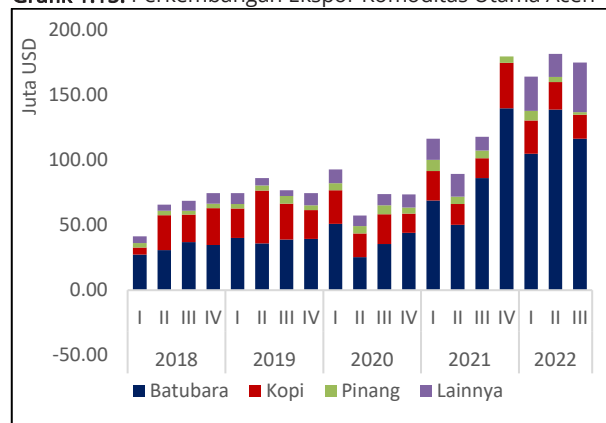
**Grafik 1.14.** Realisasi Ekspor Luar Negeri



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Secara umum, kinerja ekspor masih ditopang oleh komoditas batubara dan kopi, yang merupakan komoditas unggulan di Provinsi Aceh. Kedua komoditas tersebut memiliki pangsa sebesar 66,52% dan 10,62% dari total ekspor Provinsi Aceh. Ekspor komoditas batubara pada triwulan III 2022 mencapai 116,42 juta USD, tercatat tumbuh sebesar 34,95% (yoy) (Grafik 1.15). Realisasi ekspor batubara yang masih berada pada posisi yang tinggi didorong oleh peningkatan permintaan dari negara tujuan ekspor akan kebutuhan energi. Komoditas ekspor kedua terbesar adalah kopi, pada triwulan laporan ekspor komoditas tersebut mencapai 18,58 juta USD atau naik sebesar 21,81% (yoy).

**Grafik 1.15.** Perkembangan Ekspor Komoditas Utama Aceh

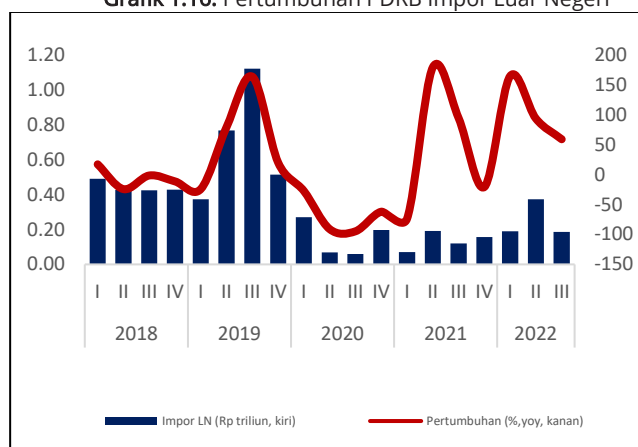


Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

## Impor Luar Negeri

Komponen impor luar negeri pada triwulan III 2022 tercatat tumbuh cukup tinggi sebesar 59,22% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh lebih tinggi sebesar 93,73% (yoy) (Grafik 1.16). Dengan laju tersebut, impor luar negeri Aceh memberikan andil sebesar 0,36% (yoy) terhadap kinerja ekonomi Aceh secara keseluruhan pada triwulan III 2022.

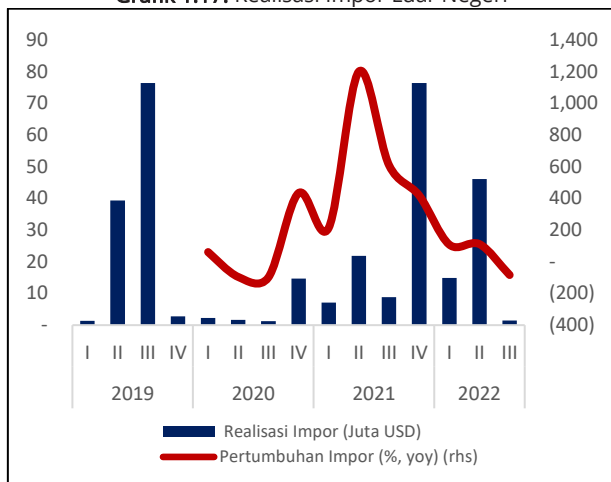
**Grafik 1.16.** Pertumbuhan PDRB Impor Luar Negeri



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

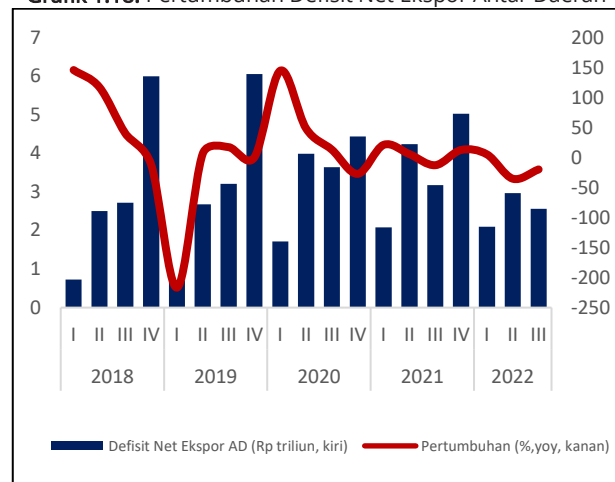
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh, nilai impor barang ke Provinsi Aceh pada triwulan III 2022 sebesar 1,47 juta USD, turun cukup signifikan dibandingkan dengan realisasi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 46,16 juta USD (Grafik 1.17). Secara umum, kinerja impor luar negeri masih didominasi oleh kelompok peralatan mesin dan bahan kimia. Secara lebih spesifik, barang impor utamanya merupakan peralatan mesin khusus *civil engineering and contractor plant and equipment and parts*.

**Grafik 1.17. Realisasi Impor Luar Negeri**



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

**Grafik 1.18. Pertumbuhan Defisit Net Ekspor Antar Daerah**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

## Net Ekspor Antar Daerah

Defisit neraca ekspor antar daerah Provinsi Aceh mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar **-19,36% (yoy)**. Pada triwulan III 2022, defisit neraca ekspor antar daerah tercatat Rp2,56 triliun (ADHK), pada triwulan II 2022, defisit tercatat Rp2,97 triliun (ADHK). Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, defisit mengalami penurunan sebesar 19,36% (yoy) (Grafik 1.18).

Defisit antar daerah mengindikasikan arus barang masuk lebih besar daripada barang yang keluar. Berdasarkan data perdagangan antar wilayah, Badan Pusat Statistik, penjualan antar wilayah paling besar di Provinsi Aceh dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang minyak mentah kelapa sawit dengan nilai penjualan sebesar Rp563 miliar. Di sisi lain, komoditas pembelian dari daerah lain didominasi oleh sepeda motor, alat transportasi umum jenis kendaraan bermotor untuk penumpang, minyak bahan bakar, gas alam (LPG), dan buah dan kernel kelapa sawit. Lima kelompok komoditas ini mencakup 45,17% pembelian antar wilayah di Provinsi Aceh. Provinsi Aceh melakukan pembelian terbesar dari Sumatera Utara dan DKI Jakarta.

## 1.3. Sisi Lapangan Usaha

Perekonomian Aceh bersumber dari tiga lapangan usaha (LU) utama, yaitu LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (pangsa 27,10%), LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (pangsa 13,69%), serta LU Pertambangan dan Penggalian (pangsa 10,72%). Kinerja dua dari ketiga LU utama Aceh menunjukkan pertumbuhan yang negatif, hanya terdapat satu LU utama yang mengalami pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya. LU Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan LU Pertambangan dan Penggalian mengalami kontraksi pada triwulan laporan. Sementara itu, LU yang mengalami pertumbuhan adalah LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Secara kumulatif ketiga LU memberikan kontribusi sebesar 51,51% terhadap struktur PDRB Provinsi Aceh.

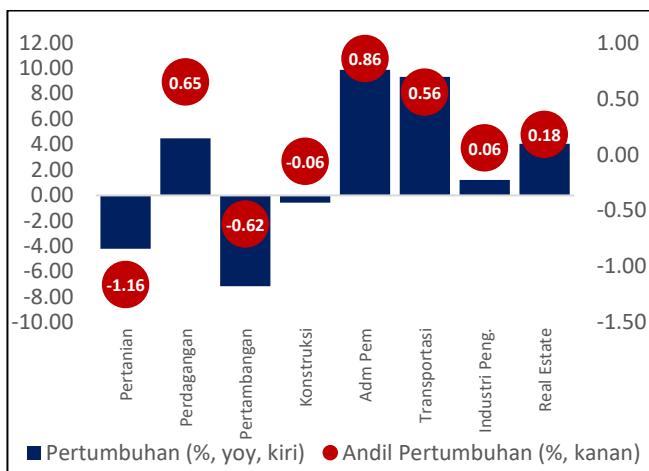
Dilihat dari sisi sumber pertumbuhan triwulan III 2022, LU pendorong pertumbuhan antara lain, LU Administrasi Pemerintah, (andil 0,86%, yoy), LU Perdagangan Besar dan Eceran (andil 0,65%, yoy), dan LU Transportasi dan Pergudangan (andil 0,56%, yoy) (Grafik 1.19).

Peningkatan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintah didorong oleh realisasi Belanja Operasi (Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa) APBD dan APBN yang meningkat pada triwulan III 2022. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh, Belanja APBD untuk Belanja Pegawai mengalami

peningkatan sebesar 0,36% (yoy). Lebih lanjut, komponen Belanja Barang dan Jasa mengalami peningkatan realisasi sebesar 15,24% (yoy).

Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 9,34% (yoy) dengan andil sebesar 0,56% (yoy) pada periode laporan. Kenaikan tersebut didorong oleh meningkatnya jumlah penumpang pesawat dan kapal. Penumpang angkutan udara pada periode laporan mengalami pertumbuhan yang cukup besar yaitu 148,53% (yoy), sejalan dengan hal tersebut, penumpangan kapal juga mengalami peningkatan sebesar 24,0% (yoy). Peningkatan juga didorong oleh pelonggaran syarat pelaku perjalanan seiring dengan turunnya kasus COVID-19 di Aceh dan adanya pembukaan penerbangan Citilink dan Airasia rute Banda Aceh – Medan. Sementara dari transportasi darat, terjadi kenaikan arus kendaraan di tol Aceh Besar sebesar dua kali lipat sejak dibukanya seksi 3.

**Grafik 1.19.** Pert. dan Kontribusi Sisi LU Utama



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

## Lapangan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Kinerja lapangan usaha pertanian pada triwulan III 2022 tercatat terkontraksi sebesar -4,19% (yoy) menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,66% (yoy) (Grafik 1.20).

Penurunan kinerja tersebut sejalan dengan perkiraan produksi padi hasil Kerangka Sampel Area (KSA) BPS yang menyatakan terjadi penurunan produksi padi pada triwulan III 2022

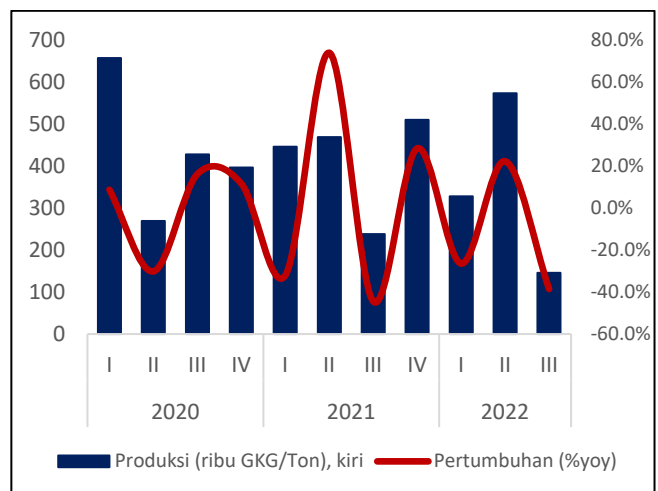
akibat pergeseran puncak panen ke triwulan IV dan gagal panen yang terjadi di beberapa daerah. Pada triwulan III, produksi padi diperkirakan sebesar 146,06 ribu GKG/ton atau terkontraksi sebesar -38,56% (yoy) (Grafik 1.21).

**Grafik 1.20.** Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

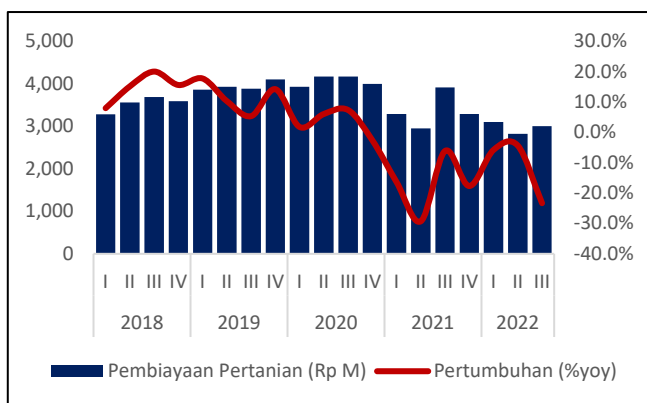
**Grafik 1.21.** Produksi Padi Aceh



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Selanjutnya, dari sisi penyaluran kredit sektoral, LU Pertanian mengalami sedikit penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya dan periode yang sama tahun lalu. Pada triwulan laporan, posisi kredit mencapai Rp3,00 triliun atau terkontraksi sebesar -23.32% (yoy) (Grafik 1.22).

**Grafik 1.22.** Penyaluran Kredit Sektor Pertanian



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Selanjutnya pada sektor perkebunan, hasil liason kepada pelaku usaha yang bergerak pada sektor tersebut menyatakan mengalami penurunan sekitar 8%. Hal tersebut berpengaruh terhadap produksi CPO dan kernel yang juga mengalami penurunan sekitar 3% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Penurunan produksi tersebut sebagai dampak dari luas lahan program *replanting* yang dilakukan oleh perusahaan terus bertambah setiap tahunnya sejak tahun 2017 dan juga bertambahnya usia tanaman. Pada tahun 2022, perusahaan melakukan *replantings* seluas 221 ha. Hasil *replanting* kembali dapat diperoleh perusahaan setelah 3 tahun (Tanaman Belum Menghasilkan/TBM menjadi Tanaman Menghasilkan/TM).

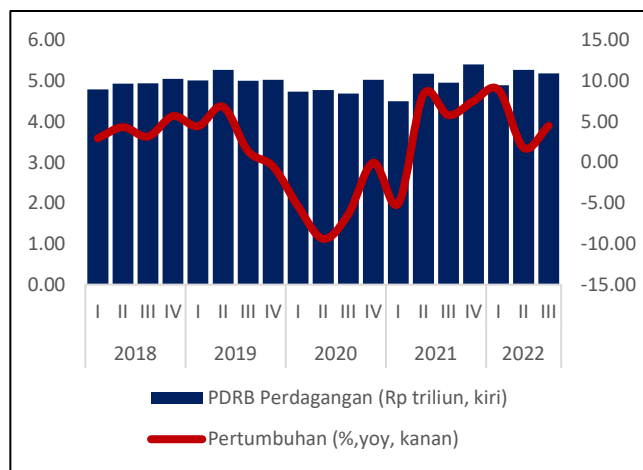
## Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Lapangan usaha perdagangan pada triwulan laporan tercatat tumbuh 4,50% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,81% (yoy) (Grafik 1.23).

Pertumbuhan LU perdagangan masih ditopang oleh lancarnya mobilitas masyarakat terutama di sektor ritel dan pusat perbelanjaan. Mobilitas (*google mobility index*) di sektor ritel per September 2022 tumbuh sebesar 18% dibandingkan dengan *baseline*. Lebih lanjut, sektor pusat perbelanjaan dan farmasi mengalami kenaikan yang tinggi sebesar 44%. Naiknya mobilitas masyarakat sejalan dengan tren

penurunan COVID-19 di Aceh dan pelonggaran PPKM oleh pemerintah yang mendorong pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat. Lebih lanjut, pada triwulan III terdapat HBKN Idul Adha, Pematangan Hewan Kurban, serta Tahun Ajaran Baru 2022/2023 yang meningkatkan permintaan akan barang dan jasa. Meskipun demikian, terdapat faktor penahan pertumbuhan yang lebih tinggi dari kenaikan harga BBM.

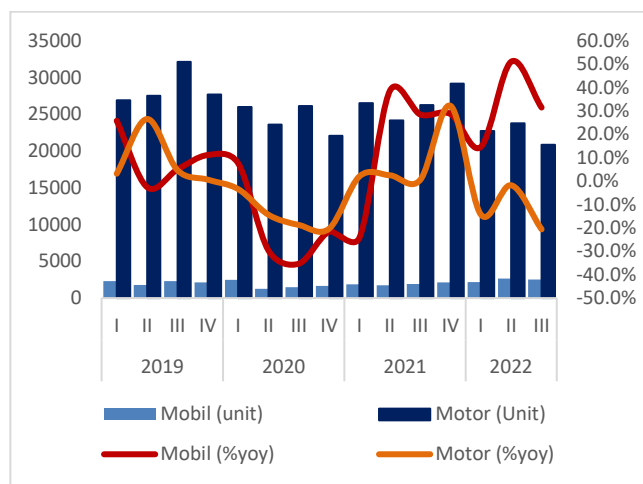
**Grafik 1.23.** Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

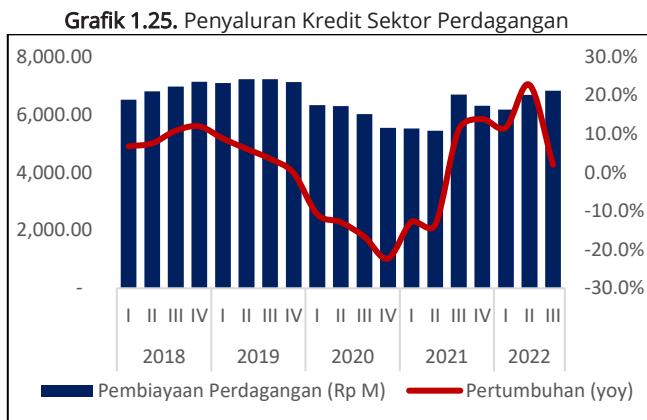
Lebih lanjut, LU Perdagangan dari sektor penjualan kendaraan secara umum mengalami perlambatan pada periode laporan. Total penjualan kendaraan mboil di Provinsi Aceh selama triwulan III berjumlah 2511 unit kendaraan atau tumbuh sebesar 31,53% (yoy) sedangkan motor berjumlah 20.870 unit kendaraan atau turun sebesar -20,58% (yoy). (Grafik 1.24).

**Grafik 1.24.** Perkembangan Penjualan Kendaraan



Sumber: BPKA, diolah

Selanjutnya, dari sisi penyaluran kredit sektoral, LU Perdagangan kembali mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya dan periode yang sama tahun lalu. Pada triwulan laporan, posisi kredit mencapai Rp6,68 triliun atau tumbuh sebesar 22.77% (yoy) (Grafik 1.25).



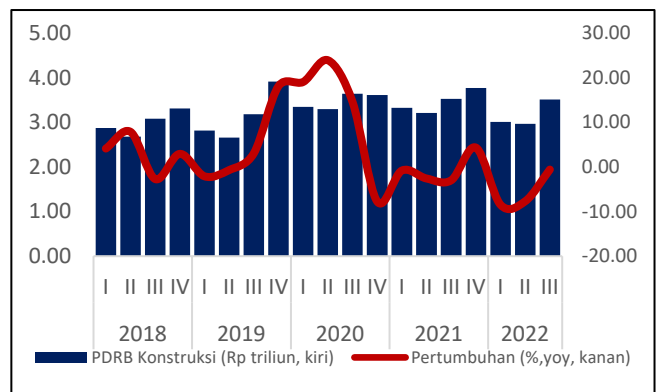
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Selanjutnya dari sisi pelaku usaha yang bergerak di sektor *consumer goods*, peningkatan kinerja usaha terkonfirmasi melalui hasil liason. Kontak menyatakan penjualan perusahaan pada TW III tahun 2022 secara *Year on Year* mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 sebesar 10%. Pada TW III tahun 2021 penjualan yang dapat dilakukan oleh perusahaan mencapai Rp1,2 Miliar perminggu, sedangkan pada TW III Tahun 2022 perusahaan mampu membukukan penjualan hingga Rp1,3 Miliar perminggu. Bahkan pada saat lebaran idul adha, perusahaan mampu melakukan penjualan hingga Rp1,7 miliar dalam satu minggu. Peningkatan ini didorong oleh mulai pulihnya perekonomian secara global pasca pandemi Covid-19 dan terjadinya kebakaran yang menimpa Suzuya. Terbakarnya Suzuya ternyata meningkatkan penjualan perusahaan karena meningkatnya penjualan dari outlet-outlet selain Suzuya yang didistributuri oleh perusahaan.

## Lapangan Usaha Konstruksi

Secara umum pada triwulan III 2022, kinerja lapangan usaha konstruksi berkontraksi sebesar 0,58% (yoy), tidak sedalam triwulan sebelumnya yang berkontraksi 7,69% (yoy) (Grafik 1.26).

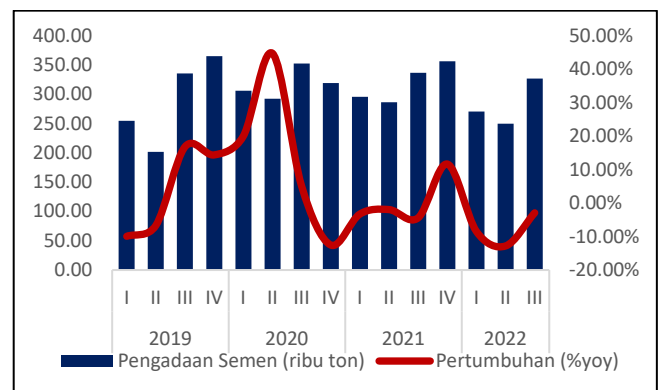
**Grafik 1.26. Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kinerja yang membaik tersebut sejalan dengan data realisasi pengadaan semen di Aceh. Pengadaan semen pada triwulan laporan mencapai 327,06 ribu ton lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 1.27). Meskipun demikian, realisasi tersebut lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu atau berkontraksi sebesar -2,91% (yoy). Kinerja yang masih berkontraksi tersebut diperkirakan oleh realisasi proyek pemerintah yang masih rendah, sampai dengan triwulan III belanja modal baru mencapai 47,10% dari Pagu Anggaran untuk APBN dan 43,25% dari Pagu Anggaran untuk APBD.

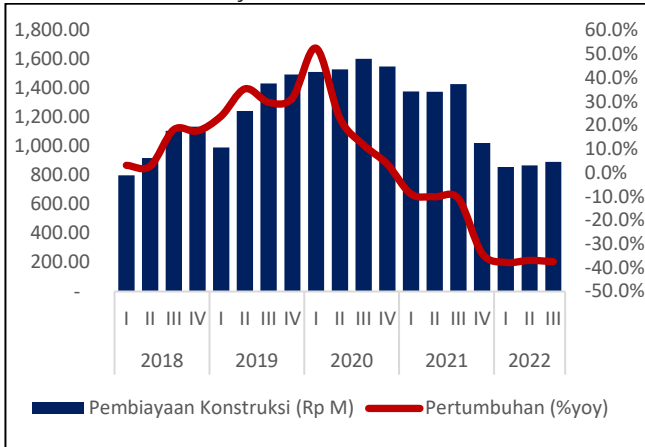
**Grafik 1.27. Pertumbuhan Pengadaan Semen**



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (ASI), diolah

Selanjutnya, dari sisi penyaluran kredit sektoral, LU Konstruksi mengalami sedikit peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya namun masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pada triwulan laporan, posisi kredit mencapai Rp894,02 miliar atau berkontraksi sebesar -37.43% (yoy) (Grafik 1.28).

**Grafik 1.28. Penyaluran Kredit Sektor Konstruksi**



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

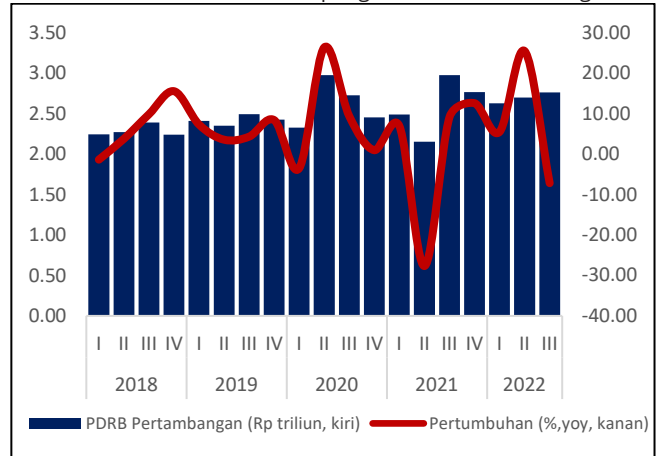
Dari sisi pelaku usaha yang bergerak di sektor konstruksi, kinerja perusahaan masih mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu yang didorong oleh pengerjaan proyek *multiyears* yang bersumber dari APBN. Meskipun demikian, pelaku usaha menyatakan terjadi kenaikan harga biaya bahan baku yang signifikan membuat proyek dengan kontrak lama perlu dilakukan penyesuaian harga.

## Lapangan Usaha Pertambangan

Pada triwulan laporan, kinerja lapangan usaha pertambangan tercatat terkontraksi sebesar -7.15% (yoy) lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh cukup tinggi sebesar sebesar 25,54% (yoy) (Grafik 1.29). Melalui pertumbuhan tersebut, lapangan usaha pertambangan memberikan andil faktor penahan pertumbuhan sebesar -0,62% (yoy).

Penurunan kinerja di Sektor Pertambangan utamanya disebabkan oleh produksi batu bara yang mengalami penurunan, hal ini dikarenakan stock lama masih ada sehingga produksi baru dibatasi. Kondisi ini juga terkonfirmasi dari ekspor batu bara yang melambat pada triwulan laporan. Produksi batu bara secara tidak langsung tercermin dari nilai ekspor ke luar negeri. Nilai ekspor batu bara mengalami pertumbuhan sebesar 79,07% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 1.30).

**Grafik 1.29. Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

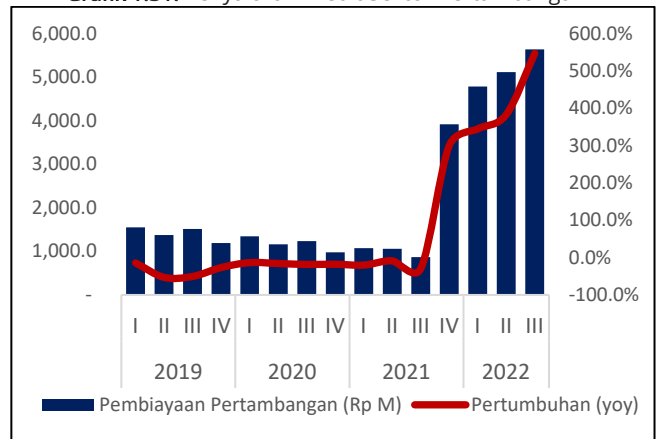
**Grafik 1.30. Perkembangan Ekspor Batu Bara**



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Selanjutnya, dari sisi penyaluran kredit sektoral, LU Pertambangan dan Penggalian kembali mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya dan periode yang sama tahun lalu. Pada triwulan laporan, kredit mencapai Rp5,63 triliun atau tumbuh sebesar 547.11% (yoy) (Grafik 1.31).

**Grafik 1.31. Penyaluran Kredit Sektor Pertambangan**



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

## Jumlah yang melimpah, Pesantren memiliki Potensi Besar Kembangkan Ekonomi Aceh

Potensi ekonomi syariah di Aceh belum maksimal dikembangkan. Peran masyarakat dalam industri halal masih minim dan cenderung sebagai konsumen pasar dibandingkan sebagai produsen. Salah satu potensi besar yang masih tertidur tersebut adalah kekuatan ekonomi berbasis pesantren. Dengan jumlah sebaran Pesantren sebanyak 1626 di seluruh Aceh dan santri yang mencapai 252.436 orang, Pesantren memiliki potensi ekonomi yang sangat besar meskipun hanya sirkulasi bisnis didalam lingkungannya saja karena populasi penghuni dayah yang terdiri dari para santri, guru/ustad, serta pengurus dayah.

Pesantren atau dikenal dengan sebutan 'Dayah' merupakan institusi pendidikan yang telah melekat dengan masyarakat Aceh. Dayah berfungsi sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah bagi masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap Dayah menjadikannya memiliki reputasi sangat baik, sehingga berkedudukan sosial yang terpandang dan memiliki pengaruh yang besar bagi lingkungan masyarakat. Sejak awal didirikan, karakteristik Dayah ialah bersifat mandiri dari segala aspek. Dayah memiliki latar belakang yang tidak terikat kelompok atau politik manapun dan hanya berorientasi pada Pendidikan dan Dakwah saja. Selain itu, Dayah juga harus bersifat mandiri secara finansial sehingga seharusnya sumber keuangannya tidak bergantung pada sumbangan jenis apapun.

Mengingat perannya yang begitu penting, Aceh memiliki regulasi khusus untuk kesejahteraan Dayah dengan mendirikan Dinas Pendidikan Dayah Aceh yang fokus pada pengembangan dan kompetensi dayah. Namun begitu, potensi lain dari Dayah masih belum dioptimalkan yakni peningkatan produktivitas dan ekonomi Dayah. Kesadaran kemandirian ekonomi Dayah di Aceh masih rendah, sebagian dari pengurus Dayah menganggap bahwa Dayah harus fokus melaksanakan tugasnya dalam Pendidikan dan dakwah. Padahal, dalam Undang-Undang Pesantren Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren disebutkan bahwa fungsi utama; Pesantren adalah sebagai Lembaga Pendidikan, Dakwah, dan Pemberdayaan Masyarakat. Fungsi pemberdayaan masyarakat di Dayah masih belum banyak digali, padahal fungsi ini dapat dilaksanakan melalui berbagai upaya termasuk diantaranya adalah memberdayakan masyarakat melalui kegiatan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pesantren itu sendiri.

Idealnya, Dayah memang harus fokus pada fungsi pokoknya sebagai Lembaga Dakwah dan Pendidikan. Jika kedua fungsi tersebut telah optimal, maka Dayah dapat menjalankan fungsi ketiga yakni sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, serta dalam melaksanakan tugas ketiga ini harus dipastikan tidak mengganggu kedua fungsi utama lainnya. Sebaliknya, ini akan menjadi sebuah tantangan besar bagi Dayah tersebut untuk memberdayakan masyarakat sementara mereka sendiri belum mampu berdaya dan mandiri sebagai sebuah lembaga.

Kendala lainnya dalam pengembangan kemandirian ekonomi Dayah adalah kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Dayah tersebut masih terbatas dan belum kompeten untuk mengelola sebuah usaha. Umumnya, pengurus Dayah adalah murni tenaga pendidik atau santri alumni dari Dayah itu sendiri sehingga tidak memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup dalam mengembangkan sebuah usaha.

Sebaran Dayah di seluruh Aceh menjadikannya tiap Dayah memiliki potensi ekonomi yang berbeda, sebagian dari mereka didukung oleh kekayaan alam dan lingkungan untuk menjalankan usaha pertanian hortikultura, perikanan, mengembangkan ternak, maupun mengolah hasil pertanian. Sementara sebagian lainnya memiliki posisi yang strategis untuk

mengembangkan perdagangan, logistik, maupun menjalankan usaha kerajinan tangan. Namun sayangnya, belum tersedia data yang memetakan potensi usaha setiap Dayah di Aceh. Bahkan data pokok yang berisi unit usaha yang dijalankan oleh setiap Dayah juga masih belum dapat ditemukan. Padahal, keberadaan data-data tersebut sangat penting agar setiap Dayah dapat melakukan transaksi dan mendukung usaha satu dan lainnya. Melalui keberadaan data tersebut mereka dapat menghubungkan unit usahanya, misal sebuah Dayah di Kabupaten Bireun yang memiliki potensi pengelolaan padi dan beras dapat menjalin kerja sama dengan Dayah di Kabupaten Bener Meriah yang memiliki potensi pertanian hortikultura. Selain itu, masing-masing Dayah juga dapat menjadi penopang unit usaha Dayah lainnya, contohnya jika antar Dayah di Aceh Tengah yang memiliki kesamaan potensi untuk mengelola pertanian kopi dengan Dayah lainnya yang memiliki unit usaha yang sama, mereka dapat mengeksport hasil pertanian tersebut dalam jumlah yang lebih besar. Penguatan inilah yang dapat menjadi potensi utama pengembangan kemandirian ekonomi di Dayah.

Keberadaan Dayah yang tersebar diseluruh daerah di Aceh juga dapat menjadi penguat ekonomi dan keuangan Islam yang dikembangkan di Aceh. Dayah dapat menjadi panutan bagi masyarakat untuk melaksanakan ekonomi yang beretika sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, keberadaan Dayah di Aceh juga harus menjadi pendorong pengembangan industri halal. Dayah dapat menjadi trace agent yang mengawasi kehalalan proses dan produk yang beredar di masyarakat.

Jika dijabarkan lagi, Dayah dapat menjadi pusat pemberdayaan masyarakat yang paling esensial karena memiliki reputasi dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Namun sayang, seluruh potensi ekonomi dan sosia yang dimiliki oleh Dayah di Aceh ini masih belum maksimal, salah satu motor ekonomi Aceh ini masih belum berjalan dengan sempurna.

--000--



## BAB II

# PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH

Kinerja keuangan daerah pada triwulan III 2022 secara umum mengalami akselerasi, utamanya didorong oleh kenaikan realisasi anggaran APBA. Di sisi lain realisasi belanja dan pendapatan APBN mengalami peningkatan baik secara nominal maupun persentase.

## 2.1. Gambaran umum

Realisasi belanja dan pendapatan pemerintah di wilayah Provinsi Aceh sampai dengan triwulan III 2022 tercatat lebih tinggi apabila dibandingkan dengan periode yang sama sebelumnya. Realisasi agregat belanja pemerintah di Provinsi Aceh yang terdiri dari belanja pusat, belanja pemerintah Provinsi dan belanja Kabupaten/Kota (APBN + APBD) mengalami peningkatan pada triwulan III 2022 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Secara nominal, total belanja mencapai Rp33,72 triliun atau setara dengan 56,31% dari pagu agregat belanja tahun 2022. Kenaikan utamanya disumbangkan oleh realisasi APBD dengan dengan nilai Rp23,88 triliun dan realisasi sebesar 55,39% (lebih tinggi dibanding triwulan III 2021 dengan selisih sebesar Rp2,3 triliun).


Pada sisi realisasi agregat pendapatan pemerintah (APBN + APBD) mengalami kenaikan baik dalam persentase serta nominal realisasi. Secara persentase, realisasi pendapatan pada triwulan III 2022 berada pada 64,57% dari pagu agregat pendapatan 2022, naik dari periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai realisasi 57,40% dari pagu pendapatan 2021. Secara nominal realisasi pendapatan, terdapat kenaikan hingga Rp3,87 triliun pada periode laporan dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dari Pemerintah Pusat merupakan jenis pendapatan dengan *share* terbesar dari total realisasi pendapatan APBD di lingkup Provinsi Aceh, dengan persentase sebesar 84,87 persen. Persentase penyaluran pendapatan transfer sampai dengan triwulan III 2022 tercatat sebesar 61,63 persen dari pagu tahun 2022.

## 2.2. Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah

Nilai pagu belanja pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) di Aceh pada tahun 2022 berada pada nilai Rp44,73 triliun dengan pertumbuhan realisasi sebesar -3,90% (yoy).

Secara umum, pagu APBD baik di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota pada pagu belanja menurun pada tahun ini. Namun, terjadi peningkatan pagu pada belanja pegawai.

**Tabel 2. 1.** Realisasi Belanja APBD (APBA+APBK) Triwulan III 2022

REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH TW-III 2022	
 Belanja Barang & Jasa	53,69%
Belanja Modal	43,25%
Belanja Tidak terduga	9,36%
Belanja Pegawai	66,56%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Realisasi Belanja Pemerintah Daerah melalui alokasi APBA dan APBK hingga triwulan III 2022 mencapai 53,39% dari total pagu belanja (Rp44,73 triliun) atau sebesar Rp23,88 triliun, realisasi tumbuh 10,67% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian Belanja Pemerintah Daerah ini lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja di triwulan III 2021 yang tercatat sebesar 46,32% pagu belanja 2021 dengan nominal realisasi belanja sebesar Rp 21,58 triliun. Hampir seluruh komponen belanja pemerintah rata-rata mengalami peningkatan realisasi pada tahun 2022 apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021.

Belanja modal tercatat memiliki realisasi sebesar 43,25% yang mengalami pertumbuhan sebesar 34,68% secara *year on year*. Belanja Modal merupakan jenis belanja yang memiliki *multiplier effect* paling besar terhadap perekonomian. Sehingga, pertumbuhan yang tinggi tersebut diharapkan dapat mendukung perekonomian Aceh.

Belanja pegawai tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 0,36% secara *year on year*. Secara nominal, realisasi belanja pegawai triwulan III 2022 sebesar Rp 8,85 triliun, naik Rp 3,2 miliar dari periode yang sama tahun 2021. Hal ini diakibatkan oleh pencairan gaji honorer dan pergeseran pembayaran gaji ke 13 bagi ASN yang terhambat di triwulan II telah diselesaikan di Triwulan III.

**Tabel 2. 2.** Realisasi Belanja Transfer Antar Daerah dan

## REALISASI BELANJA TRANSFER TW-III 2022



Belanja Bantuan Keuangan	49,97%
Belanja Bagi Hasil	5,87%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

**Realisasi belanja transfer mengalami peningkatan dibanding triwulan III 2021 dengan nominal Rp4,34 triliun atau 46,24% dari pagu.** Komponen belanja transfer terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Bagi Hasil. Pada triwulan laporan, Belanja Bantuan Keuangan berhasil direalisasikan Rp4,29 triliun atau sebesar 49,97% dari pagu Belanja Bantuan Keuangan 2022, naik dari triwulan III 2021 yang terealisasi 46,74% dari pagu Belanja Bantuan Keuangan 2021. Sementara itu, Belanja Bagi Hasil pada triwulan III 2022 terealisasi sebesar 5,87% dari pagu, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2021 dengan realisasi sebesar 12,59%.

**Grafik 2. 1.** Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Provinsi Aceh



Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

**Realisasi Pendapatan Daerah terhadap target pendapatan terakselerasi secara persentase maupun nominal pada triwulan III 2022 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.** Realisasi pendapatan APBA dan APBK/D pada triwulan III 2022 mencapai 62,53% dari pagu Pendapatan Daerah 2022, naik dibandingkan triwulan III 2021 yang terealisasi 57,30% dari pagu pendapatan 2021. Secara nominal, realisasi mencapai Rp25,87 triliun atau terdapat kenaikan sebesar Rp2,52 triliun (secara *year-on-year* naik 10,82%). Berdasarkan porsi

komponen Pendapatan Daerah, mayoritas berasal dari Pendapatan Transfer yang menyumbang 84,87% dari total realisasi pendapatan pada periode laporan atau sebesar Rp25,87 triliun. Sedangkan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi Rp3,81 triliun pada triwulan III 2022 hanya menyumbang 14,71% dari total realisasi pendapatan. Hal ini menandakan bahwa ketergantungan Pemerintah Daerah di Aceh terhadap Transfer Pemerintah Pusat masih tinggi. Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) pada Grafik 2.1. menunjukkan perbaikan pada kurun waktu 2016-2020 dengan semakin meningkatnya DDF, namun pada 2021 terdapat penurunan. Sementara demikian, hasil sementara pada triwulan III 2022 kembali menunjukkan kenaikan DDF yang disebabkan oleh adanya kenaikan realisasi pajak daerah. Besarnya DDF disebabkan oleh lebih tingginya realisasi pendapatan transfer yang mengindikasikan lebih tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah Aceh terhadap Pemerintah Pusat.

**Tabel 2. 3.** Realisasi Pendapatan APBD (APBA + APBK) se- Provinsi Aceh Triwulan III 2022

REALISASI PENDAPATAN APBD TW-III 2022		
Pendapatan Asli Daerah		68,50%
Pendapatan Transfer		61,63%
Lain-Lain		56,94%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah


**Pada triwulan III 2022, tercatat kenaikan realisasi terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-lain.** Realisasi Pendapatan Daerah naik setelah merealisasikan 57,30% dari pagu Pendapatan 2021, menjadi 62,53% dari pagu Pendapatan pada triwulan III 2022. Pendapatan Transfer mampu terealisasi 61,63% pada periode laporan. Pendapatan lain-lain mengalami peningkatan realisasi paling tinggi, naik sebesar 563,96% dibanding periode sebelumnya ditahun 2021 dengan realisasi nominal sebesar Rp108,36 miliar pada triwulan III 2022. Secara nominal, terdapat kenaikan realisasi pendapatan sebesar Rp2,52 triliun pada periode laporan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan realisasi yang terjadi juga diakibatkan oleh

kenaikan PAD. Pada triwulan laporan, pemerintah provinsi membukukan Rp3,81 triliun atau meningkat 22,12% dari realisasi PAD tahun sebelumnya yang mencapai Rp3,12 triliun.

### 2.3. Belanja Pemerintah Pusat

Pada triwulan III 2022, realisasi belanja APBN secara persentase maupun nominal mengalami peningkatan. Sisi pendapatan APBN juga meningkat secara persentase dan nominal pada triwulan laporan. Belanja APBN di Provinsi Aceh pada periode laporan secara persentase mencatatkan realisasi sebesar 70,13% dari pagu Belanja Negara 2022 (secara nominal total pagu Rp47,80 triliun) meningkat dibanding triwulan III 2021 yang terealisasi sebesar 64,84% dari pagu belanjanya (Rp48,30 triliun secara nominal). Realisasi pendapatan APBN hingga periode laporan tercatat secara persentase sebesar 79,20% dari pagu pendapatan APBN (secara nominal Rp5,78 triliun) atau lebih tinggi dari persentase realisasi pada triwulan III 2021 yang sebesar 58,18% dari pagu pendapatan APBN 2021 (secara nominal Rp5,6 triliun).


**Tabel 2. 4.** Realisasi Belanja APBN di Aceh Pada Triwulan III 2022

REALISASI BELANJA APBN TW-III 2022		
	Belanja Pusat	64,94%
	Transfer	72,53%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

**Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (70,64% dari total Belanja APBN di Provinsi Aceh) mengalami kenaikan secara persentase maupun secara nominal.** Secara persentase, pada periode laporan realisasi tercatat sebesar 72,53% dari pagu Transfer ke Daerah 2022 (secara nominal Rp32,65 triliun) atau meningkat sebesar 9,96% (yoy) dibandingkan pada periode yang sama di tahun lalu yang terealisasi 63,14% dari pagu Transfer ke Daerah 2021 (secara nominal Rp34,11 triliun). Peningkatan realisasi tertinggi terjadi pada dana otonomi khusus 97,47% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

**Tabel 2. 5.** Realisasi Pendapatan APBN di Provinsi Aceh Pada Triwulan III 2022

REALISASI PENDAPATAN APBN TW-III 2022		
	Pajak	75,23%
	PNBP	100,12%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

**Penerimaan Pajak (79,86% dari total Pendapatan Negara di Provinsi Aceh) mengalami peningkatan pada persentase dan nominal realisasi.** Secara persentase, Penerimaan Pajak pada triwulan III 2022 berada pada 75,23% dari pagu Penerimaan Pajak 2022 (secara nominal Rp3,66 triliun) lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang tercatat merealisasikan sebesar 50,31% dari pagu Penerimaan Pajak 2021 (secara nominal Rp2,48 triliun).

Peningkatan Penerimaan Pajak secara nominal disumbang baik oleh Pajak Dalam Negeri maupun Pajak Perdagangan Internasional. Pada komponen Pajak Dalam Negeri, PPh Non Migas menjadi kontributor terbesar (61,10%) dengan total realisasi Rp2,2 triliun. Diikuti PPN dengan total realisasi Rp1,2 triliun. Pada komponen Pajak Perdagangan Internasional, realisasi bea masuk pada triwulan III 2022 sebesar Rp5,25 miliar, sedangkan bea keluar sebesar Rp4,13 miliar. Realisasi Bea Masuk mengalami pertumbuhan sebesar 2.280,85% yang disebabkan oleh meningkatnya impor masuk yang terdiri dari komponen mesin/pesawat, petroleum bitumen, dan bahan kimia organik.

Tabel 2. 6. Data Realisasi APBA & APBK Provinsi Aceh Triwulan III 2022

APBA & APBK PROVINSI ACEH	Pagu Anggaran Tahunan (Rp Miliar)		Realisasi Triwulan III (Rp Miliar)		Presentase Realisasi Triwulan III (%)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
<b>PENDAPATAN</b>	40.753,83	41.380,05	23.349,92	25.874,86	57,30%	62,53%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.378,32	5.558,25	3.117,74	3.807,26	57,97%	68,50%
Transfer Pemerintah Pusat	34.620,28	35.631,51	20.215,86	21.960,24	58,39%	61,63%
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	755,23	190,29	16,32	108,36	2,16%	56,94%
<b>BELANJA</b>	46.584,47	44.732,36	21.578,89	23.881,46	46,32%	53,39%
Belanja Daerah	36.918,75	35.355,35	17.358,17	19.545,78	47,02%	55,28%
Transfer	9.665,72	9.377,01	4.220,72	4.335,68	43,67%	46,24%
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	-5.830,64	-3.352,31	1.771,03	1.994,39	-30,37%	-59,49%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh

Tabel 2. 7. Data Realisasi APBN di Provinsi Aceh Triwulan III 2022

BELANJA NEGARA (APBN) DI PROVINSI ACEH	Pagu Anggaran Tahunan (Rp Miliar)		Realisasi Triwulan III (Rp Miliar)		Presentase Realisasi Triwulan III (%)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
<b>PENDAPATAN</b>	5.601,65	5.784,24	3.258,78	4.580,95	58,18%	79,20%
Pajak	4.926,44	4.863,02	2.478,72	3.658,58	50,31%	75,23%
PNBP	675,21	921,22	780,06	922,37	115,53%	100,12%
<b>BELANJA</b>	48.308,25	47.805,49	31.323,27	33.523,99	64,84%	70,13%
Belanja Pusat	14.197,84	15.156,77	9.787,58	9.843,12	68,94%	64,94%
Transfer ke Daerah	34.110,41	32.648,72	21.535,69	23.680,87	63,14%	72,53%
<b>SURPLUS/DEFISIT APBN</b>	-42.706,60	-42.021,25	-28.064,49	-28.943,04	65,71%	68,88%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh



## BAB III

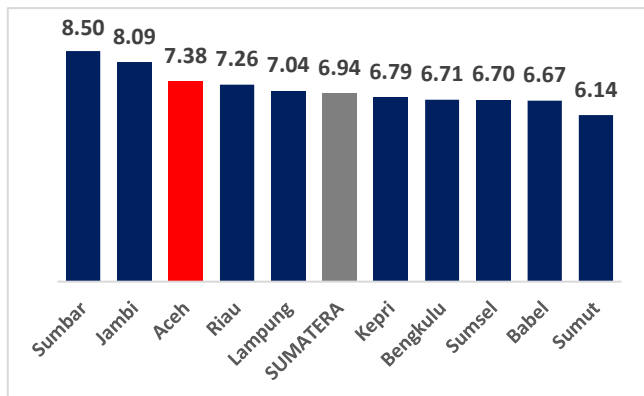
### PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Pada triwulan III 2022 inflasi Aceh mengalami peningkatan utamanya disebabkan oleh kelompok transportasi, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Lebih lanjut pada triwulan IV 2022, laju inflasi Aceh diperkirakan akan melambat dibandingkan dengan periode sebelumnya, seiring dengan deflasi pada beberapa komoditas pangan yang menunjukkan kebutuhan telah tercukupi. Kendati demikian, masih terdapat potensi inflasi seiring dengan buruknya cuaca pada akhir tahun yang berpotensi banjir.

### 3.1. Perkembangan Umum Inflasi

Inflasi Provinsi Aceh pada triwulan III 2022 tercatat sebesar 7,38% (yoy) atau lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,99% (yoy). Angka inflasi tersebut tercatat lebih tinggi dari inflasi Sumatera (6,94%, yoy) dan Nasional (5,95%, yoy). Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Sumatera, realisasi inflasi tersebut menempatkan Provinsi Aceh sebagai daerah inflasi tertinggi ketiga di Sumatera. Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi dengan inflasi tertinggi di Sumatera pada triwulan III 2022.

Grafik 3.1. Laju Inflasi Prov. di Sumatera Triwulan III 2022 (% yoy)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

### 3.2. Analisis Perkembangan Inflasi

Tabel 3.1. Inflasi Kelompok Barang

Kelompok Barang dan Jasa	Tw II 2022		Tw III 2022	
	Inflasi (% yoy)	Andil (% yoy)	Inflasi (% yoy)	Andil (% yoy)
Makanan, Minuman, dan Tembakau	9.18	2.95	7.93	2.45
Pakaian dan Alas Kaki	2.50	0.18	2.55	0.18
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	4.94	0.90	5.81	1.05
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	3.90	0.17	4.42	0.19
Kesehatan	2.15	0.04	2.71	0.05
Transportasi	8.92	1.08	21.00	2.80
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0.21	-0.01	-0.39	-0.01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	-0.08	0.00	0.77	0.00
Pendidikan	0.86	0.03	0.57	0.01
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	4.94	0.43	6.41	0.55
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	4.51	0.31	4.99	0.33
<b>Inflasi Umum</b>	<b>5.99</b>		<b>7.38</b>	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan III 2022, laju inflasi Aceh lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Meningkatnya inflasi Aceh tersebut utamanya disebabkan oleh kelompok transportasi dengan andil 2,80% dan tingkat inflasi 21,00%. Selanjutnya, diikuti oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 2,45% dan tingkat inflasi 7,93%.

### Kel. Makanan, Minuman, dan Tembakau

Tabel 3.2. Inflasi Kel, Makanan, Minuman, dan Tembakau

INFLASI 7,93% (yoy)		ANDIL 2,45%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Cabai Merah	1.35	Minyak Goreng	-0.10
Beras	0.37	Ikan Tuna	-0.08
Telur Ayam Ras	0.21	Cumi-Cumi	-0.03
Ikan Tongkol	0.19	Ikan Rambe	-0.02
Ikan Dencis	0.14	Anggur	-0.01

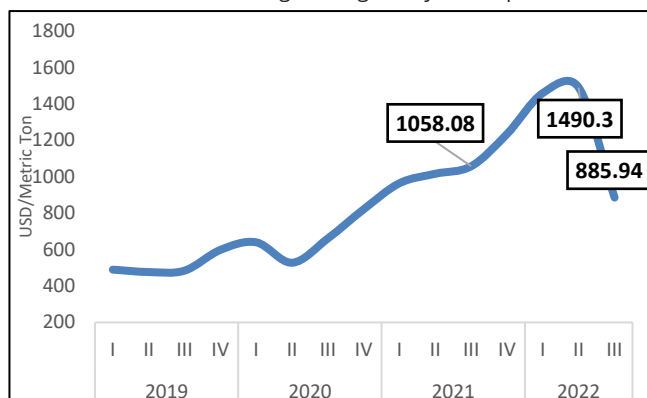
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Secara tahunan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada periode laporan tercatat mengalami inflasi 7,93% (yoy) dengan andil sebesar 2,45%. Inflasi yang terjadi didorong oleh subkelompok makanan yang memiliki andil inflasi sebesar 2,46% (yoy). Komoditas utama menyumbang inflasi antara lain cabai merah, beras, telur ayam ras, ikan tongkol dan ikan dencis. Harga cabai merah masih cukup tinggi pada triwulan III sehingga menjadi penyumbang inflasi terbesar dari kelompok ini. Beberapa kelompok ikan juga telah menunjukkan kenaikannya pada triwulan III. Meskipun demikian, keterbatasan stok komoditas hortikultura yang terjadi pada triwulan lalu telah berangsur membaik pada triwulan III. Bawang merah telah berbalik arah sehingga tidak lagi sebagai penyumbang inflasi.

Lebih lanjut, komoditas deflasi disumbang oleh minyak goreng, ikan tuna, cumi-cumi, ikan rambe dan anggur. Harga minyak goreng pada triwulan III lebih stabil bahkan cenderung lebih rendah

dibanding triwulan sebelumnya. Hal ini juga didukung oleh harga *Crude Palm Oil* (CPO) dunia atau minyak kelapa sawit yang menunjukkan penurunan. Pada grafik 3.2 ditampilkan rata-rata harga minyak kelapa sawit secara triwulanan. Pada triwulan III 2022, harga minyak kelapa sawit berada pada level USD 885,94/*metric ton*. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan dengan harga pada periode sebelumnya yang berada pada 1.490,30/*metric ton* dan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang berada pada USD 1.058,08/*metric ton*. Harga minyak goreng dalam negeri juga telah dapat ditekan karena telah diberlakukannya *Domestic Market Obligation* (DMO) dan *Domestic Price Obligation* (DPO) pada 31 Mei 2022.

**Grafik 3.2.** Perkembangan Harga Minyak Kelapa Sawit



Sumber: Bloomberg, diolah

Selanjutnya, inflasi juga ditahan oleh komoditas ikan tuna, cumi-cumi, ikan rambe dan anggur. Penurunan harga pada komoditas perikanan disebabkan oleh pasokan yang mencukupi dari nelayan sehingga menurunkan harga. Kondisi cuaca yang mendukung nelayan melaut juga membantu menurunkan harga komoditas perikanan. Meskipun demikian, tidak seluruh komoditas ikan menyumbang deflasi pada periode laporan.

## Kel. Pakaian dan Alas Kaki

**Tabel 3.3.** Inflasi Kel, Pakaian dan Alas Kaki

INFLASI 2,55% (yoy)		ANDIL 0,18%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Celana Panjang Jeans	0.03	Blus Wanita	-0.005

Celana Panjang Katun	0.01	Rok Anak	-0.001
Baju Kaos Tanpa Kerah	0.01	Sepatu Wanita	-0.001
Ongkos Jahit	0.01	Jaket Pria	-0.001
Sandal Anak	0.01	Baju Anak Setelan	-0.001

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan III 2022, inflasi kelompok pakaian dan alas kaki di Aceh tercatat sebesar 2,55% (yoy) dengan andil 0,18% sama dengan dibanding periode sebelumnya (0,18%, yoy). Tekanan inflasi yang terjadi tersebut utamanya didorong oleh sub kelompok pakaian dengan andil inflasi sebesar 0,14% (yoy). Barang-barang penyumbang inflasi pada sub kelompok ini antara lain, celana panjang jenas, celana panjang katun, baju kaos tanpa kerah, ongkos jahit, dan sandal anak. Peningkatan harga produk pakaian tersebut terjadi seiring dengan terjadinya kenaikan BBM yang turut menyesuaikan harga komoditas pakaian. Kenaikan harga juga didukung oleh dimulainya tahun ajaran baru. Selain itu, juga terjadi peningkatan permintaan yang disebabkan sudah maraknya pesta pernikahan dan perayaan keagamaan seiring dengan pelonggaran pembatasan sosial. Di sisi lain, terjadi deflasi untuk barang-barang antara lain, blus wanita, rok anak, sepatu wanita, jaket pria dan baju anak setelan.

## Kel. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar

Secara tahunan, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar mengalami inflasi sebesar 5,81% (yoy) dengan andil sebesar 1,06% untuk inflasi secara keseluruhan pada triwulan laporan lebih tinggi dibanding periode sebelumnya (0,90%, yoy). Inflasi pada kelompok ini secara tahunan terutama didorong oleh subkelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga dengan andil sebesar 0,56% (yoy). Secara lebih detail, barang/jasa pemberi andil inflasi terbesar pada kelompok ini adalah bahan bakar rumah tangga, sewa rumah, semen, cat tembok dan tarif listrik.

**Tabel 3.4.** Inflasi Kel. Perum., Air, Listrik, Gas, & Bahan Bakar

INFLASI 5,81% (yoy)		ANDIL 1,05%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Bahan Bakar Rumah Tangga	0.65	Kayu Lapis	-0.00049
Sewa Rumah	0.40	-	-
Semen	0.04	-	-
Cat Tembok	0.02	-	-
Tarif Listrik	0.02	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Bahan bakar rumah tangga menjadi penyumbang andil tertinggi dalam kelompok setelah pemerintah kembali menaikkan harga gas elpiji pada bulan Juli menjadi Rp 17.750/kg. Hal ini dilakukan seiring dengan meningkatnya harga gas alam dunia yang masih mengalami kenaikan hingga saat ini.

Peningkatan harga barang konstruksi lainnya seperti semen dan cat tembok seiring dengan masih berlanjutnya pembangunan rumah bersubsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi Aceh. Selain itu, peningkatan harga semen juga didorong oleh kenaikan harga batubara yang digunakan sebagai input pada produksi semen. Sehingga, biaya dalam memproduksi semen meningkat dan turut menaikkan harga jual.

Tarif listrik juga melakukan penyesuaian harga pada Juli untuk golongan rumah tangga dengan daya 3.500 VA keatas dan golongan pemerintah. Kenaikan dipatok 17,63% dan menjadikan tarif listrik menjadi Rp 1.699,53 per kWh.

## Kel. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

**Tabel 3.5.** Inflasi Kel. Perlengkapan & Peralatan RT

INFLASI 4,42% (yoy)		ANDIL 0,19%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Kulkas/Lemari Es	0.03	-	-
Pembasmi Nyamuk Spray	0.02	-	-
Pembersih Lantai	0.02	-	-

Sabun Deterjen Bubuk	0.02	-	-
Lemari Pakaian	0.01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan III 2022, inflasi kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga di Aceh tercatat sebesar 4,42% (yoy) dengan andil terhadap inflasi keseluruhan sebesar 0,19% lebih tinggi dibanding periode sebelumnya (0,17%, yoy). Inflasi pada kelompok ini secara tahunan terutama didorong oleh subkelompok barang dan layanan pemeliharaan rumah tangga rutin dengan andil inflasi sebesar 0,08% (yoy). Secara lebih detil, barang atau komoditas penyumbang inflasi terbesar pada kelompok ini adalah kulkas/lemari es (andil 0,03%), pembasmi nyamuk spray (andil 0,02%), pembersih lantai (andil 0,02%), sabun deterjen bubuk (andil 0,02%) dan lemari pakaian (andil 0,01%).

## Kel. Kesehatan

**Tabel 3.6.** Inflasi Kel. Kesehatan

INFLASI 2,71% (yoy)		ANDIL 0,05%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Obat Dengan Resep	0.03	-	-
Tarif Rumah Sakit	0.01	-	-
Tarif Dokter Spesialis	0.01	-	-
Vitamin	0.01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan III 2022, inflasi kelompok kesehatan tercatat sebesar 2,71% (yoy) dengan andil untuk inflasi keseluruhan sebesar 0,05%, meningkat dibanding periode sebelumnya (0,04%, yoy). Tekanan inflasi pada triwulan laporan disebabkan oleh subkelompok obat-obatan dan produk kesehatan dengan andil inflasi sebesar 0,02% (yoy). Secara lebih detil, komoditas penyumbang inflasi terbesar kelompok ini adalah obat dengan resep (andil 0,03%), tarif rumah sakit (andil 0,01%), tarif dokter spesialis (andil 0,01%) dan vitamin (andil 0,01%). Harga obat-obatan tertentu khususnya untuk terapi COVID-19 mengalami kenaikan akibat

lonjakan kasus di Indonesia termasuk di wilayah Provinsi Aceh. Meskipun harga telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07 / Menkes /4826 /2021 Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

## Kel. Transportasi

Tabel 3.7. Inflasi Kel. Transportasi

INFLASI 21,00% (yoy)		ANDIL 2,80%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Angkutan Udara	1.70	-	-
Bensin	1.33	-	-
Sepeda Motor	0.12	-	-
Angkutan Antar Kota	0.10	-	-
Mobil	0.01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Secara tahunan, kelompok transportasi pada triwulan III 2022 mengalami inflasi sebesar 21,00% (yoy) dengan andil 2,80% terhadap inflasi secara keseluruhan lebih tinggi dibanding periode sebelumnya (1,08%, yoy). Inflasi yang terjadi tersebut utamanya didorong oleh subkelompok jasa angkutan penumpang sebesar 1,60% (yoy). Subkelompok ini didukung oleh angkutan udara dan angkutan antar kota dengan andil inflasi masing-masing sebesar 1,70% (yoy) dan 0,10% (yoy). Meningkatnya harga jasa angkutan penumpang disebabkan oleh meningkatnya tarif angkutan udara yang mendorong inflasi. Inflasi subkelompok jasa angkutan penumpang juga didukung oleh kenaikan harga BBM yang efektif berlaku pada 3 September 2022.

Pada bulan triwulan III 2022 jumlah penumpang yang tercatat di bandar udara SIM mencapai 118.003 orang atau mengalami sedikit peningkatan sebesar 148,53% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun 2021 dengan 47.481 orang. Kenaikan tersebut turut menunjang kenaikan harga tiket pesawat udara pada periode tersebut. Meskipun demikian, jumlah rute yang ditawarkan sudah mulai bervariasi.

Pada periode laporan, inflasi juga didorong oleh

subkelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi dengan andil inflasi sebesar 1,41% (yoy). Komoditas penyumbang inflasi yaitu bensin dengan andil 1,33% (yoy) yang mengalami kenaikan harga pada awal September.

Lebih lanjut, alat transportasi pribadi juga mengalami inflasi pada sepeda motor dan mobil dengan andil masing-masing sebesar 0,12% (yoy) dan 0,01% (yoy). Harga kendaraan bermotor dapat dikatakan mengalami kenaikan secara rutin tiap tahunnya. Kenaikan dapat disebabkan karena adanya penambahan spek dan *features*, kenaikan Bea Balik Nama (BBN) setiap tahunnya, faktor kenaikan biaya produksi, dan penyesuaian kurs. Lebih lanjut, kenaikan harga kendaraan juga ditunjang oleh kelangkaan *chip* semikonduktor yang tengah berlangsung di seluruh dunia. Menurut data Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), penjualan kendaraan baru seperti sepeda motor dan mobil di Aceh masih tinggi. Pada tahun Triwulan III 2022, total penjualan kendaraan bermotor mencapai 23.390 unit.

## Kel. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan secara tahunan pada triwulan III 2022 tercatat mengalami deflasi sebesar 0,39 (yoy) dengan andil terhadap inflasi secara keseluruhan adalah sebesar -0,01%, lebih rendah dibanding periode sebelumnya (0,01%, yoy).

Tabel 3.8. Inflasi Kel. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

INFLASI -0,39% (yoy)		ANDIL -0,01%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
-	-	Biaya Administrasi Transfer Uang	-0.01
-	-	Televisi Berwarna	-0.002

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Tekanan deflasi yang terjadi tersebut disebabkan oleh komoditas biaya administrasi transfer uang dengan andil deflasi sebesar 0,01% dan televisi berwarna dengan andil deflasi sebesar 0,002%

Sedangkan, tidak ada komoditas penyumbang inflasi pada kelompok ini. Deflasi pada biaya administrasi transfer uang disebabkan oleh telah berjalannya layanan BI-FAST pada beberapa bank yang sudah dapat dinikmati masyarakat. BI-FAST menyediakan layanan transfer uang dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan *Online*, SKN maupun RTGS.

## Kel. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

Pada triwulan III 2022, inflasi kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya secara tahunan tercatat sebesar 0,77% (yoy) dengan andil terhadap inflasi secara keseluruhan sebesar 0,01% lebih tinggi dibanding dengan periode sebelumnya (-0,001%, yoy). Inflasi yang terjadi pada kelompok rekreasi, olahraga dan budaya memiliki andil inflasi yang relatif kecil. Barang yang mengalami kenaikan harga yaitu pulpen dengan andil inflasi sebesar 0,005% (yoy). Sedangkan, barang yang mengalami penurunan harga yaitu tas sekolah dengan andil deflasi sebesar 0,006% (yoy).

Tabel 3.9. Inflasi Kel. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

INFLASI 0,77% (yoy)		ANDIL 0,01%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Pulpen	0.005	Tas Sekolah	-0.006

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

## Kel. Pendidikan

Inflasi kelompok pendidikan secara tahunan pada triwulan III 2022 tercatat sebesar 0,57% (yoy) dengan andil terhadap inflasi secara keseluruhan adalah sebesar 0,01%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (0,03%). Inflasi utamanya terjadi pada subkelompok pendidikan lainnya dengan andil inflasi sebesar 0,02% (yoy). Kenaikan biaya terjadi pada bimbingan belajar dan sekolah dasar (SD) dengan andil masing-masing sebesar 0,01% (yoy).

Tabel 3.10. Inflasi Kel. Pendidikan

INFLASI 0,57% (yoy)		ANDIL 0,01%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Bimbingan Belajar	0.01	-	-

Kursus Bahasa Asing	0.01	-	-
Biaya Les/Privat	0.00	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Secara umum, kenaikan biaya pendidikan terjadi setiap tahunnya. Kenaikan rata-rata biaya pendidikan di Indonesia sebesar 10%-15% per tahun untuk keperluan operasional, pengembangan, dan lain-lain.

## Kel. Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran

Tabel 3.11. Inflasi Kel. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

INFLASI 6,41% (yoy)		ANDIL 0,55%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Ketupat/Lontong Sayur	0.09	-	-
Nasi Dengan Lauk	0.09	-	-
Mie	0.09	-	-
Bakso Siap Santap	0.07	-	-
Teh Siap Saji	0.05	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Secara tahunan, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran pada periode laporan tercatat mengalami inflasi sebesar 6,41% (yoy) dengan andil sebesar 0,55% terhadap inflasi secara keseluruhan lebih tinggi dibanding periode sebelumnya (0,43%, yoy). Inflasi terjadi pada subkelompok jasa pelayanan makanan dan minuman dengan andil sebesar 0,55% (yoy). Kenaikan terjadi pada ketupat/lontong sayur, nasi dengan lauk, mie, bakso siap santap, dan teh siap saji. Peningkatan harga pada produk makanan olahan tersebut sejalan dengan peningkatan inflasi kelompok bahan makanan, serta penyesuaian harga pasca kenaikan BBM.

## Kel. Perawatan Pribadi & Jasa

Tabel 3.12. Inflasi Kel. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

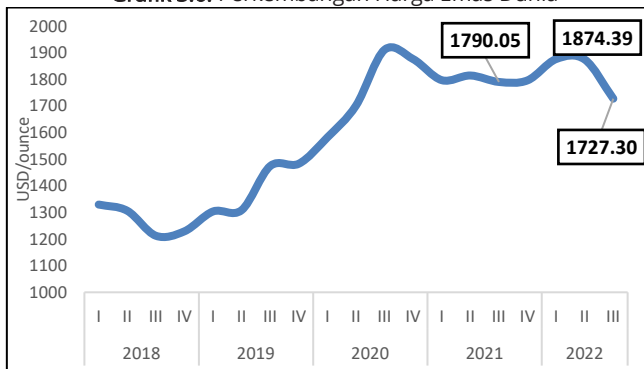
INFLASI 4,99% (yoy)		ANDIL 0,33%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Sabun Mandi	0.06	Parfum	-0.02

Sabun Mandi Cair	0.06	Tas Tangan Wanita	-0.00093
Shampo	0.05	Pelembab	-0.00058
Pasta Gigi	0.05	-	-
Emas Perhiasan	0.04	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan III 2022, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya secara tahunan mengalami inflasi sebesar 4,99% (yoy) dengan andil terhadap inflasi secara keseluruhan sebesar 0,33% lebih rendah dibanding periode sebelumnya (0,31%, yoy). Inflasi utamanya terjadi pada subkelompok perawatan pribadi dengan andil inflasi sebesar 0,26% (yoy). Komoditas yang menyebabkan inflasi pada subkelompok ini adalah sabun mandi (andil 0,06%), sabun mandi cair (andil 0,06%), shampo (andil 0,05%), dan pasta gigi (andil 0,05%). Lebih lanjut, subkelompok perawatan pribadi lainnya menunjukkan inflasi dengan andil sebesar 0,07% (yoy). Komoditas yang menyebabkan inflasi pada subkelompok ini adalah emas perhiasan yang memiliki andil sebesar 0,04% (yoy). Kenaikan harga emas perhiasan disebabkan oleh nilai tukar Rupiah yang melemah pada triwulan III. Namun, hal ini juga didukung oleh harga emas yang cenderung berada pada posisi stagnan pada tahun 2022.

Grafik 3.6. Perkembangan Harga Emas Dunia



Sumber: Bloomberg, diolah

Harga emas dunia menunjukkan penurunan dibanding triwulan II 2022, seiring dengan kenaikan suku bunga The Fed. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021, harga emas dunia saat ini telah berada di posisi yang lebih rendah. Namun, belum mencapai level yang rendah seperti sebelum terjadinya

pandemi COVID-19. Data *Bloomberg* memperlihatkan rata-rata harga emas dunia (Grafik 3.6) pada triwulan III berada pada level USD1.727,30/ounce. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan dengan harga pada periode sebelumnya (USD1.874,39/ounce) dan lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2021 pada USD1.790,05/ounce.

### 3.3. Tracking Inflasi Triwulan IV 2022

Secara *month-to-month* pada bulan Oktober 2022 Provinsi Aceh mengalami deflasi 0,25% (mtm) sedangkan secara tahunan mengalami inflasi 6,65% (yoy). Angka inflasi Aceh pada bulan laporan (-0,25%, mtm) tercatat terdeselerasi setelah pada bulan sebelumnya tercatat lebih tinggi (0,77%, mtm). Secara tahunan, inflasi pada Oktober 2022 tercatat sebesar 6,65%, lebih tinggi dibandingkan pada Oktober 2021 yang berada pada angka 1,90% (yoy). Secara *year-to-date*, hingga Oktober 2022 inflasi berada pada laju 5,05%. Secara bulanan, faktor pendorong utama deflasi di Aceh pada periode laporan berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dan kelompok transportasi, terutama pada komoditas Cabai Merah (andil -0,52%), Angkutan Udara (andil -0,08%), Telur Ayam Ras (andil -0,05%), Cabai Hijau (andil -0,03%) dan Cabai Rawit (andil -0,02%).

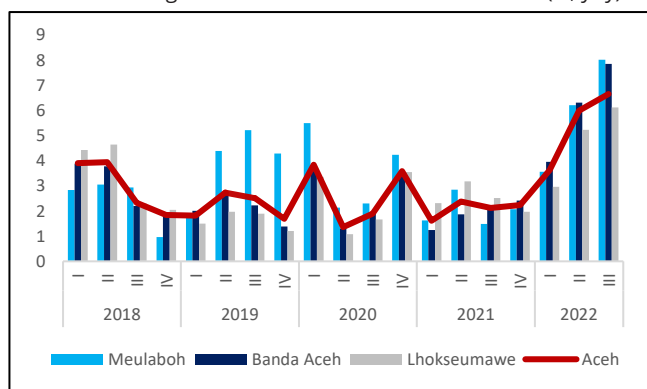
Pada bulan November 2022, secara bulanan Aceh diperkirakan akan mengalami inflasi secara mtm. Diperkirakan akan terjadi inflasi ringan berdasarkan hasil pantauan Survei Pemantauan Harga (SPH) yang menunjukkan penurunan harga untuk beberapa komoditas. Kondisi cuaca pada awal bulan November 2022 memiliki potensi cuaca yang buruk berdasarkan data BMKG, dengan risiko banjir menengah yang meluas pada provinsi Aceh. Kendati demikian, apabila kembali terjadi peningkatan tingkat infeksi covid-19 dapat menyebabkan risiko dimulainya kembali pembatasan sosial yang akan berimbas pada inflasi.

### 3.4. Inflasi Spasial

Apabila dilihat secara spasial, pada Oktober 2022 inflasi terjadi di seluruh kota pantauan di Provinsi Aceh. Secara tahunan, Kota Meulaboh menjadi kota yang mengalami inflasi paling tinggi, yakni 7,56% (yoy), diikuti kota Banda Aceh (6,92%, yoy) dan kota Lhokseumawe (5,66%, yoy). Sejalan dengan hal tersebut, secara bulanan terjadi deflasi pada 1 kota pantauan, dan inflasi pada 2 kota pantauan di Provinsi Aceh. Secara bulanan, deflasi terjadi di kota Banda Aceh dengan laju -0,49% (mtm). Sedangkan, Kota Lhokseumawe dan Meulaboh mengalami inflasi dengan laju inflasi masing-masing 0,04% (mtm) dan 0,19% (mtm).

Komoditas utama penyumbang inflasi bulanan pada bulan Oktober di Meulaboh adalah tempe (0,18%), ikan dencis (0,16%), tukang bukan mandor (0,15%), ikan tuna (0,07%) dan beras (0,06%). Sementara itu, komoditas yang menahan laju inflasi adalah cabai merah (-0,78%), ikan tongkol (-0,15%), telur ayam ras (-0,07%), cabai rawit (-0,05%) dan kangkong (-0,05%).

Grafik 3.7. Pergerakan Inflasi Kota Pantauan di Aceh (% yoy)



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Selanjutnya, penyumbang inflasi bulanan di Kota Banda Aceh adalah ikan kembung (0,07%), bawang merah (0,05%), beras (0,05%), bensin (0,03%), dan rokok kretek filter (0,03%). Sementara komoditas penyumbang deflasi di Banda Aceh pada Oktober 2022 adalah cabai merah (-0,63%), angkutan udara (-0,15%), telur ayam ras (-0,04%), semangka (-0,03%), dan cabai hijau (-0,03%). Selanjutnya, penyumbang inflasi bulanan di Kota Lhokseumawe adalah ikan tongkol (0,41%), ikan tuna (0,12%),

bawang merah (0,06%), pisang (0,05%) dan air kemasan (0,04%). Sementara komoditas penyumbang deflasi di Lhokseumawe pada Oktober 2022 adalah cabai merah (-0,56%), telur ayam ras (-0,06%), cabai hijau (-0,05%), daging ayam ras (-0,04%), dan beras (-0,03%).

Inflasi Aceh pada triwulan IV 2022 diperkirakan akan meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal tersebut diperkirakan dipengaruhi oleh harga komoditas administered price yang meningkat sejalan dengan naiknya harga komoditas dunia. Selain itu, terdapat potensi kembali dilakukan pembatasan sosial apabila terjadi peningkatan tingkat infeksi COVID-19.

### 3.5. Aktivitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Aceh akan terus berupaya melakukan pengendalian harga, baik melalui forum koordinasi dan langkah tindak lanjut dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dalam *High level Meeting* (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) triwulan I 2022, telah disepakati beberapa program kerja yang akan menjadi fokus pengendalian inflasi sepanjang tahun 2022-2024.

Dalam rangka menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga, tercatat berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh TPID Provinsi Aceh triwulan I, meliputi:

- Penyelenggaraan *capacity building* TPID se-Aceh dalam hal pelaporan kegiatan TPID yang telah dilaksanakan pada 21 Februari 2022 dan dihadiri oleh Biro Ekonomi seluruh Pemerintah Kab/Kota se-Aceh
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi dalam rangka implementasi HET dan pasokan minyak goreng di Aceh. Rapat tersebut diikuti oleh Menteri Perdagangan, Pemerintah Aceh dan Kab/kota serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Rapat tersebut diselenggarakan pada 26 Februari 2022.
- Penyelenggaraan *High Level Meeting* TPID Provinsi Aceh pada 8 Maret 2022. Rapat

Koordinasi *High Level Meeting* (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Aceh ini dilakukan dalam rangka evaluasi laju inflasi Aceh terkini terutama menjelang Ramadhan sekaligus mengevaluasi berbagai program kerja pengendalian inflasi. Pelaksanaan HLM TPID Provinsi Aceh juga disinergikan dengan Satgas Pangan.

- d. Penyelenggaraan *High Level Meeting* TPID tingkat Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. HLM TPID Kota Banda Aceh dilaksanakan pada 22 Maret 2022. Pelaksanaan HLM tersebut merupakan penguatan koordinasi utamanya dalam menyambut bulan Ramadhan serta HBKN Idul Fitri.

**Dalam rangka menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga, tercatat berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh TPID Provinsi Aceh triwulan II, meliputi:**

- a. Penyelenggaraan kegiatan Gelar Pangan Murah pada tanggal 30 Juni 2022 melalui Pasar Mitra Tani (PMT) Aceh Dinas Pangan Aceh yang berlokasi di gampong Baet kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar. PMT memasarkan komoditas pangan hasil produksi pertanian khususnya beras, cabai merah keriting dan bawang merah yang diproduksi langsung dari pertanian serta komoditas pangan lainnya seperti minyak kemasan, gula pasir, telur lokal serta produk pangan lokal olahan dan UMKM lokal.
- b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Wilayah TPID se-Sumatera pada 23 Juni 2022. Rapat ini dilakukan dalam rangka meningkatnya inflasi sumatera akibat meningkatnya permintaan domestik atas bahan-bahan pokok, serta kebijakan restriksi ekspor beberapa komoditas pangan yang dilakukan oleh sejumlah negara. Rapat tersebut diusung dengan tema Sinergi Penguatan Kerja Sama Antardaerah (KAD) untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi di Daerah.
- c. Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok pada saat menyambut Hari Raya Idul Adha 1443 H,

Pemerintah Aceh melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh bekerjasama dengan BULOG Kanwil Aceh dan Dinas yang membidangi perdagangan melaksanakan kegiatan pasar murah di 22 Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh. Beberapa komoditi bahan pokok bersubsidi yang dijual kepada masyarakat berupa beras, gula, minyak goreng tepung terigu dan telur ayam. Kegiatan pasar murah tersebut merupakan kegiatan yang kedua kalinya. Kegiatan tersebut dibuka secara simbolis oleh Bupati kabupaten Aceh Tamiang H. Mursil, SH, M.Kn. bertempat di gampong Sungai Liput kecamatan Kejuruan Muda. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 20 sampai dengan 23 Juni 2022.

- d. Rapat Pembahasan Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Aceh Triwulan I Tahun 2022 pada tanggal 21 Juni 2022 bertempat di Auditorium Teuku Umar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh.
- e. Pelaksanaan Rapat koordinasi oleh Satgas Pangan Polda Aceh terkait penanggulangan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan pemantauan lokasi isolasi sapi yang terinfeksi wabah PMK pada tanggal 12 Mei 2022 bertempat di gampong Payameta kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Pertanian RI, Wakapolda Aceh, Bupati Aceh Besar, Bupati Aceh Tamiang, Walikota Langsa, Bupati Aceh Tamiang, Bupati Aceh Timur, Bupati Aceh Utara dan unsur terkait.
- f. Rapat Penggunaan Aplikasi Satgas Pangan POLRI di wilayah Hukum Polda Aceh pada tanggal 26 April 2022 bertempat di ruang Dirreskrimsus POLDA Aceh dan ruang aula Ditreskrimsus Polda Aceh. Aplikasi tersebut digunakan untuk penginputan data pasar dan titik koordinat pasar serta data harga pangan. Sehingga harga di pasaran tetap stabil dan tidak terjadi penimbunan dan spekulasi harga.

**Dalam rangka menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga, tercatat berbagai kegiatan**

telah dilaksanakan oleh TPID Provinsi Aceh triwulan III, meliputi:

- a. Penyelenggaraan *High Level Meeting* TPID Kota Banda Aceh pada 23 Agustus 2022 dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden mengenai perlunya usaha yang tidak biasa dalam pengendalian inflasi. Rapat dilakukan untuk menguatkan koordinasi dalam pengendalian inflasi yang diperlukan pada kedua sisi, *supply* dan *demand*.
- b. Penyelenggaraan *High Level Meeting* TPID Kabupaten Aceh Barat pada 24 Agustus 2022 dalam rangka pengendalian inflasi khususnya pada komoditas perikanan. Koordinasi yang komprehensif perlu untuk dilakukan untuk melakukan optimalisasi pada hasil perikanan dan kelautan melalui SKPA terkait.
- c. *Launching* Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dipimpin oleh Pj. Gubernur Aceh pada 6 September 2022. Telah disalurkan bantuan 60 ribu bibit kepada petani maupun dayah di sekitar Provinsi Aceh dalam upaya normalisasi stok komoditas pangan, Gerakan tanam 17 ribu bibit cabai dengan Kodam Iskandar Muda dalam upaya penerapan *urban farming*, bantuan pembuatan pupuk organik dan alsintan, penandatanganan KAD cabai merah antara pedagang pasar Lambaro dan kelompok Juli Tani, serta *Ground Breaking Cold Storage* di Kabupaten Pidie.
- d. Rapat Pembahasan Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Aceh Triwulan II Tahun 2022 pada tanggal 10 Agustus 2022 bertempat di Auditorium Teuku Umar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh.
- e. Rapat koordinasi nasional TPID pada 18 Agustus untuk mengantisipasi lonjakan harga yang signifikan pada beberapa komoditas pangan.
- f. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Kota Banda Aceh pada 4 Oktober 2022.

Lebih lanjut, untuk menekan laju inflasi dalam jangka menengah, maka telah disusun *Roadmap*

(peta jalan) Pengendalian Inflasi Daerah Aceh tahun 2022-2024 dengan strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif dengan rincian program sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Harga
  - Pemantauan dan pencatatan harga bahan pangan pokok (sembako dan komoditas ikan)
  - Optimalisasi program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) untuk komoditas Beras
  - Pelaksanaan pasar murah (Menjelang HBKN)
  - Pelaksanaan Sidak Pasar
  - Menetapkan harga eceran tertinggi pada komoditas bahan pangan melalui penyusunan Qanun (Perda)
2. Ketersediaan Pasokan
  - Peningkatan produksi hortikultura penyumbang inflasi (bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit)
  - Peningkatan produksi peternakan penyumbang inflasi (daging sapi, daging ayam, dan telur ayam)
  - Peningkatan produksi/tangkapan/budidaya komoditas perikanan penyumbang inflasi
  - Pembangunan dan optimalisasi sarana produksi dan infrastruktur pertanian:
    - Pembangunan jaringan irigasi
    - Rehabilitasi jaringan irigasi
    - Kanal pengendalian banjir (Aceh Tamiang)
  - Learning Center untuk peningkatan produksi komoditas hortikultura, peternakan, dan perikanan (UPTD)
  - Korporatisasi kluster petani pangan
  - Pengaturan jadwal tanam komoditas pangan
  - Koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk kuota impor komoditas bawang putih dan gula
3. Kelancaran Distribusi
  - Inisiasi KAD di setiap kab/kota baik intraprovinci maupun antar provinsi
  - Peningkatan transaksi KAD

- Fasilitas Distribusi Pangan oleh Pasar Mitra Tani (PMT)/ Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dan Toko Mitra Tani (TMT)/Toko Tani Indonesia (TTI)
  - Simulasi pengendalian inflasi di daerah
  - Pelaksanaan pasar lelang (komoditas lokal dan ekspor)
  - Peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistic bahan pangan, antara lain: pemanfaatan tol laut
  - Penguatan implementasi digitalisasi UMKM pangan sisi hilir melalui: fasilitasi UMKM pangan binaan dengan *e-commerce*
  - Optimalisasi pemanfaatan *Cold Storage* untuk komoditas perikanan
4. Komunikasi Efektif
- Penyediaan sistem informasi panel harga dan monitoring stok pangan strategis yang terintegrasi di tingkat provinsi dan kab/kota
  - Peningkatan kualitas dan kuantitas laporan TPID baik Provinsi dan Kab/Kota
  - Penyusunan peta jalan pengendalian inflasi Kab/Kota
  - Pelaksanaan *High Level Meeting* TPID
  - Pelaksanaan *Capacity Building* TPID
  - Rilis pers/media terkait perkembangan harga dan ketersediaan pasokan.



## BAB IV

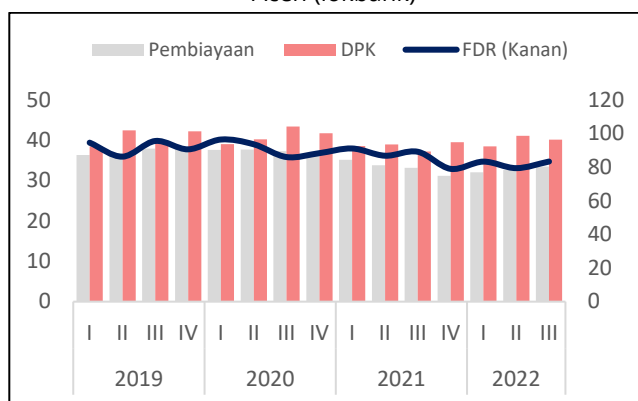
# PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN & UMKM

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan III 2022 tetap terjaga. Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Provinsi Aceh yang tercermin dari indikator Dana Pihak Ketiga (DPK) Pembiayaan, dan *Non Performing Financing* (NPF). DPK pada triwulan laporan tercatat Rp40,14 T dan NPF sebesar 3,92%. *Financing to Deposit Ratio* pun juga meningkat seiring pembiayaan yang meningkat, terutama untuk jenis penggunaan investasi sektor prioritas.

## 4.1. Kinerja Perbankan

Aktivitas Perbankan di Provinsi Aceh pada triwulan III 2022 masih terpantau berkontraksi namun sudah menunjukkan tren yang membaik dan dalam kondisi yang terjaga. Meskipun pandemi COVID-19 telah menunjukkan tren membaik namun kondisi geopolitik dunia yang masih belum stabil memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian dunia dan Indonesia. Hal ini juga berdampak pada kinerja sektor perbankan. Adapun indikator-indikator sektor perbankan dapat tercermin dari beberapa indikator misalnya realisasi penyaluran pembiayaan/kredit dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK).

**Grafik 4. 1.** Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (lokbank)



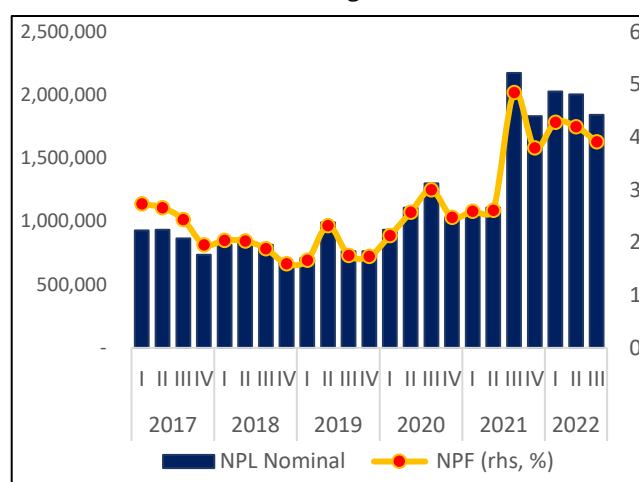
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Pada triwulan laporan, pembiayaan di Provinsi Aceh tercatat mengalami peningkatan diiringi dengan indikator *Finance to Deposit Ratio* (FDR) yang meningkat. Namun, Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami penurunan. Grafik 4.1 menjelaskan mengenai Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) di Aceh yang tercermin dari indikator Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan, dan *Non Performing Financing* (NPF), *Finance to Deposit Ratio* (FDR). Berdasarkan lokasi bank, simpanan masyarakat yang tercermin dari DPK per September 2022 sebesar Rp40,14 T. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan nilai DPK Rp41,11 T terjadi penurunan sebesar Rp8,7 miliar atau sebesar 2,35% (qtq). Jika dibandingkan secara

triwulanan DPK pada triwulan III memang mengalami penurunan, meskipun demikian secara tahunan DPK pada triwulan ini masih meningkat sebesar 7,92% (yoy).

Sementara itu, pembiayaan perbankan di Provinsi Aceh pada triwulan III 2022 berdasarkan lokasi bank tercatat sebesar Rp33,45 T, meningkat 2,45% (qtq) dan 0,87% (yoy), atau lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)<sup>1</sup> perbankan di Provinsi Aceh berada pada level 83,33% atau meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 80,17%. Adanya kenaikan jumlah pembiayaan menunjukkan adanya progress dan tren yang membaik pada sektor perbankan. Tren peningkatan rasio FDR lebih disebabkan karena mulai normalnya kegiatan perbankan paska implementasi Qanun LKS. Secara keseluruhan indikator kondisi sektor perbankan masih terjaga. Aset perbankan pada triwulan III 2022 tercatat sebesar Rp52,5 T atau meningkat 0,04% (yoy) namun jika dibandingkan dengan triwulan pada periode sebelumnya terjadi penurunan sebesar 0,61% (qtq).

**Grafik 4. 2.** Perkembangan NPF (Lokbank)



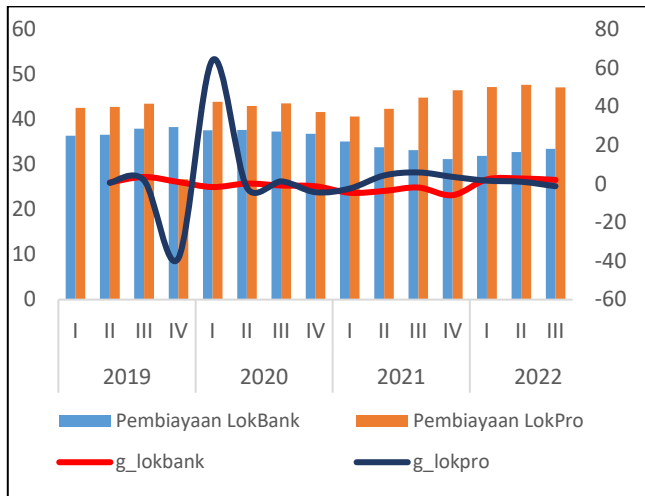
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Pada triwulan sebelumnya, tercatat NPF sebesar 4,20%. Sampai dengan triwulan periode laporan, NPF tercatat sebesar 3,92%. Terjadi perbaikan kinerja pembiayaan dengan menurun tingkat NPF pada triwulan laporan. Secara umum kualitas pembiayaan yang tercermin dari indikator NPF

<sup>1</sup>FDR merupakan rasio intermediasi, yaitu rasio antara total pembiayaan (lokasi bank) dibagi dengan total DPK.

masih berada pada level yang terjaga pada bulan September 2022.

**Grafik 4. 3.** Perkembangan pembiayaan berdasarkan Lokasi Bank dan Lokasi Proyek



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

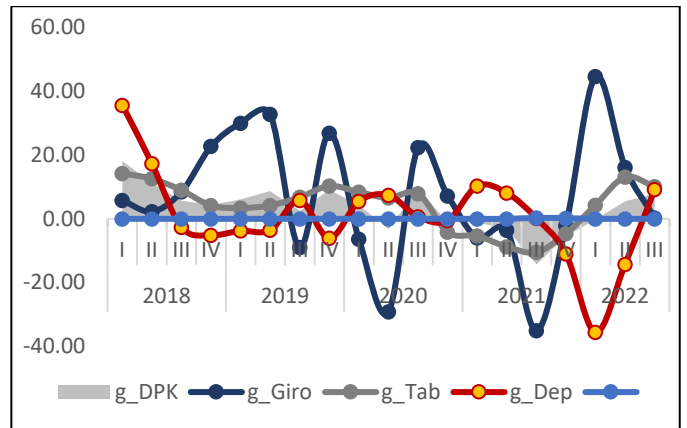
Berdasarkan data, pembiayaan yang disalurkan di Aceh tidak hanya dilakukan oleh perbankan di Aceh. Hal tersebut terkonfirmasi dari nominal penyaluran pembiayaan lokasi proyek yang lebih besar dari nominal penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi bank. Penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek pada triwulan laporan di Aceh mencapai Rp47,10 T. Penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek pada periode ini mengalami penurunan dari periode laporan sebelumnya sebesar 1,25% (qtq). Sementara penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi bank tercatat sebesar Rp33,45 T. Penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi bank ada kenaikan dari periode triwulan sebelumnya dari Rp32,65 T menjadi Rp33,45 T.

## 4.2. Intermediasi Perbankan

### 4.2. Kenaikan DPK Jenis Deposito Menjadi Faktor Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Penghimpunan DPK mengalami peningkatan dari periode triwulan sebelumnya dengan laju 7,91% (yoy). Terlihat adanya perbaikan dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya 5,52% (yoy), sebagaimana tergambar pada grafik 4.2.

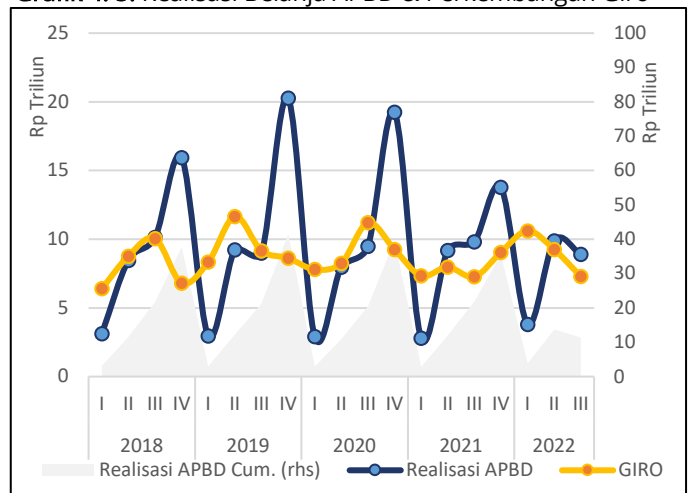
**Grafik 4. 4.** Perkembangan DPK (% , yoy)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Secara nominal, DPK pada triwulan III 2022 tercatat sebesar Rp40,14 T, meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp37,15 T. Kenaikan terbesar dikontribusikan oleh tabungan, selanjutnya deposito, dan terakhir adalah giro. Tabungan memiliki pangsa pasar terhadap keseluruhan total DPK sebesar 53,55%. Pada triwulan laporan mengalami pertumbuhan sebesar 10,09%. Selanjutnya, untuk deposito memiliki pangsa sebesar 28,29%. Pada triwulan laporan mengalami pertumbuhan 9,15% (yoy). Selanjutnya, untuk giro memiliki pangsa sebesar 18,16% (yoy) dari total DPK. Pada periode laporan terjadi pertumbuhan sebesar 0,29% (yoy).

**Grafik 4. 5.** Realisasi Belanja APBD & Perkembangan Giro



Sumber: Laporan Bank Umum & DJPbn Prov Aceh, diolah

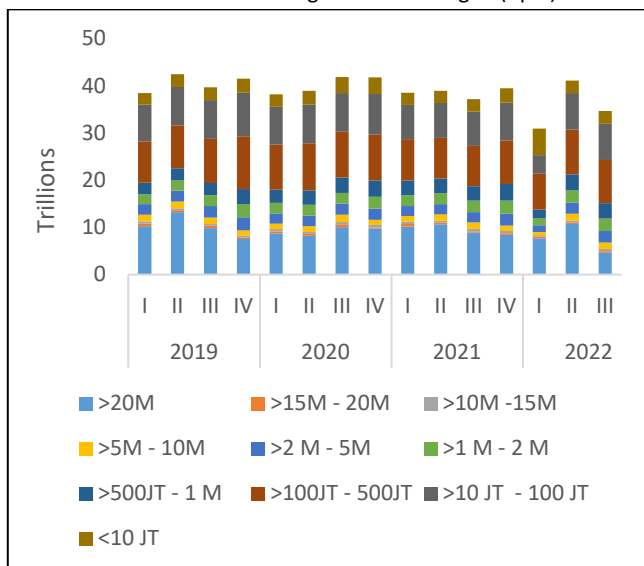
**Giro tercatat mengalami akselerasi sebesar 7,91% (yoy).** Dilihat dari proporsinya giro pemerintah memiliki andil paling besar dari total giro. Giro pemerintah memiliki porsi sebesar 60%, giro perseorangan 28%, giro korporasi sebesar 11%,

dan giro yang bersumber dari lain-lain adalah 1%.

Dilihat dari nilainya, jumlah giro pada triwulan laporan lebih kecil dari triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, jumlah giro adalah sebesar Rp7,28 T dan pada triwulan sebelumnya adalah sebesar Rp9,25 T atau turun sebesar 27 % (qtq). Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan realisasi APBD yang bersumber dari dana transfer (TKDD) sebesar Rp4,34 T pada triwulan laporan. Peningkatan realisasi APBD ini disebabkan pemulihan ekonomi yang semakin baik di triwulan III 2022. Selain itu penggunaan BTT juga mendorong penurunan giro pemerintah.

Selanjutnya giro korporasi juga mengalami pertumbuhan pada triwulan laporan. Giro korporasi tercatat melanjutkan tren peningkatan pada laju 26,83% (yoy) setelah triwulan sebelumnya mampu tumbuh 2,70% (yoy). Penurunan hanya terjadi di giro milik perseorangan dengan nilai Rp91,39 miliar pada triwulan laporan atau terkontraksi sebesar 67,26% (yoy).

**Grafik 4. 6. Perkembangan Nilai Tabungan (Rp T)**



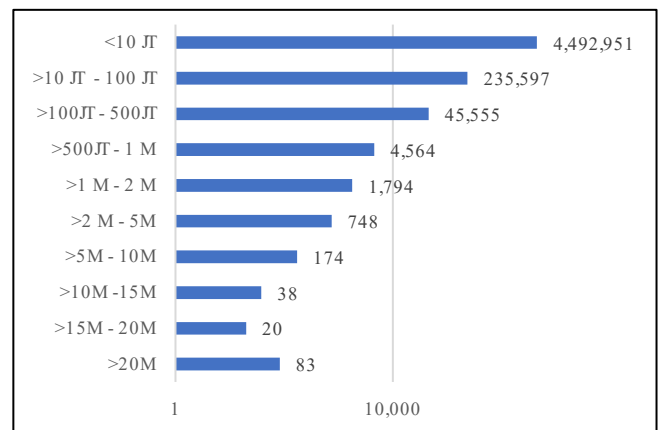
Sumber: Laporan Bank Umum diolah

Pada triwulan laporan, DPK jenis tabungan tumbuh sebesar 10,09% (yoy) pada triwulan III 2022 mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh 13,09% (yoy). Secara nominal, tabungan pada triwulan II 2022 tercatat sebesar Rp21,86 T sedangkan pada triwulan III ini tabungan tercatat Rp21,49 T. Artinya

ada penurunan Rp372 miliar atau Rp0,37 T. Penurunan tabungan paling signifikan didorong oleh kelompok nilai tabungan diatas Rp20 miliar. Selain itu, penurunan tabungan di oleh kelompok di atas 10 juta dan kelompok antara Rp100 juta sampai dengan Rp500 juta. Pada triwulan laporan survei konsumen menunjukkan masih berada di zona optimis. Meskipun masih berada di zona optimis tetap ada penurunan nilai indeks keyakinan konsumen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Indeks keyakinan konsumen tertahan dan menurun dari 110,871 di triwulan sebelumnya ke 105,72 di triwulan laporan. Penurunan DPK jenis tabungan ini tidak banyak mengubah keyakinan masyarakat untuk melakukan konsumsi.

**Pada DPK jenis tabungan dan deposito mengalami peningkatan dari triwulan yang sama tahun sebelumnya.** Tabungan pemerintah pada triwulan III 2022 memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung kenaikan DPK. Tabungan pemerintah meningkat sebesar 92,37% (yoy). Sementara itu, DPK jenis deposito mengalami kenaikan sebesar 12,01% (qtq) dan 8,52% (yoy).

**Grafik 4. 7. Jumlah Rekening per Saldo**

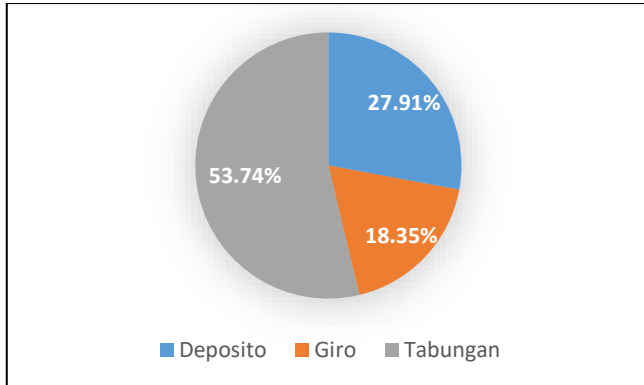


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Hingga triwulan III 2022, terdapat 4,78 juta pemegang rekening di Aceh. Jumlah pemegang rekening pada triwulan ini mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan jumlah 5,65 juta pemegang rekening. Artinya terdapat penurunan jumlah pemegang saham sebesar 0,87 juta atau turun sebesar 15,29% (qtq). Dari keseluruhan jumlah rekening,

pemegang rekening dengan saldo dibawah Rp10 juta mendominasi dengan porsi 93,96% dari total nasabah. Jumlah pemegang rekening dengan nominal tabungan di bawah 10 juta adalah sebesar 4,49 juta orang pemegang rekening.

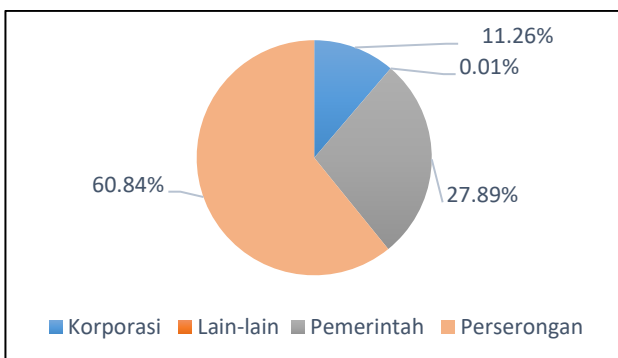
**Grafik 4. 8.** Proporsi DPK Berdasarkan Jenis (%)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Lima besar Kabupaten/Kota dengan jumlah DPK terbesar adalah Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, Kab.Pidie, dan Kab. Bireun. Berdasarkan proporsinya, DPK di Provinsi Aceh mayoritas berupa tabungan dengan proporsi pada triwulan laporan 53,74%. Sedangkan jenis deposito dan giro masing-masing memiliki porsi berturut-turut sebesar 27,91% dan 18,35%. DPK berdasarkan jenis tabungan seluruhnya berada pada perbankan syariah. Hal ini setelah diterapkannya LKS Qanun secara keseluruhan. Selaras dengan tabungan, DPK jenis deposito dan giro secara keseluruhan berada pada perbankan syariah. Berdasarkan kepemilikan, mayoritas dana pihak ketiga berasal dari perseorangan dengan kontribusi sebesar 60,84%. DPK yang berasal dari pemerintah dan korporasi berturut-turut memiliki proporsi sebesar 27,89% dan 11,26%.

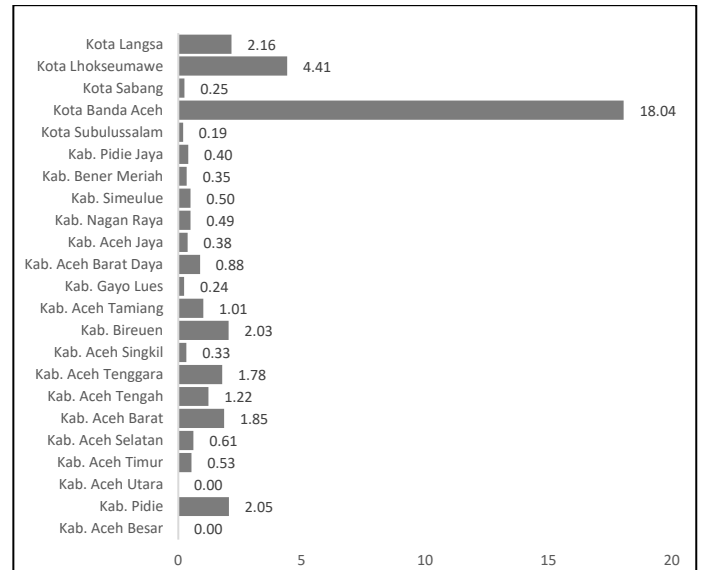
**Grafik 4. 2.** Proporsi DPK Berdasarkan Kepemilikan (%)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Secara spasial, penghimpunan Dana Pihak Ketiga di Provinsi Aceh belum tersebar secara merata dan masih terkonsentrasi di wilayah ibu kota provinsi. Kota Banda Aceh menyerap 45,44% dari total DPK di Aceh atau setara dengan Rp18,04 T. Setelah ibu kota provinsi, wilayah Kabupaten/Kota yang mendominasi penghimpunan DPK diantaranya adalah Lhokseumawe (Rp4,41 T), Langsa (Rp2,16 T) dan Pidie (Rp2,05 T), Bireun (Rp2,03 T)

**Grafik 4. 3.** Penghimpunan DPK Spasial (Rp T)

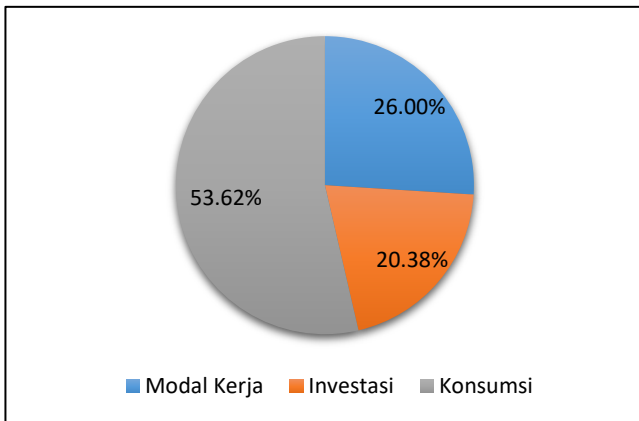


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

#### 4.2.2. Perbaikan Penyaluran Pembiayaan Didorong Pertumbuhan Pembiayaan Investasi dan Konsumsi

Secara umum, laju penyaluran pembiayaan di Provinsi Aceh berdasarkan lokasi proyek mengalami pertumbuhan sebesar 5% (yoy) pada triwulan laporan. Nilai pembiayaan yang bersifat konsumtif memiliki proporsi sebesar 53,62%. Selanjutnya, untuk penyaluran pembiayaan di sektor produktif memiliki proporsi sebesar 46,38%. Adapun pembiayaan dari sektor produktif dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan untuk investasi dan pembiayaan untuk modal kerja dimana masing-masing memiliki porsi sebesar 20,38% dan 26% dari total seluruh pembiayaan yang disalurkan pada triwulan laporan. pembiayaan yang konsumtif.

**Grafik 4. 9.** Proporsi pembiayaan berdasarkan penggunaan



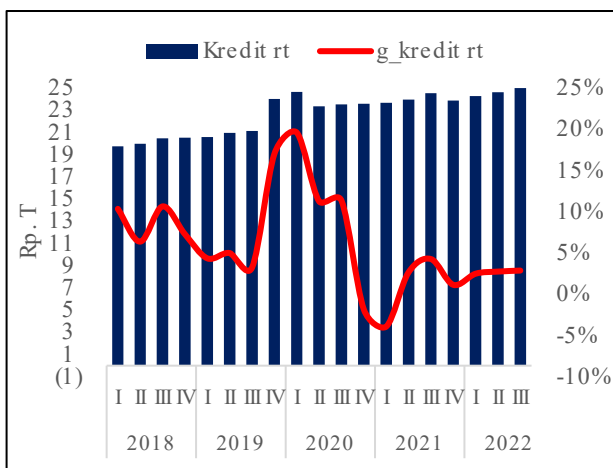
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Penyaluran pembiayaan yang ada di Provinsi Aceh masih didominasi oleh pembiayaan sektor konsumsi atau dapat disebut juga dengan Kredit Rumah Tangga (kredit RT). Hal ini menunjukkan bahwa untuk sektor-sektor produktif belum banyak tersalurkan oleh pembiayaan dari perbankan.

Kondisi pembiayaan saat ini sudah mengalami

Kredit RT terdiri dari Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB), dan kredit multiguna. Pada triwulan laporan kredit RT meningkat 2,88% (yoy). Jenis kredit rumah tangga yang mengalami pertumbuhan paling tinggi berasal dari kredit multiguna dengan laju pertumbuhan 4,51% (yoy). Selanjutnya, KKB juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,79%. Pada triwulan laporan KPR mengalami penurunan laju pertumbuhan sebesar -4,48%.

**Grafik 4. 10.** Kredit Konsumsi

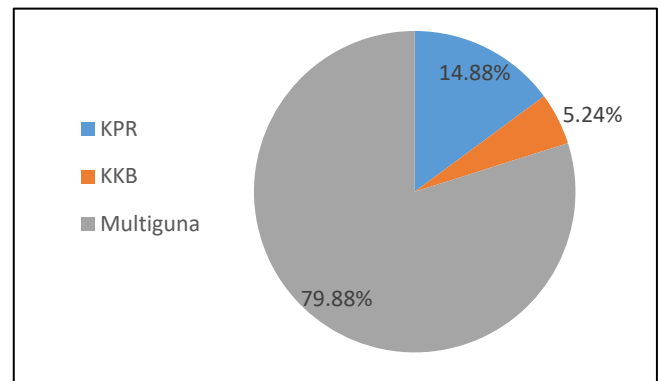


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Laju pertumbuhan kredit RT mulai mengalami laju pertumbuhan yang stabil semenjak penurunan yang drastis di tahun awal terjadinya pandemi Covid-19. Pembiayaan konsumsi mengalami pertumbuhan didorong oleh perayaan HBKN yang cenderung lebih longgar dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun belum kembali pada laju pertumbuhan sebelum ada pandemi Covid-19, tren peningkatan kredit RT sudah mulai membaik. Optimisme masyarakat juga terus terjaga.

Sejalan dengan kembali normalnya konsumsi, nilai Survei Konsumen juga terjaga di zona optimis. Survei Konsumen yang dilaksanakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe di Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe mengindikasikan bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap berada pada zona optimis meskipun sedikit melambat pada bulan September 2022. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada bulan September 2022 tercatat sebesar 105,72. Hal ini mengindikasikan daya beli masyarakat masih kuat.

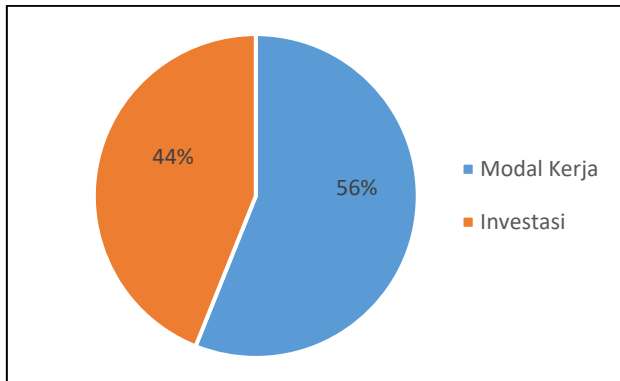
**Grafik 4. 11.** Proporsi Pembiayaan Konsumsi pembiayaan berdasarkan penggunaan



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Pembiayaan produktif sendiri memiliki porsi 46,38% dari total seluruh pembiayaan. Pembiayaan sektor produktif berasal dari kredit investasi dan kredit modal kerja. Pada periode laporan kredit investasi meningkat sebesar 61,89% (yoy). Sedangkan untuk kredit modal kerja menurun sebesar 14,84% (yoy).

**Grafik 4.12.** Proporsi Pembiayaan Produktif pembiayaan berdasarkan penggunaan

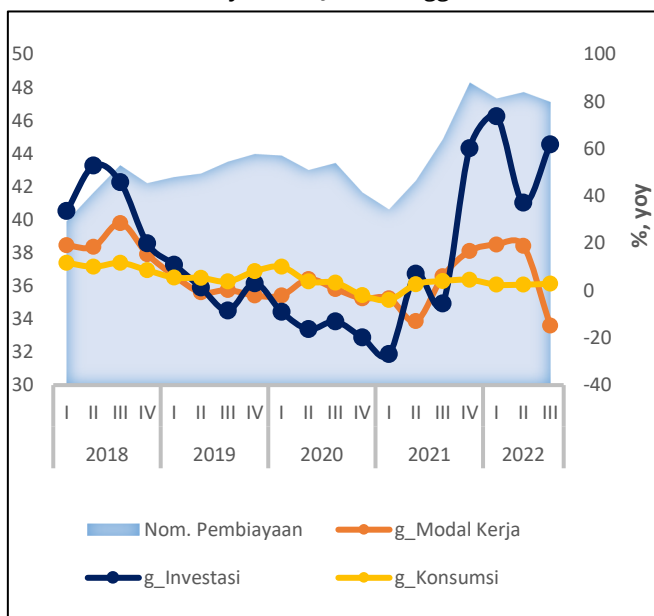


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Adanya akselerasi pertumbuhan pembiayaan pada triwulan laporan disebabkan adanya kenaikan yang signifikan dari jenis pembiayaan investasi. Secara agregat pertumbuhan pembiayaan investasi meningkat sebesar 61,89% (yoy). Pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang meningkat di tingkat 37,19% (yoy).

Iklim investasi di Aceh sedang dalam perbaikan. Oleh karenanya terjadi perbaikan kinerja investasi. Meskipun demikian, potensi investasi masih dapat berkembang lebih jauh. Jika hilirisasi usaha dapat terlaksana maka pembiayaan investasi dapat bertumbuh dengan jauh lebih baik.

**Grafik 4.13.** Perkembangan Pembiayaan Berdasarkan Lokasi Proyek dan Jenis Penggunaan

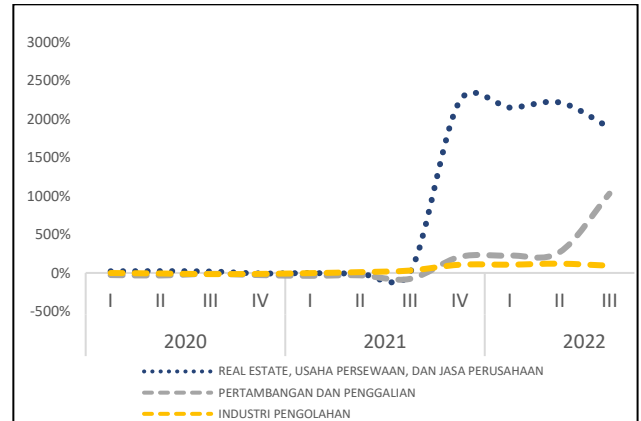


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Pertumbuhan pembiayaan investasi terbesar pada

triwulan laporan berasal dari LU Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan, LU Pertambangan dan Penggalian, dan LU Industri Pengolahan.

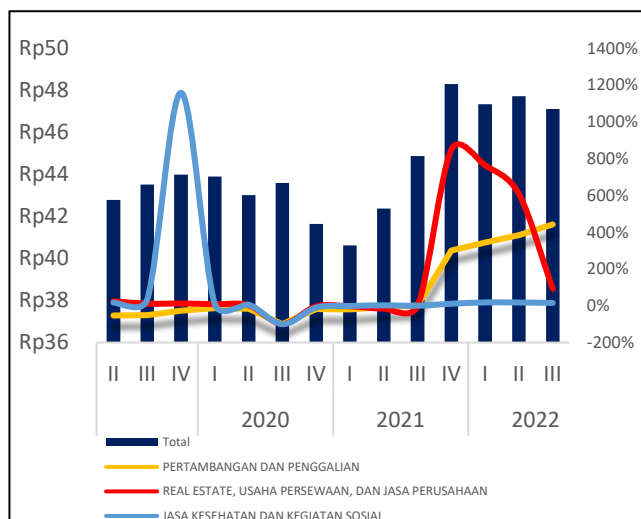
**Grafik 4.14.** Penyaluran Pembiayaan berdasarkan LU



#### 4.2.3. Perbaikan Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Lapangan Usaha Didorong Oleh Tumbuhnya Pertambangan dan Penggalian

Berdasarkan lapangan usahanya, pertumbuhan pembiayaan yang terjadi pada triwulan laporan disebabkan oleh tumbuhnya pembiayaan pada LU Real State, Usaha Persewaan, dan Jasa Pengolahan. Perbaikan penyaluran pembiayaan pada LU Real State, Usaha Persewaan, dan Jasa Pengolahan Selain itu untuk lapangan usaha jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya 14,51% (yoy) pada lapangan usaha tersebut pada triwulan II 2022. Selanjutnya, pada lapangan usaha perikanan serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 7,81% (yoy) dan 6,52% (yoy). Namun, untuk sektor utama yaitu pertanian mengalami kontraksi sebesar 51,98% (yoy). Pembiayaan pada lapangan usaha pertanian pada periode laporan terkontraksi cukup dalam dibanding dengan triwulan sebelumnya dengan penurunan 15,99% (yoy).

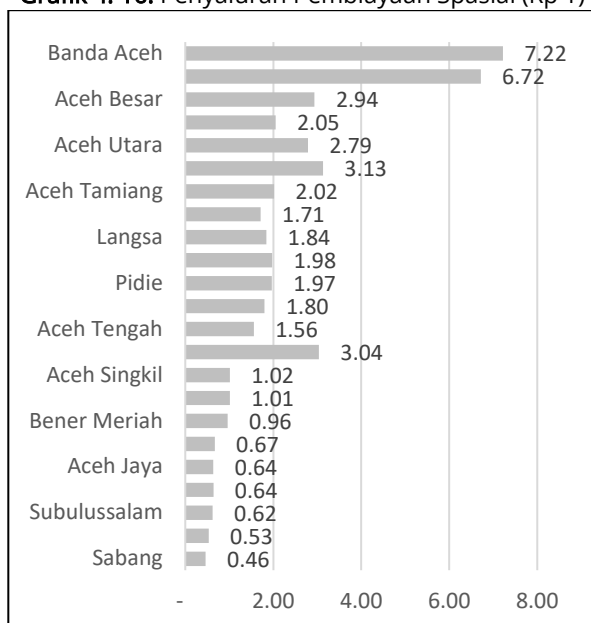
**Grafik 4. 15.** Penyaluran Pembiayaan LU (%)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Secara spasial, penyaluran pembiayaan/kredit berdasarkan lokasi proyek di Aceh masih belum merata. Hal tersebut terlihat dari terkonsentrasinya penyaluran pembiayaan pada 5 (lima) Kabupaten/Kota yang mendominasi setengah dari total pembiayaan yang tersalurkan. 5 kabupaten tersebut adalah Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar Rp1,553 T, Kabupaten Aceh Besar Rp0,736 T, Kabupaten Aceh Utara Rp0,764 T, Kabupaten Aceh Tamiang Rp0,544T, dan Kota Langsa Rp0,505 T. Terkonsentrasinya penyaluran pembiayaan di 5 Kota/kabupaten ini menjadi indicator bahwa penyaluran pembiayaan di Provinsi Aceh masih belum merata.

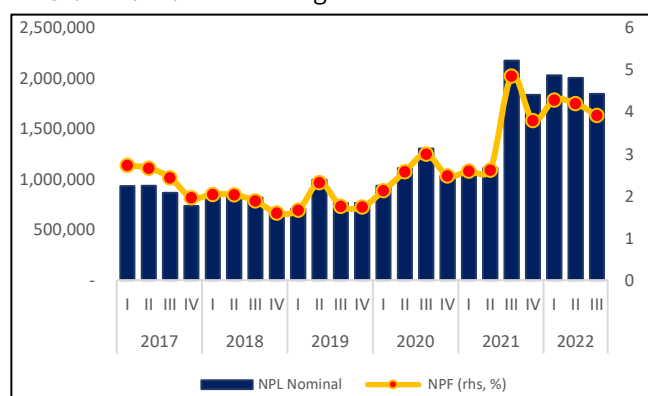
**Grafik 4. 16.** Penyaluran Pembiayaan Spasial (Rp T)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Kualitas pembiayaan dengan lokasi proyek di Provinsi Aceh pada triwulan III 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya utamanya didorong dari peningkatan NPF pada semua jenis penggunaan pembiayaan baik modal kerja, konsumsi, dan investasi. Peningkatan kualitas tersebut tercermin dari penurunan rasio NPF menjadi 4,20% pada periode laporan setelah sebelumnya berada pada 4,29%. Penurunan rasio NPF tersebut terjadi pada modal kerja. Penurunan NPF pada modal kerja sebesar 1,59%.

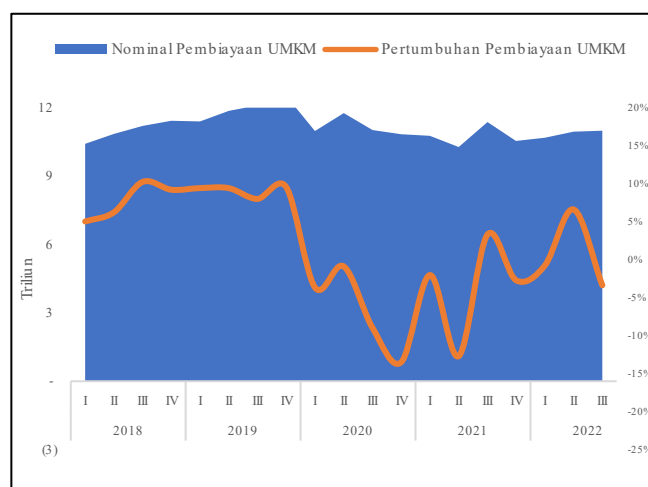
**Grafik 4. 17.** Perkembangan NPF Perbankan Aceh



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

#### 4.2.4. Penyaluran Pembiayaan Kepada UMKM sedikit menurun, Namun Risiko Pembiayaan mulai bergerak membaik

**Grafik 4. 18.** Perkembangan Pembiayaan UMKM

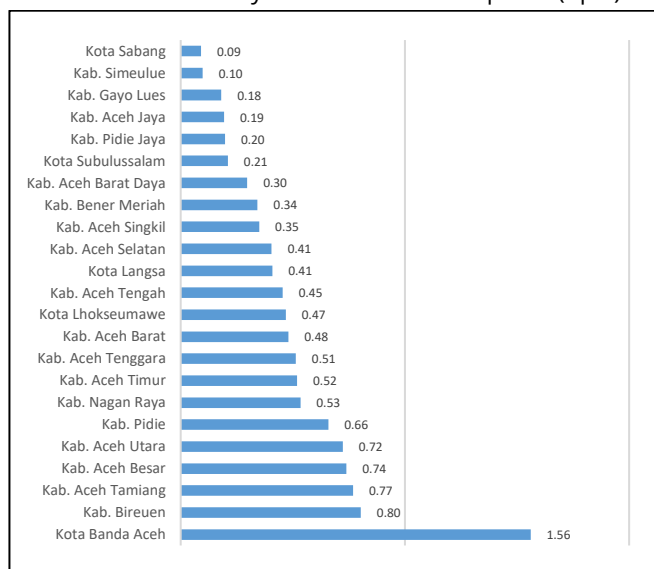


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Penyaluran pembiayaan kepada UMKM<sup>2</sup> pada triwulan III 2022 mengalami penurunan 3,37% (yoy). Jumlah penyaluran pembiayaan ini lebih rendah dibandingkan triwulan laporan sebelumnya 6,62%. Meskipun demikian, penyaluran pembiayaan UMKM sudah mulai kembali membaik paska pandemi Covid-19.

Secara spasial, penyaluran pembiayaan/kredit berdasarkan lokasi proyek di Aceh masih belum merata. Hal tersebut terlihat dari terkonsentrasinya penyaluran pembiayaan pada 5 (lima) Kabupaten/Kota yang mendominasi setengah dari total pembiayaan yang tersalurkan. Pada triwulan laporan ini 5 kab/kota dengan total pembiayaan UMKM terbesar adalah kota Banda Aceh, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Aceh Besar, dan Kab. Aceh Utara. Terkonsentrasinya penyaluran pembiayaan di 5 Kota/kabupaten ini menjadi indikator bahwa penyaluran pembiayaan di Provinsi Aceh masih belum merata.

**Grafik 4. 19.** Pembiayaan UMKM Secara Spasial (Rp T)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Bank Indonesia terus mendorong realisasi penyaluran pembiayaan UMKM dengan menetapkan target proporsi pembiayaan UMKM kepada perbankan berdasarkan tahapan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.14/12/PBI/2012. Selain itu, Bank Indonesia juga berupaya mendorong peningkatan kinerja pembiayaan/kredit UMKM melalui

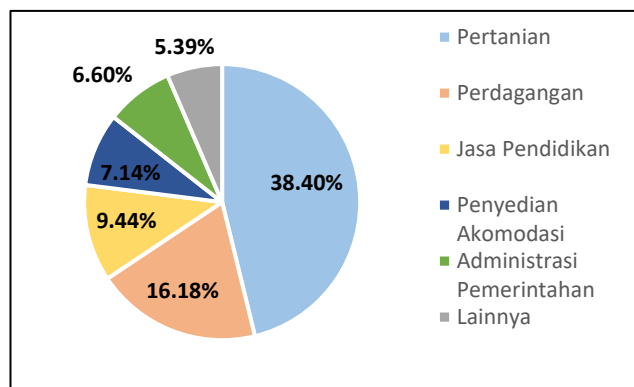
penerbitan kebijakan insentif seperti memperlonggar batasan *Loan to Funding Ratio* sebagaimana diatur dalam PBI No.17/11/PBI/2015. Sementara itu, ditingkat regional KPw Bank Indonesia juga turut mendorong UMKM dengan melaksanakan program pengembangan UMKM di masing-masing daerah baik melalui pembinaan, pendampingan, maupun klaster.

### 4.3. Kinerja Pembiayaan Rumah Tangga

#### 4.3.1. Sumber Kerentanan Rumah Tangga

Pada penyaluran pembiayaan kepada rumah tangga, sumber kerentanan terletak pada kinerja perekonomian, kondisi ketenagakerjaan dan penghasilan. Penghasilan rumah tangga di Provinsi Aceh relatif belum terdiversifikasi. Hal tersebut tergambar dari jumlah tenaga kerja di Aceh yang mayoritas bekerja di lapangan usaha pertanian (36,13%). Sehingga, tekanan pada lapangan usaha tersebut mengakibatkan rumah tangga di Aceh terpapar risiko yang cukup tinggi.

**Grafik 4. 20.** Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha (%)



Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

### 4.4. Langkah Peningkatan Akses Keuangan

#### 4.4.1. Pengembangan UMKM Aceh

Dalam mengembangkan UMKM, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Aceh selalu berfokus

<sup>2</sup> Penyaluran kredit/pembiayaan UMKM oleh perbankan di Provinsi Aceh

pada pengembangan proses bisnis dari hulu hingga hilir. Pengembangan tersebut merupakan konfigurasi yang cukup komprehensif untuk meningkatkan kapasitas UMKM serta memfasilitasi terjadinya hilirasi produk UMKM pada level nasional maupun global. Selain pengembangan yang bersifat hulu ke hilir, untuk memperkuat ketahanan individu dan peningkatan skala bisnis UMKM, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Aceh juga turut mendorong korporatisasi dan akses pembiayaan UMKM. Hal tersebut mampu membawa UMKM kepada level yang lebih tinggi sehingga mampu menjadi replikasi dan *success story* bagi UMKM lain dimasa mendatang.

Selama tahun 2022, UMKM Binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Aceh tercatat memiliki beberapa capaian yang sangat membanggakan. Lebih dari 25 UMKM telah lolos dan mampu mengikuti *showcasing* baik pada level nasional maupun internasional, lebih dari 30 UMKM melakukan *rebranding* dan digitalisasi, 7 UMKM berhasil melakukan ekspor, fasilitasi sertifikasi halal 20 UMKM serta capaian omzet lebih dari Rp 1,5 Milyar pada pameran UMKM sepanjang tahun 2022.

#### 4.4.2. Langkah KPw BI Aceh dalam mendorong Investasi melalui Forum *Business Matching*

Dalam rangka meningkatkan penyaluran pembiayaan produktif guna meningkatkan roda perekonomian yang ada di Provinsi Aceh, Bank Indonesia Provinsi Aceh telah melakukan berbagai upaya salah satunya adalah dengan menyelenggarakan ataupun memfasilitasi kegiatan *business matching*.

Kegiatan Aceh-Nicobar Business Forum yang diselenggarakan pada 29 Agustus 2022 oleh Bank Indonesia Provinsi Aceh yang bekerjasama dengan *Joint Business Council Aceh* serta asosiasi pedagang dari Kepulauan Nicobar dan Andamanm India. Tujuan dari kegiatan ini adalah peninjauan potensi perdagangan antara Aceh dan Kepulauan Nicobar dan Andaman. Forum *business matching* ini berhasil memertemukan pengusaha-pengusaha dari

Andaman dan Nicobar dengan beberapa pelaku usaha di Aceh.

Dengan adanya unit kerja *Regional Investor Relation Unit (RIRU)*, Bank Indonesia memiliki tujuan untuk membantu pemangku kepentingan dalam meningkatkan persepsi positif terhadap investasi di Provinsi Aceh. Provinsi Aceh ingin terus memperbaiki ekosistem investasi di Aceh sehingga realisasi investasi akan terus tumbuh dan mendorong sektor0sektor potensial yang ada. Dari sisi regulasi, DPMPTSP siap memberikan pelayanan yang terbaik untuk memfasilitasi serta mendukung investasi di Provinsi Aceh

Dalam kegiatan *business matching* ini ada 6 pengusaha India dari berbagai perusahaan, seperti Bapak Rashid Yusoof sendiri dari Feel Good Venture Pvt Ltd, Bapak Ali Akbar dar Akbar Sea-Foods, Bapak Aman Pasha dari Pasha Coconut Products, Bapak Tha Burhan Athaullah dari Eman Trading, Bapak Tanver Singh dari Symphony Resort Group, dan Bapak Shashank dari SPG Infra Pvt. Ltd. Adapun pengusaha dari Aceh sendiri ada 18 perusahaan. Pelaksanaan *business matching* berlangsung interaktif dimana pengusaha-pengusaha tersebut saling berukar informasi dan berdiskusi tentang dunia bisnis yang sesuai dengan bisnis yang dijalankan. Kendala bahasa tidak menjadi masalah karena perwakilan pengusaha dapat berbicara dengan menggunakan bahasa inggris. Kegiatan ini juga didukung oleh PT POS Indonesia yang ada di Aceh sebagai perusahaan milik negara yang bergerak dibidang logistik.

## Bank Indonesia Terbitkan Kebijakan untuk Mendorong Pembiayaan pada Sektor Prioritas dan Inklusif

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan III 2022 tetap terjaga. Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Provinsi Aceh yang tercermin dari indikator Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan, dan *Non Performing Financing* (NPF) tetap terjaga dan melanjutkan tren perbaikan. *Financing to Deposit Ratio* pun juga meningkat seiring pembiayaan yang meningkat, terutama untuk jenis penggunaan investasi sektor prioritas. Berdasarkan data menurut lokasi bank, simpanan masyarakat yang tercermin dari DPK per September 2022 tercatat sebesar 40,14 T.

Dengan angka tersebut, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) di Aceh tercatat pada level 83,33% atau meningkat dari triwulan sebelumnya yang berada di level 80,17%. Ini menandakan bahwa dari seluruh DPK atau simpanan yang dihimpun, sebesar 83,33% nya telah disalurkan perbankan sebagai pembiayaan kepada masyarakat. Selanjutnya, kualitas pembiayaan yang tercermin dari rasio NPF masih dalam level yang terjaga di angka 2,02%. Sementara itu, pertumbuhan pembiayaan UMKM menunjukkan peningkatan pada triwulan III 2022 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Meski demikian, pertumbuhan pembiayaan pada sektor prioritas masih relatif stabil.

Pembiayaan berdasarkan lokasi proyek melanjutkan tren pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yaitu 1,92%. Sedangkan, pada triwulan sebelumnya, tercatat laju NPF sebesar 16,49% (yoy). Adanya akselerasi pertumbuhan pembiayaan pada triwulan laporan disebabkan adanya kenaikan yang signifikan dari jenis pembiayaan investasi. Secara agregat pertumbuhan pembiayaan investasi meningkat sebesar 61,89% (yoy). Pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang meningkat di tingkat 37,19% (yoy). Secara umum kualitas pembiayaan yang tercermin dari indikator NPF masih berada pada level yang terjaga pada bulan September 2022. Sementara itu, penyaluran pembiayaan kepada UMKM per September 2022 sebesar Rp10,9 T atau lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2022 yang tercatat Rp9 T.

Kemudian, dalam rangka mendorong pembiayaan pada sektor prioritas dan pembiayaan inklusif, Bank Indonesia menerbitkan PBI Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial, PBI Nomor 24/5/PBI/2022 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi tertentu dan Inklusif, dan PADG Nomor 24/12/PADG/2022 tentang Pelaksanaan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif.

Selanjutnya, PBI Nomor 24/5/PBI/2022 mengatur tentang pemberian insentif kepada perbankan yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif. Insentif berupa pelanggaran atas kewajiban pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata dengan besaran insentif maksimal 1% (100 *basis points*). Insentif dapat diperoleh jika perbankan memberikan pembiayaan pada sektor prioritas dan mencapai nilai rata-rata pertumbuhan pembiayaan sektor prioritas paling sedikit 1%. Selain itu, insentif juga dapat diperoleh jika bank dapat memenuhi target RPIM yang telah tercantum dalam rencana bisnis bank dan mencapai nilai RPIM paling sedikit 10%.

--000--



## BAB V

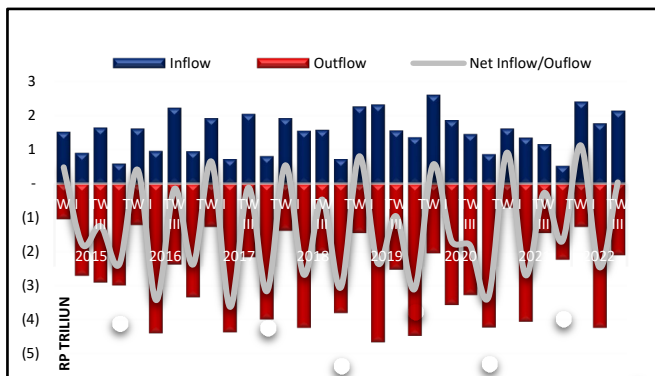
# PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Selama triwulan III 2022, perkembangan sistem pembayaran secara konsisten berjalan lancar dalam menopang pemulihan perekonomian Provinsi Aceh. Sistem pembayaran tunai berjalan sesuai dengan pola historisnya dimana terdapat penurunan pada *outflow* dan *inflow* pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara sistem pembayaran nontunai, baik nilai besar maupun ritel, terus menunjukkan tren peningkatan. Di sisi lain, penggunaan kartu ATM/debit dan Uang Elektronik tumbuh positif pada triwulan laporan.

## 5.1. Sistem Pembayaran Tunai

Pada triwulan III 2022, posisi pengedaran uang kartal di Bank Indonesia mengalami *net inflow*<sup>1</sup>. Aliran uang kartal melalui Bank Indonesia di Provinsi Aceh mengalami *net inflow* sebesar Rp0,04 miliar dengan total *inflow* sebesar Rp2,13 triliun dan total *outflow* sebesar Rp2,09 triliun (Grafik 5.1). Dari sisi perkembangan *outflow*, kondisi ini selaras dengan data historis 3 tahun terakhir yang menunjukkan *outflow* pada triwulan III selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan II. *Net inflow* pada triwulan laporan mengindikasikan bahwa permintaan masyarakat terhadap uang kartal mengalami penurunan seiring dengan kebijakan moneter kontraktif melalui peningkatan BI7DRR sepanjang triwulan III 2022.

Grafik 5.1. *Netflow* Kas (Rp Triliun)

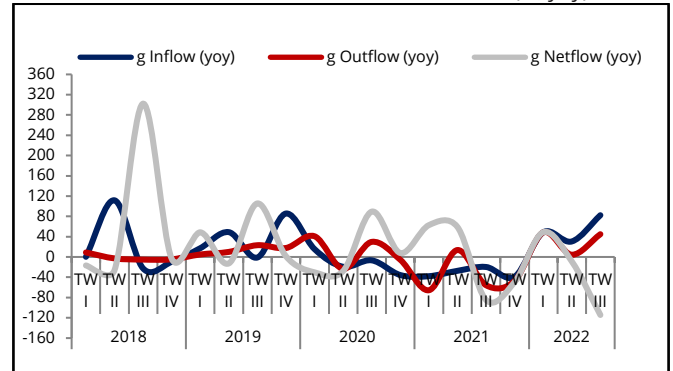


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Secara *year on year*, tingkat *inflow* pada triwulan III 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 82,35% (yoy), adapun *outflow* tumbuh sebesar 44,90% (yoy) (Grafik 5.2). Meskipun karakteristik aliran uang pada triwulan laporan menunjukkan *net inflow*, kondisi tersebut tetap mengindikasikan adanya pemulihan konsumsi masyarakat dari *outflow* yang meningkat dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Indikator tersebut menunjukkan optimisme pemulihan ekonomi seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2022 yang tetap tumbuh positif sebesar 5,72% (yoy) yang dikarenakan adanya dukungan peningkatan belanja masyarakat dan juga pertumbuhan ekspor.

Penurunan kebutuhan uang di masyarakat yang terjadi pada triwulan laporan mengindikasikan adanya relaksasi aktivitas ekonomi dibanding periode sebelumnya.

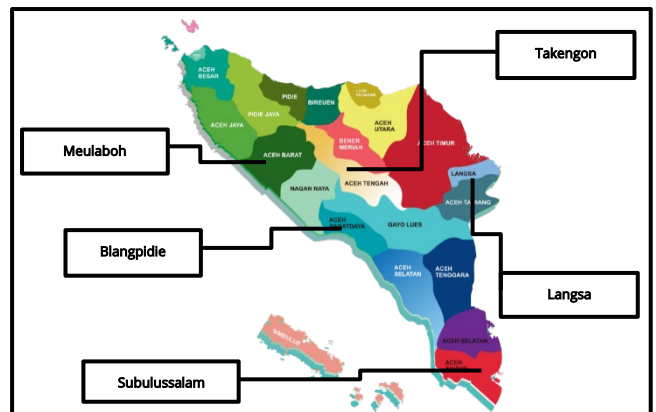
Grafik 5.2. Pertumbuhan *Inflow* dan *Outflow* (% yoy)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Selain menjaga dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, Bank Indonesia juga berupaya untuk memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat melalui pembukaan Kas Titipan. Kas Titipan merupakan kegiatan penyediaan uang rupiah milik Bank Indonesia yang dititipkan kepada kantor bank umum untuk mencukupi persediaan kas perbankan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu wilayah/daerah tertentu.

Gambar 5.3. Kas Titipan Bank Indonesia



Sumber: Bank Indonesia, diolah

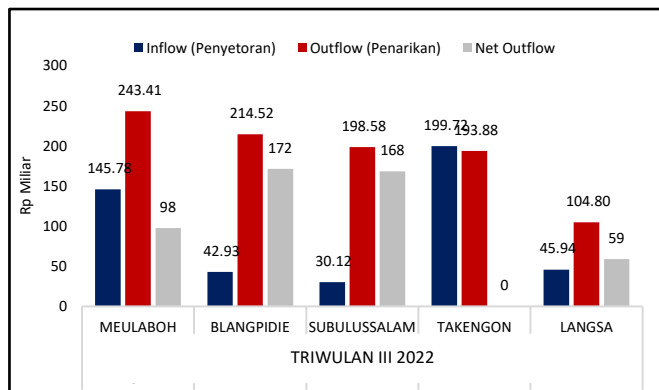
Pada tahun 2020, terdapat 5 (lima) kantor kas titipan di Provinsi Aceh yaitu di Blangpidie, Meulaboh, Subulussalam, Takengon, dan Langsa. Namun beberapa Kas Titipan mengalami penutupan pada triwulan IV tahun 2020, yaitu di Meulaboh (ditutup November 2020), Takengon (ditutup November 2020), Langsa (ditutup Desember 2020), dan Blangpidie (ditutup Desember 2020). Penutupan tersebut dikarenakan adanya proses konsolidasi dan transisi Bank Pengelola Kas Titipan sehubungan dengan implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mewajibkan perbankan yang beroperasi di Aceh seluruhnya harus berbentuk syariah, dengan masa transisi paling lama tiga tahun atau pada 2021. Setelah selesai masa transisi oleh perbankan, terdapat beberapa Kas

<sup>1</sup> Aliran uang kartal dari perbankan dan masyarakat ke Bank Indonesia (*inflow*) lebih

besar dari pada aliran uang kartal dari Bank Indonesia ke sistem perbankan dan masyarakat (*outflow*)

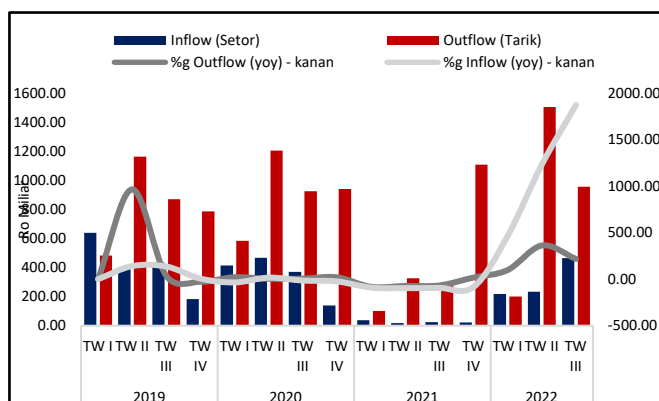
Titipan yang kembali dibuka pada tahun 2021, yaitu Kas Titipan Blangpidie yang kembali beroperasi pada Agustus 2021 dan Kas Titipan Takengon pada November 2021. Selain itu, kas titipan di Meulaboh dan Langsa juga dibuka kembali (*relaunching*) pada April 2022.

Grafik 5.4. Transaksi *Inflow Outflow* per Kas Titipan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.5. Transaksi Kas Titipan Triwulanan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

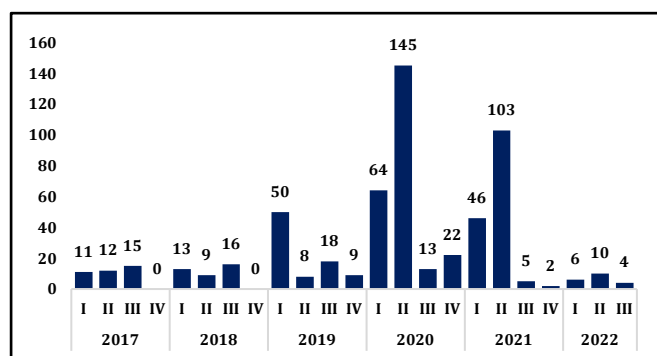
Secara agregat, Kas Titipan pada triwulan laporan di Provinsi Aceh mengalami *net outflow* sebesar Rp490,70 miliar (Grafik 5.5). Jumlah tersebut berasal dari lima Kas Titipan di Meulaboh, Subulussalam, Blangpidie, Takengon, dan Langsa. Aliran uang kartal yang masuk (*inflow*) sebesar Rp464,49 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 1.872% (yoy). Di sisi lain, *outflow* tercatat sebesar Rp955,19 miliar atau mengalami pertumbuhan yang juga cukup signifikan sebesar 217,84% (yoy).

Di samping itu, untuk tetap menjaga kualitas uang yang beredar di masyarakat (*clean money policy and fresh for circulation*) serta meningkatkan kualitas uang beredar di masyarakat selama masa pandemi COVID-19, Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Aceh melaksanakan beberapa kebijakan terkait layanan sistem pembayaran tunai. Pertama, melakukan penyesuaian terhadap jadwal penyetoran dan penarikan uang perbankan. Kedua, melaksanakan operasi terpisah (*split*

*operation*) atas layanan perbankan untuk mengantisipasi apabila terdampak gangguan operasional akibat pandemi. Ketiga, memberikan imbauan kepada perbankan untuk mematuhi protokol kesehatan yang harus diterapkan selama masa pandemi serta mengoptimalkan penukaran uang kepada masyarakat melalui perbankan. Keempat, mengajak masyarakat melakukan transaksi secara non tunai untuk memitigasi penularan melalui tatap muka. Kebijakan tersebut selaras dengan upaya penanggulangan pandemi COVID-19 yang dilakukan pemerintah dan telah dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin ketersediaan uang di masyarakat dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan layak edar.

Temuan uang yang diragukan keasliannya (palsu) pada triwulan laporan tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Jumlah temuan pada triwulan III 2022 sebanyak 4 (empat) lembar, turun dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu sepuluh lembar (Grafik 5.6). Jika ditinjau dari sisi pecahan, uang Rupiah dengan pecahan Rp100.000,- menjadi pecahan yang mendominasi hasil temuan.

Grafik 5.6. Temuan Uang Palsu (Lembar)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

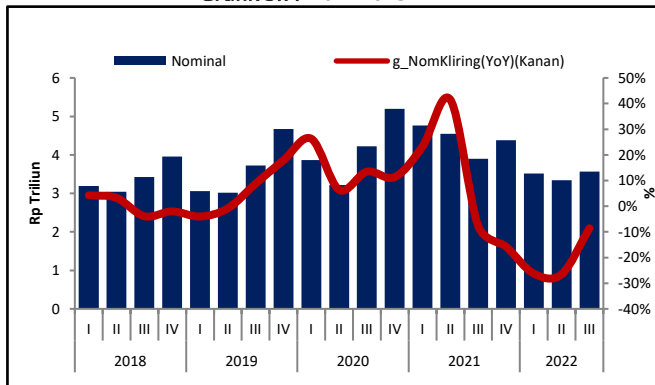
## 5.2. Sistem Pembayaran Non Tunai

Sistem pembayaran non tunai, baik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun industri, menunjukkan tren positif pada triwulan laporan. Sistem pembayaran nilai besar dan nilai ritel yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh industri tercatat mengalami pertumbuhan secara agregat yang tercermin dari peningkatan nominal transaksi instrumen Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Tren peningkatan tersebut juga terjadi pada penggunaan instrumen Uang Elektronik baik *server based* ataupun *chip based* di Provinsi Aceh. Secara umum, sistem

pembayaran non tunai di Provinsi Aceh tetap terselenggara dengan baik dalam mendukung berbagai aktivitas transaksi masyarakat.

Memasuki triwulan III tahun 2022, transaksi sistem pembayaran non tunai yang diselenggarakan Bank Indonesia melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) menunjukkan penurunan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini diperkirakan terjadi karena adanya transisi pengguna sistem pembayaran yang beralih menggunakan BI-FAST. Pada triwulan laporan, nilai penyelesaian transaksi ritel melalui SKNBI tercatat sebesar Rp3,57 triliun atau menurun sebesar 0,09% (yoy) dari periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp3,90 triliun (Grafik 5.7).

**Grafik 5.7. Nominal SKNBI**

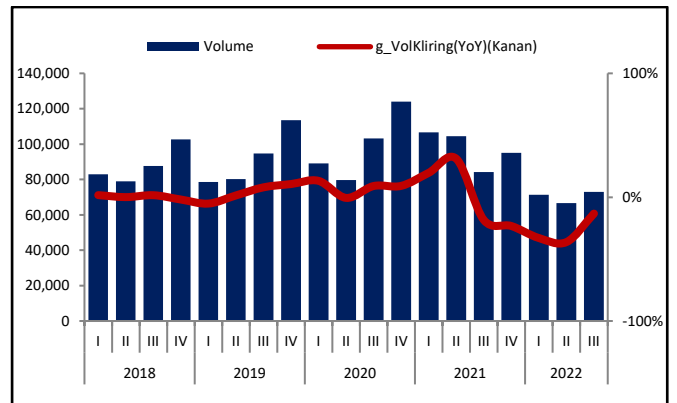


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Di sisi volume transaksi tercatat sebesar 73.039 Data Keuangan Elektronik (DKE) pada triwulan laporan atau tumbuh sebesar 9,72% (qtq) dibandingkan triwulan II 2022 yang tercatat sebesar 66.567 (Grafik 5.8). Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang turun sebesar 19,40%, dari 104.464 menjadi 84.197. Sementara itu secara tahunan, volume transaksi ritel melalui SKNBI pada triwulan laporan mengalami penurunan sebesar -13,25% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

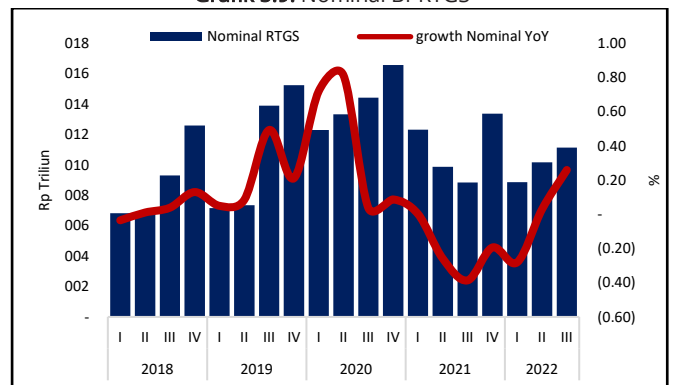
Sementara itu, perkembangan sistem pembayaran nilai besar tercermin dalam perkembangan data *Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS). Pada periode laporan, transaksi BI-RTGS secara nominal tercatat sebesar Rp11,14 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar 25,91% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Grafik 5.9). Pada triwulan laporan, nominal transaksi BI-RTGS melanjutkan pertumbuhan dari triwulan sebelumnya dengan tumbuh sebesar 9,54% (qtq) dibandingkan triwulan II 2022 yang tercatat sebesar Rp10,17 triliun.

**Grafik 5.8. Volume SKNBI**



Sumber: Bank Indonesia, diolah

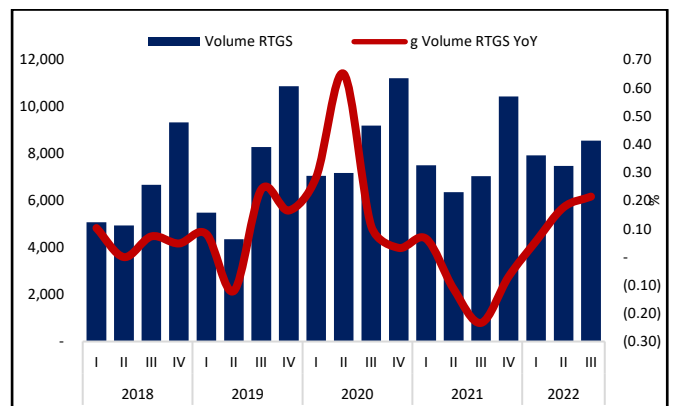
**Grafik 5.9. Nominal BI-RTGS**



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Dari sisi volume transaksi, BI-RTGS juga tercatat tumbuh pada triwulan III 2022. Pada triwulan laporan, volume transaksi mengalami pertumbuhan sebesar 21,43% (yoy) dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya, dari 7.041 menjadi sebanyak 8.550 transaksi (Grafik 5.10). Sementara itu secara kuartalan, volume transaksi BI-RTGS juga tumbuh sebesar 14,26% dibanding triwulan sebelumnya dengan volume 7.483 transaksi

**Grafik 5.10. Volume BI-RTGS**



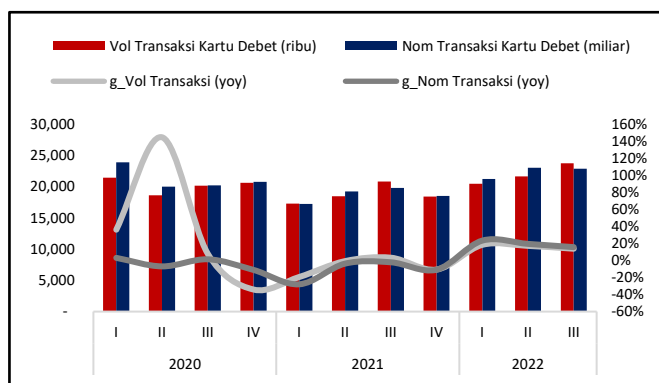
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Perkembangan transaksi nilai besar maupun ritel melalui SKNBI dan BI-RTGS secara agregat mengalami pertumbuhan secara tahunan di triwulan III 2022. Sesuai pola historisnya, pertumbuhan tersebut diperkirakan

terjadi karena mulai meningkatnya realisasi belanja fiskal oleh pemerintah daerah dan belanja korporasi menjelang akhir tahun anggaran. Di samping itu, penurunan jumlah dan volume transaksi SKNBI pada triwulan laporan secara yoy diprakirakan karena terjadinya *user shifting* pasca implementasi BI-FAST<sup>2</sup> oleh Bank Indonesia sejak Desember 2021.

Selanjutnya, transaksi non tunai menggunakan APMK baik kartu kredit, kartu ATM/debit, dan Uang Elektronik (UE) mengalami perkembangan yang beragam. Perkembangan transaksi kartu ATM/debit dan Uang Elektronik menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sedangkan transaksi pada instrumen kartu kredit pada triwulan laporan mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik 5.11. Transaksi ATM Debit

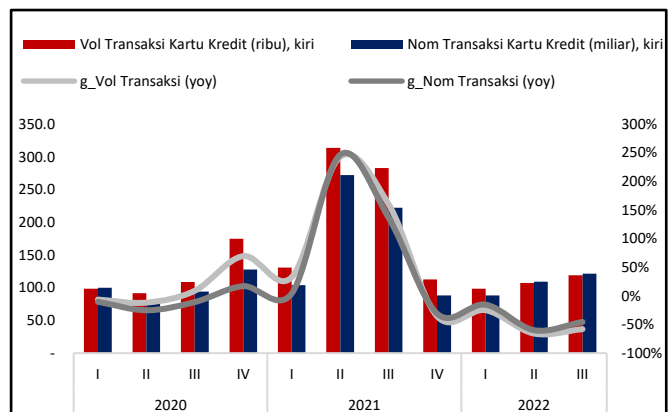


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Dari sisi kartu ATM/debit, volume transaksi tercatat tumbuh meningkat sebesar 13,82% (yoy) menjadi 23,73 juta transaksi (Grafik 5.11). Selaras dengan volume transaksi, nominal transaksi ATM/debit juga mengalami peningkatan sebesar 15,07% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya menjadi Rp22,89 triliun. Kartu ATM/debit mayoritas digunakan oleh masyarakat untuk aktivitas tarik tunai sebanyak Rp11,28 triliun (49,31%) dan untuk transfer antarbank sebesar Rp5,77 triliun (25,22%).

Sementara itu dari sisi kartu kredit, volume transaksi mengalami penurunan sebesar 58,02% (yoy) dari 283.000 transaksi menjadi 118.790 transaksi (Grafik 5.12). Secara nominal, transaksi kartu kredit juga mengalami penurunan menjadi Rp121,29 miliar atau menurun sebesar 45,46% (yoy), dimana pada periode yang sama tahun sebelumnya mencatatkan nominal transaksi sebesar Rp222,41 miliar.

Grafik 5.12. Transaksi Kartu Kredit



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Pertumbuhan transaksi kartu kredit pada triwulan laporan yang mengalami ekspansi dari triwulan sebelumnya menunjukkan adanya perbaikan ekonomi dan peningkatan konsumsi di masyarakat. Kendati demikian, terjadi kontraksi yang cukup signifikan antara volume dan nominal transaksi menggunakan kartu kredit antara periode laporan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). Hal ini utamanya dikarenakan faktor pola transaksi masyarakat yang semakin masif dalam menggunakan Uang Elektronik sebagai basis untuk bertransaksi secara *online*. Selama triwulan III 2022, terdapat 107.450 transaksi menggunakan kartu kredit di Provinsi Aceh dengan tujuan transaksi didominasi untuk keperluan belanja. Jumlah tersebut melambat dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya dimana jumlah transaksi menggunakan kartu kredit mencapai 283.000 transaksi.

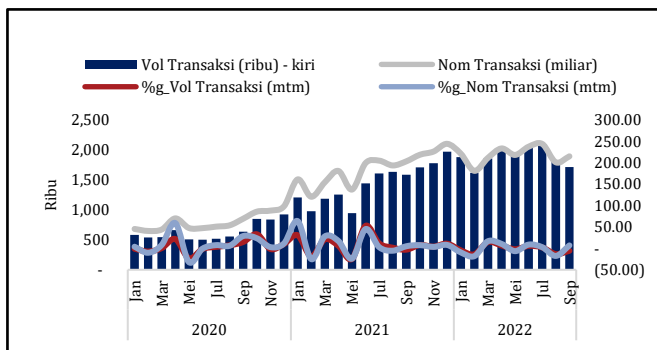
Seiring dengan meningkatnya *awareness* masyarakat dalam menggunakan instrumen pembayaran non tunai, perkembangan transaksi menggunakan UE terus mengalami peningkatan. Transaksi UE secara nominal pada triwulan III 2022 mencapai sebesar Rp659,91 miliar atau meningkat sebesar 9,65% (yoy). Sementara volume transaksi UE juga tumbuh sebesar 16,63% (yoy) atau mencapai 5,62 juta transaksi selama triwulan III 2022 (Grafik 5.13). Tren transaksi UE yang relatif terus meningkat mengindikasikan semakin tingginya minat masyarakat dalam menggunakan UE baik dari sisi konsumen maupun *merchant*. Implementasi berbagai program elektronifikasi oleh Pemda juga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah transaksi UE. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat yang tinggi dalam menggunakan instrumen UE juga diiringi dengan peningkatan infrastruktur penerima pembayaran UE baik

<sup>2</sup> BI-FAST adalah infrastruktur Sistem Pembayaran ritel nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel secara real-time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat (24/7) yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan Sistem Pembayaran Ritel nasional

dengan menyediakan alternatif terhadap infrastruktur Sistem Pembayaran nasional eksisting.

chip based ataupun server based. Peningkatan ini juga selaras dengan semakin tingginya intensitas penggunaan UE dalam aktivitas belanja masyarakat melalui *platform e-commerce* selama masa pandemi. Selama triwulan III 2022, transaksi UE mayoritas didominasi untuk keperluan belanja dengan jumlah nominal mencapai Rp417,00 miliar atau 62,42% dari total nominal transaksi dan volume sebanyak 4.268.919 transaksi atau 75,89% dari total volume transaksi.

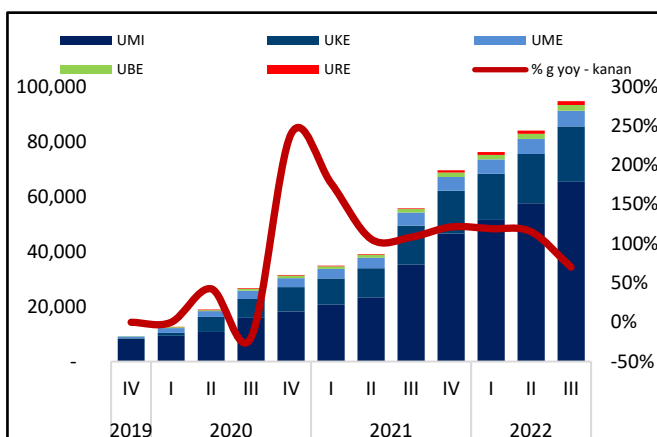
Grafik 5.13. Perkembangan Transaksi UE



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Transaksi uang elektronik berbasis server (*server based*) juga mengalami kenaikan di Provinsi Aceh. Pemanfaatan salah satu metode pembayaran digital berbasis server yaitu melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) mengalami peningkatan yang terlihat dari perkembangan jumlah *merchant* yang telah mengimplementasikan QRIS. Peningkatan ini didorong oleh *awareness* masyarakat yang semakin tinggi dalam memanfaatkan fitur pembayaran yang bersifat *contactless* untuk meminimalisir risiko penularan COVID-19. Hal ini juga mengindikasikan bahwa *demand* masyarakat untuk melakukan *contactless payment* semakin tinggi.

Grafik 5.14. Pertumbuhan Merchant QRIS



Sumber: PT PTEN, diolah

Hingga triwulan III 2022, terdapat 94.850 *merchant* yang telah mengimplementasikan QRIS sebagai salah satu

alternatif kanal pembayaran nontunai (Grafik 5.14). Jumlah tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 70,1% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 55.757 *merchant*. Secara triwulanan, jumlah *merchant* meningkat sebesar 12,7% (qtq) dari posisi triwulan sebelumnya sebanyak 84.149 *merchant*. Berdasarkan klasifikasi usaha yang telah mengimplementasikan QRIS, *share* terbesar dimiliki oleh usaha mikro (UMI) sebanyak 65.422 *merchant* (69,07%).

### 5.3. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

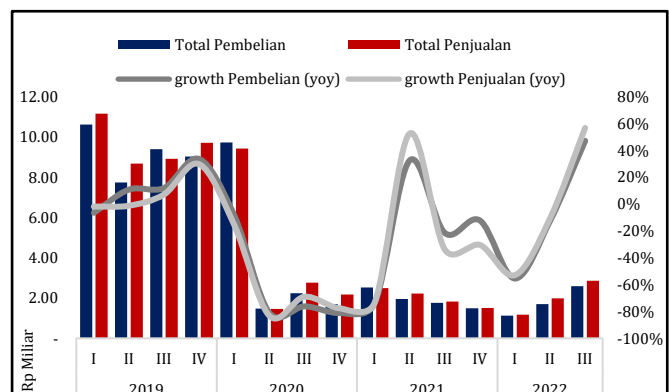
Dalam rangka mewujudkan nilai tukar yang rendah dan stabil guna mendukung terciptanya iklim stabilitas moneter, Bank Indonesia memandang perlunya regulasi yang mengatur pasar keuangan termasuk pasar keuangan valuta asing (valas).

Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia berperan sebagai regulator yang menjamin terciptanya pasar keuangan valas yang sehat, profesional, dan menerapkan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Hingga triwulan III 2022, terdapat 16 (enam belas) KUPVA BB berizin di Provinsi Aceh yang melayani pembelian maupun penjualan Uang Kertas Asing (UKA). Sebanyak 8 (delapan) KUPVA BB beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, sedangkan 8 (delapan) lainnya beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe.

Pada triwulan laporan, transaksi KUPVA BB berizin di Provinsi Aceh mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Transaksi KUPVA BB meningkat sebesar 47,56% (qtq) menjadi Rp5,45 miliar dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp3,69 miliar.

Grafik 5.15. Transaksi KUPVA BB



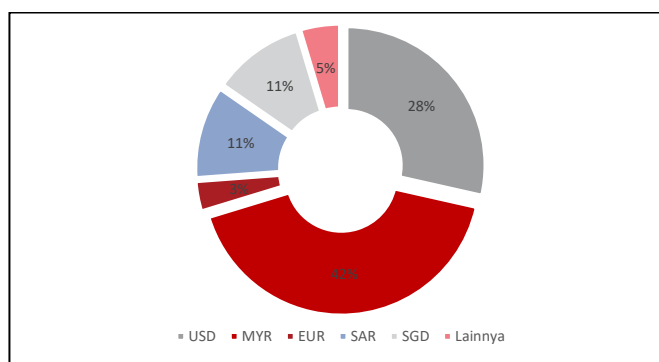
Sumber: LKPBU, diolah

Berdasarkan jenis transaksi, pembelian UKA mengalami peningkatan sebesar 51,47% (qtq) menjadi Rp2,58 miliar dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp1,71 miliar (Grafik 5.15). Sejalan dengan hal tersebut, secara tahunan pembelian UKA di Provinsi Aceh juga mengalami peningkatan sebesar 47,05% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,76 miliar.

Secara umum, masih terbatasnya transaksi KUPVA BB di Provinsi Aceh ditengarai oleh dampak kebijakan penanganan pandemi yang masih berlangsung, yaitu pembatasan mobilitas penduduk untuk bepergian dari dan ke luar negeri. Sampai dengan triwulan laporan, pintu masuk wisatawan asing melalui Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda juga masih ditutup untuk rute mancanegara. Sejak *outbreak* COVID-19 di Provinsi Aceh pada bulan Maret 2020, pemerintah membatasi kedatangan WNA dan membatasi penduduk untuk bepergian ke luar negeri. Hal itu menyebabkan pembelian UKA yang biasanya dipasok dari WNA yang datang atau WNI yang bepergian ke luar negeri menurun drastis.

Namun pada tanggal 29 September 2022 telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum & HAM Aceh dengan Bank Syariah Indonesia terkait Visa Kunjungan Saat Kedatangan atau *Visa on Arrival* (VoA) yang menjadi pertanda akan kembali dibukanya penerbangan Internasional. Sebelumnya dalam menyelenggarakan VoA di seluruh wilayah Indonesia Kementerian Hukum & HAM hanya bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), akan tetapi pasca qunun LKS yang diterapkan di provinsi Aceh mengakibatkan BRI tidak lagi dapat memberikan layanan di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Provinsi Aceh. kesiapan mekanisme VoA di Bandara SIM tentu akan memperlancar proses perizinan dari wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Aceh.

Grafik 5.16. Disagregasi Transaksi UKA



Sumber: LKPBU, diolah

Ke depannya transaksi penukaran UKA diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan dibuka kembalinya

penerbangan Internasional oleh beberapa maskapai penerbangan internasional.

Berdasarkan jenis UKA yang diperdagangkan, transaksi KUPVA BB pada triwulan laporan didominasi oleh UKA Ringgit Malaysia (MYR) sebesar 42% dan Dollar Amerika Serikat (USD) sebesar 28% (Grafik 5.16). Dominasi UKA tersebut tidak terlepas dari faktor ekspor impor, pariwisata, pendidikan, dan remitansi TKA yang mendorong terjadinya permintaan dan penawaran terhadap UKA di Provinsi Aceh.

Di samping itu, Bank Indonesia telah melaksanakan kegiatan pemantauan langsung guna melakukan penertiban dan edukasi kepada para pedagang valuta asing yang tidak berizin. Sebanyak 2 (dua) pedagang valuta asing tidak berizin telah diberikan teguran dan edukasi atas kegiatan yang mereka lakukan. Hal ini dilakukan oleh Bank Indonesia untuk terus mendorong masyarakat yang ingin menjalankan usaha penukaran valuta asing agar terlebih dahulu mengajukan proses perizinan ke Bank Indonesia.

Selain itu, Bank Indonesia bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga telah menyelenggarakan *capacity building* kepada seluruh pedagang valuta asing berizin di Provinsi Aceh. Tujuan dari *capacity building* ini adalah agar seluruh pedagang valuta asing dapat lebih memahami potensi penyalahgunaan valuta asing baik sebagai sarana pencucian uang ataupun pendanaan terorisme sekaligus menjalankan langkah mitigasi risiko tersebut. Selain itu juga dijelaskan bagaimana mekanisme pelaporan apabila terdapat transaksi yang mencurigakan melalui Sistem Informasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Dengan memahami secara lebih dalam terkait potensi yang ada dan bagaimana mekanisme pelaporannya, diharapkan kewaspadaan setiap pedagang akan lebih meningkat utamanya mengenai profil *customer*.

## 5.4. Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merupakan kondisi dimana setiap masyarakat memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Tingkat inklusi keuangan yang tinggi akan mendukung pasar keuangan yang semakin dalam dan bervariasi, sehingga dapat menurunkan risiko sistemik dan kerentanan terhadap gejolak (*shock*) dalam perekonomian.

Inklusi keuangan juga mampu berpotensi meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Masyarakat lebih mudah mengakses produk dan jasa keuangan seperti tabungan, kredit, dan investasi yang berujung pada peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Guna mendukung percepatan peningkatan inklusi keuangan, maka kehadiran lembaga keuangan formal di seluruh daerah di Aceh merupakan hal yang harus diperhatikan. Layanan lembaga keuangan formal dimaksud terdiri dari layanan perbankan termasuk ketersediaan mesin ATM dan agen bank serta layanan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) seperti pegadaian, asuransi, koperasi dan lembaga pembiayaan.

Untuk mendukung inklusi keuangan dan pemulihan ekonomi, berbagai kebijakan stimulus pemerintah terus diberikan baik dari sisi fiskal maupun moneter dengan harapan mampu menjadi sentimen positif untuk mendorong konsumsi masyarakat. Dari sisi fiskal, pemerintah mendorong konsumsi masyarakat dengan melanjutkan program bantuan sosial, subsidi token listrik, bantuan BBM, relaksasi PPnBM, dan program fiskal lainnya. Dari sisi moneter, Bank Indonesia meningkatkan BI-7DRR menjadi 4,25%, hal ini merupakan langkah *front loaded, pre-emptive, dan forward looking* untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke sasaran.

Selain itu, Bank Indonesia juga turut berperan aktif pada proses penyaluran implementasi Bantuan Sosial Non tunai (BSNT) dan Program Elektronifikasi Pembayaran untuk mendorong inklusi keuangan digital. Peranan Bank Indonesia dalam Program BSNT yang terdiri atas Program Sembako<sup>3</sup> dan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah mendukung kelancaran penyaluran bantuan secara non tunai. Dukungan diwujudkan dengan menyediakan infrastruktur, sistem, dan mekanisme pembayaran bantuan sosial. Di sisi lain, Bank Indonesia berupaya mendorong masyarakat untuk bermigrasi menggunakan sarana pembayaran non tunai dengan melakukan percepatan elektronifikasi sistem pembayaran di daerah baik sifatnya *People to Government (P to G), Government to People (G to P), People to People (P to P), dan Government to Government (G to G)*.

### Penyaluran Program Sembako dan PKH

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional

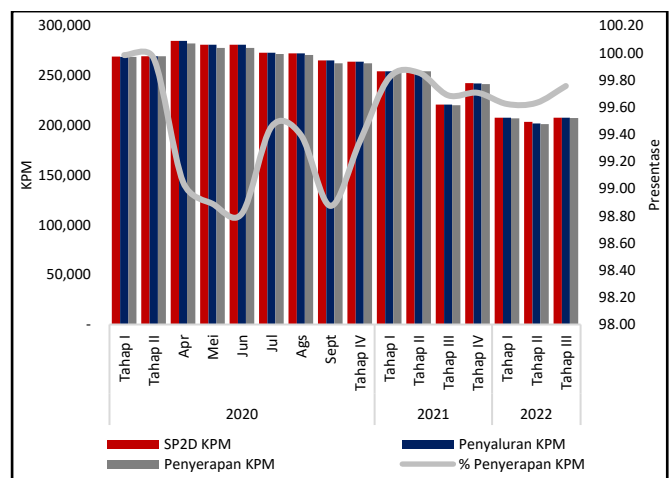
<sup>3</sup> Sejak Januari 2020, Program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) berganti nama menjadi Program Sembako. Mekanisme penyaluran tetap

Keuangan Inklusif, Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan transformasi penyaluran bantuan sosial, dari tunai menjadi non tunai dengan menggunakan sistem perbankan. Jenis bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai antara lain adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Pemerintah menyalurkan bantuan kepada masyarakat penerima bantuan atau disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KKS yang juga dikenal dengan Kartu Kombo merupakan instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang digunakan oleh KPM dalam menerima bantuan sosial. Dengan demikian, KPM yang selama ini tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal telah berubah statusnya menjadi *bankable*.

Dalam rangka mendukung kesuksesan perluasan implementasi penyaluran BSNT, Bank Indonesia juga senantiasa melakukan sosialisasi dan monitoring perluasan penyaluran bantuan sosial non tunai di Aceh. Adapun kegiatan monitoring dilaksanakan melalui pemantauan data secara *off site* maupun *on site* terhadap efektivitas/keandalan infrastruktur sistem pembayaran yang digunakan dalam penyaluran BSNT.

PKH disalurkan sebagai bagian dari jaring pengaman sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat miskin di masa pandemi. Pada triwulan laporan, bantuan PKH Tahap III tahun 2022 di Provinsi Aceh telah disalurkan sebesar 99,99% kepada KPM (Grafik 5.17). Jumlah KPM yang telah melakukan penyerapan untuk Tahap III tercatat sebanyak 207.127 atau telah mencapai 99,76% dari target jumlah penerima sebanyak 207.634 KPM.

Grafik 5.17. Perkembangan Penyaluran PKH (KPM)

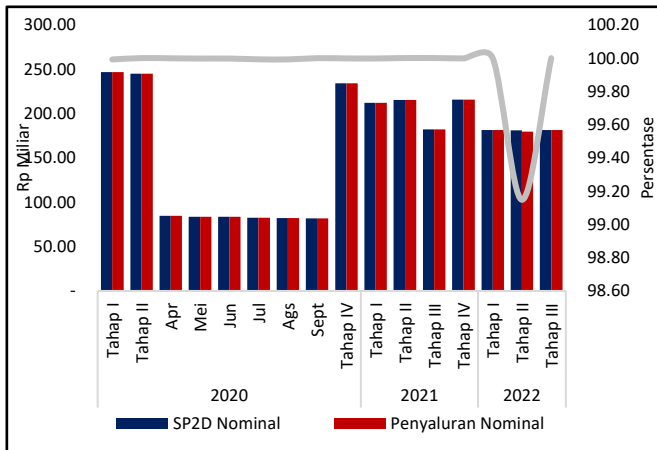


Sumber: Himbara, diolah

menggunakan kartu kombo yang diberikan kepada KPM.

Di sisi nominal, jumlah bantuan per tahap yang disalurkan selalu berfluktuasi menyesuaikan dengan data KPM yang dimutakhirkan secara berkala oleh Kemensos RI. Pada triwulan III 2022, nominal bantuan yang disalurkan pada Tahap III 2022 sebesar Rp181,48 miliar dengan persentase nominal penyaluran PKH telah mencapai 99,99% (Grafik 5.18). Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan triwulan II 2022 yaitu Rp179,46 miliar.

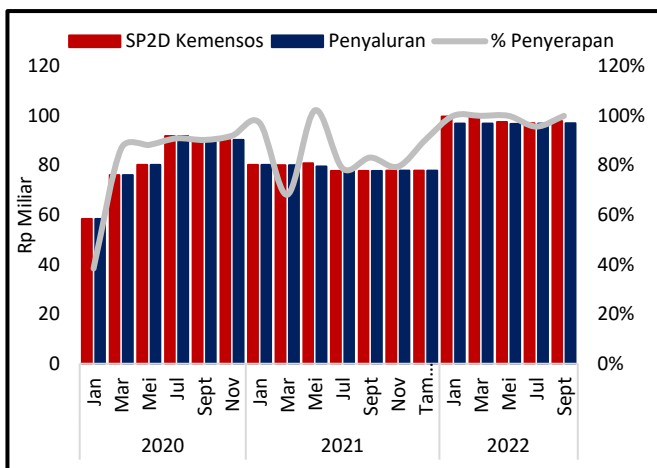
**Grafik 5.18.** Perkembangan Penyaluran PKH (Nominal)



Sumber: Himbara, diolah

Sementara itu, penyaluran bantuan Program Sembako telah diperluas ke seluruh Kab/Kota di Provinsi Aceh. Nilai bantuan program sembako yang diterima masyarakat pada awalnya ditetapkan sebesar Rp150.000/bulan/KPM. Namun berdasarkan keputusan Presiden dalam rapat terbatas penanggulangan pandemi COVID-19, nilai bantuan dinaikkan menjadi Rp200.000/bulan/KPM hingga triwulan laporan. Dalam rangka membantu meringankan dampak pandemi COVID-19, pada bulan Desember 2021 Pemerintah memberikan tambahan 2 (dua) bulan bantuan Program Sembako. Harapannya keluarga penerima manfaat mampu meningkatkan konsumsi ditengah pandemi COVID-19 yang masih melanda.

**Grafik 5.19.** Perkembangan Program Sembako (Nominal)

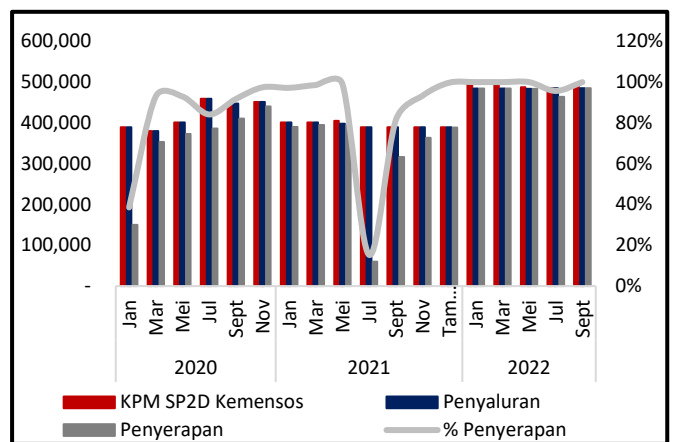


Sumber: Himbara, diolah

Sesuai hasil Rapat Tingkat Menteri (RTM) 17 Februari 2022 sebagai tindak lanjut Rapat Terbatas (Ratas) 15 Februari 2022, seluruh penyaluran Program Sembako disalurkan melalui PT Pos secara tunai/cash khususnya untuk penyaluran Januari hingga Maret 2022 yang dimulai dari Februari 2022 dan disalurkan 3 (tiga) bulan sekaligus per KPM. Untuk penyaluran bulan berikutnya, pihak penyalur akan dievaluasi dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kemenko PMK dan Kemensos. Jumlah Penyaluran untuk per bulannya pada periode dimaksud sebesar Rp40,89 miliar.

Sementara itu, jumlah KPM program sembako mengalami peningkatan menjadi 489 ribu KPM dari jumlah KPM posisi Juni sebanyak 484 ribu KPM (Grafik 5.20).

**Grafik 5.20.** Perkembangan Program Sembako (KPM)



Sumber: Himbara, diolah

## Elektronifikasi Sistem Pembayaran

Elektronifikasi sistem pembayaran merupakan serangkaian upaya untuk mengubah pembayaran yang dilakukan secara tunai menjadi non tunai. Elektronifikasi menjadi bagian program strategis Bank Indonesia yang bertujuan untuk mendorong transaksi keuangan secara elektronik agar mampu meningkatkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis sekaligus mendukung percepatan ekonomi digital di Indonesia.

Sasaran utama program elektronifikasi adalah penciptaan ekosistem non tunai yang terintegrasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah, transaksi pembayaran ritel dan nilai besar, transaksi fasilitas dan transportasi umum, serta elektronifikasi di destinasi pariwisata. Instrumen yang dapat digunakan meliputi Uang Elektronik (*server* dan *chip based*), kartu kredit, dan kartu ATM/debit.

Pada triwulan laporan, Bank Indonesia telah melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan akseptasi masyarakat dan *stakeholders* terhadap berbagai fitur pembayaran non tunai, khususnya melalui kanal QRIS. Pekan QRIS Nasional merupakan salah satu kegiatan

*flagship* yang dilakukan serentak di seluruh Provinsi di Indonesia termasuk Aceh. Pada kegiatan tersebut Bank Indonesia berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah, Perbankan, dan Komunitas UMKM menyelenggarakan kampanye penggunaan QRIS yang dikemas dengan kegiatan *showcase* UMKM QRIS, sosialisasi dan edukasi, *user experience*, dan hiburan.

Pada kegiatan tersebut juga dilakukan *launching* 3 Pasar SIAP QRIS yang terdapat di Kota Banda Aceh, yaitu Pasar Seutui, Peuniti, dan Gampong Baru. Program ini merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia, Perbankan, dan Diskopukmdag melalui UPTD Pasar dalam melaksanakan elektronifikasi pada sendi sendi ekonomi masyarakat. Dengan adanya pasar SIAP QRIS kini seluruh pengunjung pasar memiliki alternatif metode pembayaran non tunai.

Dari sektor transportasi, perluasan penggunaan QRIS juga menasar lingkungan bandara yang merupakan gerbang utama keluar masuknya masyarakat ke provinsi Aceh. Bank Indonesia bekerja sama dengan pengelola Bandara telah melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh mitra bandara. Dampaknya kini pengunjung bandara telah dapat melakukan pembayaran non tunai pada *merchant* yang terdapat di bandara, seperti kafe dan taksi bandara.

Elektronifikasi di lingkungan bandara tidak terbatas pada penggunaan QRIS saja, Angkasa Pura II sebagai pengelola bandara juga mendorong penggunaan uang elektronik di lingkungan bandara. Saat ini pembayaran parkir di lingkungan bandara sudah tidak menerima uang tunai, dan hanya menerima Uang Elektronik sebagai penggantinya. Metode pembayaran ini selain mendukung program pemerintah yaitu Gerakan Nasional Non Tunai juga dapat mempercepat proses transaksi pembayaran. Semakin berkembangnya produk dan layanan dari perbankan syariah di Provinsi Aceh, termasuk ketersediaan uang elektronik dan infrastruktur pendukungnya, turut mendorong pertumbuhan ekosistem pembayaran non tunai di Provinsi Aceh.

Seluruh kegiatan di atas merupakan langkah proaktif Bank Indonesia dalam memfasilitasi pelaku UMKM ataupun *stakeholders* lainnya dengan PJP dalam rangka meningkatkan *supply side* QRIS melalui akuisisi *merchant* QRIS. Di samping itu, Bank Indonesia bersama Perbankan dan Pemda juga terus melakukan berbagai program sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan *user experience* masyarakat dalam menggunakan QRIS sehingga *demand side* masyarakat untuk menggunakan QRIS juga terus bertumbuh.

Bank Indonesia juga secara proaktif melakukan koordinasi bersama dengan Pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten terkait dengan Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Pembentukan TP2DD merupakan amanat Keputusan Presiden No 3 Tahun 2021 tentang Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang bertujuan untuk mendorong inovasi, mempercepat, dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi. Harapannya pembentukan TP2DD akan menjadi katalis di daerah untuk mendorong perluasan elektronifikasi sarana/fasilitas umum, termasuk pendapatan daerah baik pajak dan retribusi.

Terkait infrastruktur jaringan telekomunikasi yang menjadi faktor penting dalam program elektronifikasi, masih terdapat beberapa daerah yang masuk dalam area titik buta (*blankspot area*) yang belum terjangkau teknologi informasi, sehingga pemanfaatan kanal pembayaran masih sangat terbatas. Ke depan, Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah Daerah serta PJP akan terus melakukan upaya konkrit dan terkoordinasi untuk mewujudkan elektronifikasi sistem pembayaran yang terintegrasi sesuai dengan wewenang masing-masing instansi. Di sisi elektronifikasi sistem pembayaran ritel masyarakat umum, Bank Indonesia akan tetap terus mendorong digitalisasi transaksi melalui penggunaan instrumen UE dan APMK serta kanal pembayaran QRIS melalui berbagai kegiatan edukasi, sosialisasi, dan program *on-boarding*.





## BAB VI

# KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode berjalan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Begitupula halnya dengan aspek kemiskinan yang juga menunjukkan penurunan. Jika dibandingkan dengan seluruh provinsi di Sumatera, TPT Aceh berada pada urutan keempat sedangkan kemiskinan berada pada peringkat pertama.

## 6.1. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Aceh menurun. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh pada Agustus 2022 tercatat 6,17%, mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (6,30%). Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tercatat 63,50%, menurun sebesar 0,28 persen poin dibandingkan periode Agustus 2021 menunjukkan semakin rendah pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam satu perekonomian.

Lapangan pekerjaan mengalami peningkatan kontribusi penyerapan tenaga kerja dari persentase terbesar dari Lapangan usaha (LU) yang mengalami peningkatan adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Konstruksi dan Jasa Lainnya.

Tabel 6. 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

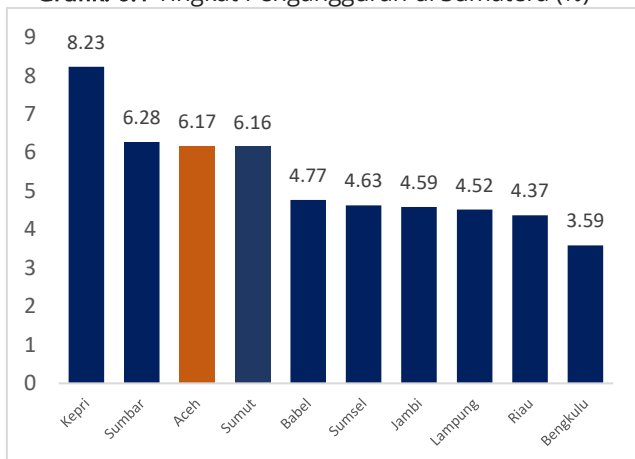


TINGKAT PENGANGGURAN %	
Agustus 2021	6,30
Agustus 2022	6,17

Sumber: Data BPS, diolah

Penurunan TPT disebabkan oleh meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak disertai dengan peningkatan jumlah Angkatan kerja yang bekerja. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan Angkatan kerja yaitu 2.5 juta orang (64,15%).

Grafik. 6.1 Tingkat Pengangguran di Sumatera (%)



Sumber: BPS, diolah

Jika dibandingkan dengan daerah lain di Pulau Sumatera, Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh menduduki peringkat ketiga tertinggi setelah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sumatera Barat.

Perkembangan ketenagakerjaan yang tercermin dari ketersediaan lapangan kerja cenderung mengalami penurunan. Kondisi tersebut tercermin dari hasil *liaison* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh pada triwulan III 2022 yang menunjukkan adanya penurunan penyerapan tenaga kerja secara agregat. Hal tersebut sejalan dengan survei konsumen yang dilakukan Bank Indonesia yang menunjukkan adanya penurunan Indeks Keyakinan Konsumen terhadap tingkat ketersediaan lapangan pekerjaan dibandingkan periode sebelumnya.

Kedepannya, diperkirakan indeks keyakinan konsumen akan Ketersediaan Lapangan Kerja terus membaik dikarenakan perbaikan ekonomi dan mobilisasi pasca Pandemi Covid-19.

Tabel 6. 2. Perkembangan TPT

PENGANGGURAN	2021	2022
	Agustus	Agustus
<b>Jumlah Angkatan Kerja (orang, dalam ribuan)</b>		
Bekerja	2.361	2.395
Pengangguran	159	158
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)</b>		
Persentase TPAK (%)	67,80	68,63
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>		
TPT (%)	6,30	6,17

Sumber: Data BPS, diolah

Lapangan usaha (LU) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan beserta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja dengan porsi terbesar yaitu masing-masing 28,61% dan 19,36%. Selanjutnya sektor industri pengolahan menyerap tenaga kerja sebesar 14,17% yang diikuti oleh Lapangan usaha (LU) Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,10%. Penyerapan tenaga kerja terbesar

kelima berada pada sektor Konstruksi (6,27%).

**Tabel 6.3.** Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor

SEKTOR	Agustus 2022 (%)
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	28,61
Perdagangan Besar & Eceran	19,36
Industri Pengolahan	14,17
Akomodasi dan Makan Minum	7,10
Konstruksi	6,27
Jasa Pendidikan	4,81
Jasa Lainnya	4,46
Transportasi	4,29

Sumber: Data BPS, diolah

Tenaga kerja di Provinsi Aceh saat ini didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan sekolah dasar ke bawah. Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2022, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 38,80 persen. Sementara itu, penduduk bekerja tamatan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 12,32 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2021.

**Tabel 6.4.** Tenaga Kerja Menurut Pendidikan (%)

Pendidikan Tertinggi	Agustus 2021	Agustus 2022
Sekolah Dasar ke Bawah	37,69	38,80
Sekolah Menengah Atas	18,87	19,53
Sekolah Menengah Pertama	17,76	17,54
Sekolah Menengah Kejuruan	12,86	11,81
Diploma IV, S1, S2, S3	10,18	9,87
Diploma I/II/III	2,64	2,45

Sumber: Data BPS, diolah

Bila dilihat berdasarkan penduduk bekerja paling banyak yaitu Buruh/Karyawan/Pegawai menyerap tenaga kerja dengan porsi terbesar sekitar 37,66%. Sementara itu yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar sebanyak 3,04%. Berdasarkan status pekerjaan utama,

penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal. Pada Agustus 2022, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 59,31%, sedangkan kegiatan formal sebanyak 40,69% yang dimana jika dibandingkan dengan periode sebelumnya kedua kegiatan tersebut mengalami peningkatan.

**Tabel 6.5.** Tenaga Kerja Berdasarkan Pekerjaan

Status Pekerjaan	Agustus 2021	Agustus 2022
	Porsi (%)	Porsi (%)
Buruh/Karyawan/Pegawai	37,46	37,66
Berusaha Sendiri	20,78	22,04
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	14,70	14,62
Pekerja Keluarga	13,68	13,08
Pekerja bebas di nonpertanian	5,86	5,43
Pekerja bebas di pertanian	4,43	4,13
Berusaha dibantu buruh tetap	3,09	3,04

Sumber: Data BPS, diolah

Nilai Tukar Petani<sup>4</sup> pada akhir triwulan III 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan III 2022, Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat sebesar 106,65 mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Turunnya nilai NTP dibanding triwulan sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat daya beli petani melemah. Pada triwulan laporan yang melampaui 100 menunjukkan bahwa penerimaan petani terhadap hasil produksi lebih tinggi dibandingkan pengeluaran petani. Peningkatan NTP utamanya bersumber dari subsektor perkebunan rakyat dan perikanan. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) subsektor gabungan Pada triwulan III 2022 tercatat sebesar 107,92 atau mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 106,69. NTUP

<sup>4</sup> Rasio antara indeks harga diterima dan harga dibayar petani

menggambarkan kerugian yang diperoleh Petani dari selisih antara indeks harga pengeluaran yang terkait dengan keperluan produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) dengan indeks harga yang diterimanya. NTUP di atas 100 menunjukkan bahwa petani berada dalam posisi surplus.

Tabel 6.6. Nilai Tukar Petani



### NILAI TUKAR PETANI (NTP)

Triwulan II 2022	105,73
Triwulan III 2022	106,65

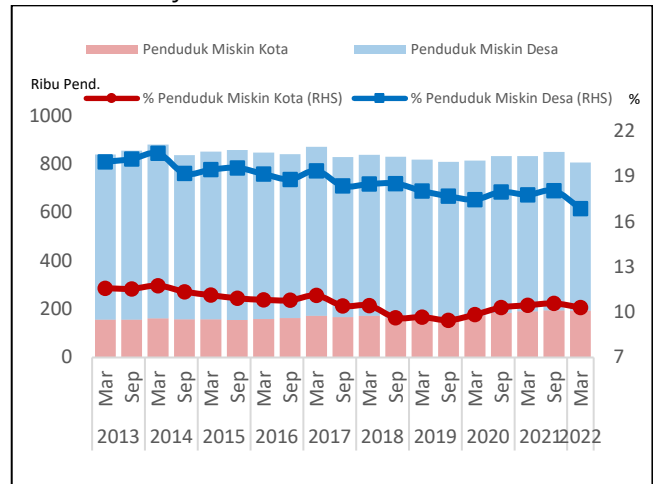
Sumber: Data BPS, diolah

## 6.2. Kemiskinan

Posisi persentase kemiskinan berdasarkan data terakhir yakni Maret 2022, mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu dari 15,33% menjadi 14,64% dan merupakan persentase kemiskinan terendah sejak tahun 2017. Penurunan persentase penduduk miskin tersebut didorong oleh penurunan yang terjadi baik di pedesaan ataupun di perkotaan. Penduduk miskin di pedesaan secara persentase pada periode laporan mengalami penurunan sebesar 1,17% menjadi 16,87% setelah pada periode sebelumnya tercatat secara persentase sebesar 18,04%. Selain itu, terjadi penurunan pula pada persentase kemiskinan di daerah perkotaan yang turun 0,27%. Pada periode laporan, persentase kemiskinan perkotaan 10,31% setelah sebelumnya sebesar 10,58%.

Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh pada Maret 2022 sebanyak 806,82 ribu jiwa, berkurang dibandingkan dengan periode Maret 2021 yaitu sebanyak 834,24 ribu jiwa atau turun 3,28% (yoy). Jumlah penduduk miskin di perkotaan meningkat 1,52% (yoy) dari sejumlah 190.43 ribu jiwa pada periode sebelumnya menjadi 193.32 ribu jiwa. Lain halnya dengan persentase penduduk miskin di pedesaan yang mengalami penurunan. Pada Maret 2022 tercatat jumlah penduduk miskin sebanyak 613.49 ribu jiwa atau berkurang 4,71% (yoy) dari periode sebelumnya yang mencapai 643.81 ribu jiwa.

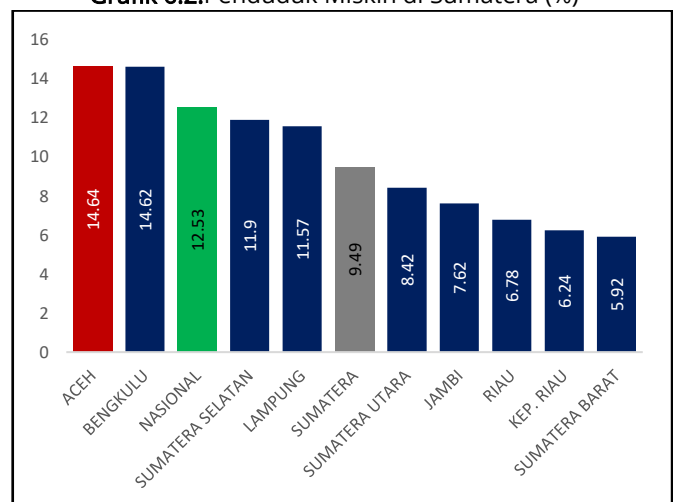
Grafik 6. 1. Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota



Sumber: Data BPS, diolah

Kondisi pandemi Covid-19 yang kian membaik menjadi faktor pendorong pemulihan ekonomi di Aceh yang salah satunya tercermin dari jumlah kemiskinan yang berkurang. Berdasarkan hasil survei konsumen Bank Indonesia, Indeks Penghasilan dan Ketersediaan Lapangan Pekerjaan berada di atas 100 per Juli 2022, yang mana menandakan masyarakat optimis akan pendapatan dan ketersediaan lapangan pekerjaan di 6 bulan mendatang. Dari 10 provinsi di Sumatera, Aceh merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi dengan tingkat kemiskinan pada Maret 2022 mencapai 14,46%. Persentase ini lebih tinggi dibanding rerata tingkat kemiskinan di Sumatera (9,49%) dan Nasional (12,53%).

Grafik 6.2. Penduduk Miskin di Sumatera (%)



Sumber: Data BPS, diolah

Berdasarkan hasil survei di Provinsi Aceh, pada periode September 2021 - Maret 2022, garis kemiskinan meningkat sebesar 4,75%, yaitu dari

Rp552.939,- per kapita per bulan menjadi Rp579.227,- per kapita per bulan. Pada Maret 2022, garis kemiskinan secara total sebesar Rp579.227,- per kapita per bulan. Kontribusi komponen makanan sebesar Rp438.658,- per kapita per bulan dan komponen bukan makanan sebesar Rp140.570,- per kapita per bulan.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditas makanan (75,73%) masih mendominasi dibandingkan dengan peranan komoditas bukan makanan (24,26%) yang terdiri dari perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Beberapa komoditas utama yang memberikan sumbangan besar terhadap kenaikan garis kemiskinan baik di pedesaan maupun di perkotaan yaitu beras, rokok kretek filter, tongkol/tuna, telur ayam ras, dan kue basah. Persoalan kemiskinan tidak hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi yang juga perlu diperhatikan seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (tingkat kedalaman) yang disebut sebagai P1 dan keragaman pengeluaran antar penduduk miskin (tingkat keparahan) yang disebut dengan (P2).

**Tabel 6.7.** Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahannya (P2) Kemiskinan

KEMISKINAN (%)	
MARET 2021	15,33
MARET 2022	14,64
<b>INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)</b>	
MARET 2021	2,86
MARET 2022	2,48
<b>INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)</b>	
MARET 2021	0,75
MARET 2022	0,61

Sumber: Data BPS, diolah

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) pada periode Maret 2022 tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya (yoy). P1 mengalami penurunan dari 2,86% pada

Maret 2021 menjadi 2,48% pada Maret 2022. Begitupula halnya dengan P2, P2 mengalami penurunan setelah sebelumnya berada pada 0,75% pada Maret 2021 menjadi 0,61% pada periode laporan. Turunnya nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Begitu juga dengan kondisi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin cenderung semakin menyempit.

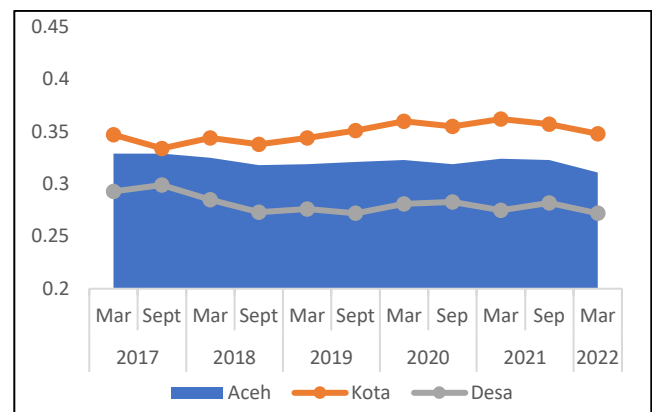
**Tabel 6.8.** Indeks Kemiskinan (P1 dan P2)

Daerah	2021		2022	
	MARET		MARET	
	P1	P2	P1	P2
Perkotaan	1,79	0,46	1,62	0,37
Pedesaan	3,40	0,89	2,93	0,73
<b>Gabungan</b>	<b>2,86</b>	<b>0,75</b>	<b>2,48</b>	<b>0,61</b>

Sumber: Data BPS, diolah

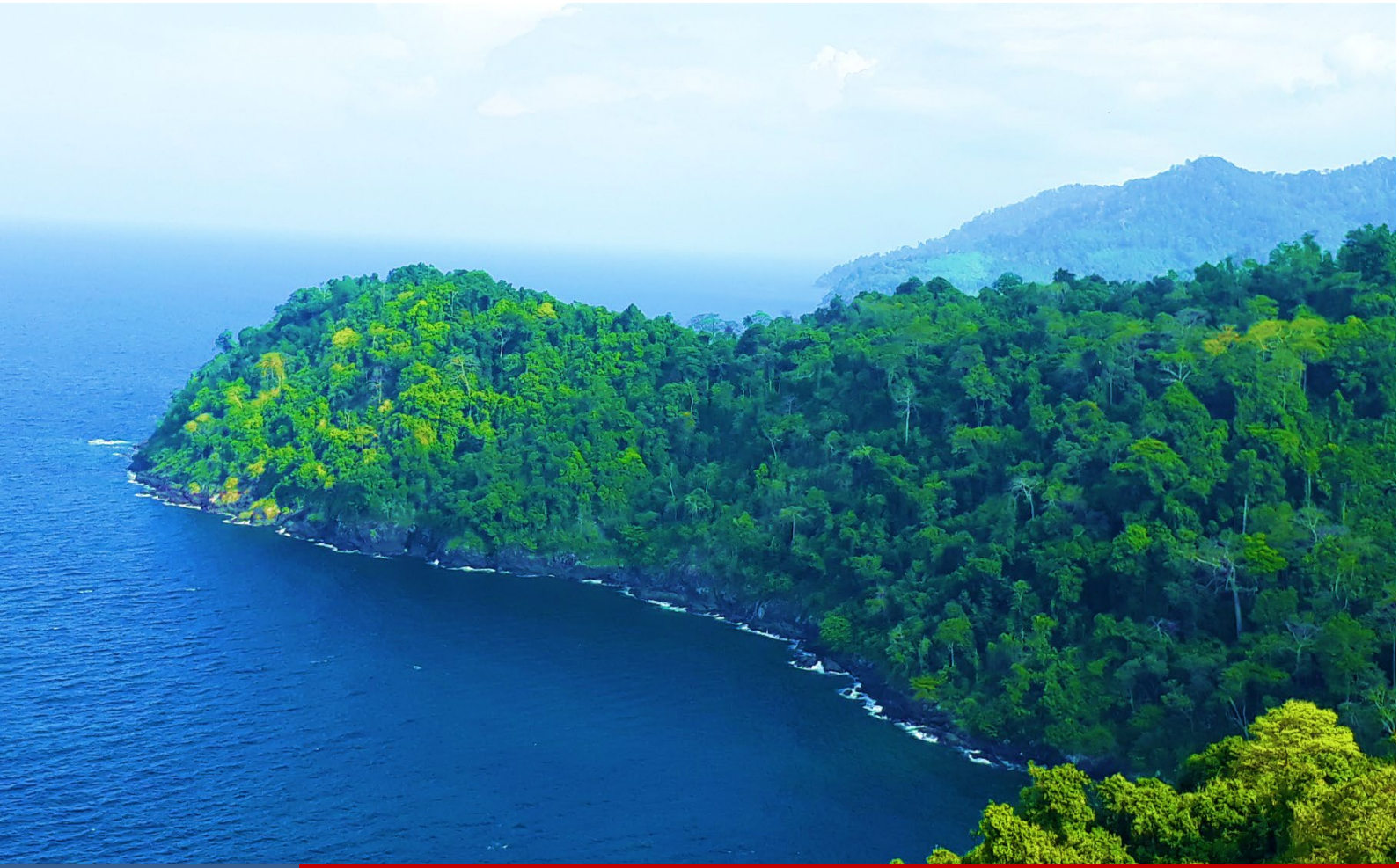
Dalam pengukuran ketimpangan kemiskinan, digunakan indikator Rasio Gini<sup>5</sup>. Berdasarkan daerah, Rasio Gini pada perkotaan pada Maret 2022 berada pada 0,348, sedangkan pada pedesaan berada pada 0,272. Terjadi penurunan rasio di perkotaan dan pedesaan pada periode Maret 2022 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Hal tersebut mendorong secara keseluruhan Rasio Gini Provinsi Aceh mengalami penurunan menjadi 0,311 pada Maret 2022 setelah berada pada 0,319 pada tahun sebelumnya.

**Grafik 6.3.** Perkembangan Rasio Gini di Provinsi Aceh Menurut Daerah



Sumber: Data BPS, diolah

<sup>5</sup>Nilai Rasio Gini berkisar antara 0-1. Semakin besar nilai menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi



## BAB VII

# PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

---

Kinerja perekonomian Aceh pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh 2,83%-3,63%(yoy) atau lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (2,79%, yoy). Kondisi tersebut utamanya diperkirakan oleh perbaikan konsumsi rumah tangga dan investasi. Laju inflasi tahun 2022 diperkirakan berada di atas sasaran inflasi nasional sebesar  $3\pm 1\%$ , dengan perkiraan peningkatan inflasi didorong oleh komponen *administered prices* dan *volatile foods*.

## 7.1. Prospek Makroekonomi

Kinerja pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022 diperkirakan akan tumbuh positif meskipun dengan kecenderungan lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Berdasarkan *World Economic Outlook "Countering the Cost-of-Living Crisis"* oleh International Monetary Fund (IMF) pada bulan Oktober 2022, perekonomian global tahun 2022 diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,2% (yoy) (Tabel 7.1). Pertumbuhan ekonomi untuk negara maju dan berkembang diperkirakan mengalami perlambatan, terutama untuk negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Inggris.

Aktivitas ekonomi global mengalami perlambatan yang lebih luas dan lebih tajam dari perkiraan, dengan inflasi yang lebih tinggi dari yang terlihat dalam beberapa dekade. Krisis biaya hidup, pengetatan kondisi keuangan di sebagian besar wilayah, invasi Rusia ke Ukraina, dan pandemi COVID-19 yang berkepanjangan semuanya sangat membebani prospek pertumbuhan ekonomi. Berbagai negara terutama Amerika Serikat merespons peningkatan inflasi tersebut dengan pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif sehingga menahan pemulihan dan meningkatkan risiko stagflasi.

**Tabel 7.1** *Global Economic Growth Outlook (% ,yoy)*

Wilayah	2021	2022*	2023*
World Output	6,0	3,2	2,7
Advance Economies	5,2	2,4	1,1
United States	5,7	1,6	1,0
Euro Area	5,2	3,1	0,5
Japan	1,7	1,7	1,6
United Kingdom	7,4	3,6	0,3
Emerging Market	6,6	3,7	3,7
China	8,1	3,2	4,4
India	8,7	6,8	6,1
ASEAN-5	3,4	5,3	4,9

Sumber: *International Monetary Fund (IMF)*

**Momentum perbaikan ekonomi nasional diperkirakan berlanjut pada tahun 2022,**

meskipun dampak perlambatan ekonomi global perlu diwaspadai. Perkembangan perekonomian domestik terakselerasi oleh kinerja ekspor luar negeri yang meningkat, perbaikan konsumsi rumah tangga dan investasi yang terus berlanjut. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi domestik ditopang oleh sektor transportasi dan pergudangan, industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Sejumlah indikator terkini di tahun 2022 tercatat baik seperti keyakinan konsumen, mobilitas masyarakat, penjualan eceran, serta *Purchasing Managers' Index (PMI)* manufaktur yang mengindikasikan terus berlangsungnya proses pemulihan ekonomi domestik. Perekonomian domestik diperkirakan akan tetap tumbuh dengan kecenderungan yang lebih rendah dalam rentang 4,80-5,60% (yoy) pada tahun 2022. Kedepan, perbaikan perekonomian domestik didukung oleh peningkatan mobilitas dan aktivitas dunia usaha. Meskipun demikian, perlambatan ekonomi global dapat berpengaruh pada kinerja ekspor luar negeri dan kenaikan inflasi.

**Pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh 2,83%-3,63% (yoy), lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang tumbuh 2,79% (yoy).** Hal ini didorong oleh pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat yang tercermin dari peningkatan mobilitas seiring dengan meredanya pandemi COVID-19 di Aceh. Dari sisi pengeluaran, perbaikan kinerja ekonomi diperkirakan didorong oleh komponen konsumsi rumah tangga, total net ekspor, dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB). Sedangkan dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertambangan dan penggalian, perdagangan serta transportasi diyakini akan menjadi pendorong laju pertumbuhan dari sisi LU.

Meningkatnya pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat. Langkah pemerintah yang sudah mulai melakukan vaksinasi massal mulai awal tahun 2021 dan berlanjut pada 2022, sudah terlihat mampu mendongkrak aktivitas dan mobilitas masyarakat

dan diikuti oleh tingkat belanja yang lebih tinggi. Selain itu, berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia Provinsi Aceh pada November 2022 mengindikasikan bahwa optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi mengalami peningkatan. Hal tersebut seiring dengan melandainya kasus COVID-19 di Provinsi Aceh pada beberapa bulan terakhir dan didukung oleh optimisme perekonomian secara nasional. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada bulan November 2022 tercatat sebesar 107,9 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Lebih lanjut, perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) melanjutkan tren perbaikan masih dari triwulan sebelumnya. Nilai Tukar Petani pada Oktober 2022 adalah sebesar 109,48 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 109,04.

Di sisi lain, kinerja komponen konsumsi pemerintah pada 2022 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, berdasarkan informasi dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Aceh, terdapat penurunan pagu anggaran baik anggaran yang bersumber dari APBD maupun APBN. Berdasarkan Qanun No.1 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022, rencana anggaran belanja Aceh 2022 sebesar Rp16,17 triliun lebih rendah jika dibandingkan anggaran belanja pada tahun 2021 yang sebesar Rp16,76 triliun. Defisit anggaran juga diperkirakan meningkat menjadi Rp2,82 triliun dari sebelumnya sebesar Rp2,58 triliun pada tahun 2021. Di sisi lain, pada tahun 2022 diperkirakan intensitas serta nominal *refocusing* tidak setinggi pada tahun 2021 sehingga diperkirakan mendorong kinerja pada 2022. Berdasarkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), realisasi belanja negara pada Triwulan III lebih rendah apabila dibandingkan dengan proyeksi awal. Terdapat deviasi sebesar minus Rp674,37 miliar atau -6,41 persen. Pada triwulan IV, belanja negara akan terealisasi sebesar Rp47,18 triliun yang terdiri dari BPP senilai Rp14,84 triliun dan Rp32,34 triliun. Pada akhir triwulan IV 2022 nanti total pendapatan dan belanja negara

diproyeksikan masing-masing senilai Rp6,62 triliun dan Rp47,18 triliun. Secara persentase, pendapatan negara terealisasi sebesar 114,57 persen sementara belanja negara terealisasi sebesar 97,18 persen.

Kinerja PMTB/investasi pada 2022 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun 2021. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Aceh, target realisasi investasi mengalami kenaikan sebesar 9,77% menjadi Rp7,3 triliun dari sebelumnya Rp6,55 triliun di tahun 2021. Realisasi investasi pada 2022 diperkirakan didorong oleh proyek PLTU 3 dan 4 di Nagan Raya, pabrik pupuk NPK oleh PT Pupuk Iskandar Muda, PLTA 1 dan 2 di Peusangan, Jalan tol trans sumatera (JTTS) ruas Banda Aceh – Sigli, Pabrik CPO di Aceh Barat Daya (baru diresmikan PT Mon Jambe) serta Kawasan Industri/Berikat di Krueng Raya yang sedang dalam tahap konstruksi. Realisasi investasi PMA dan PMDN pada triwulan III 2022 mencapai Rp1,20 triliun, turun sebesar 39,05% (yoy). Dengan realisasi tersebut, prospek secara keseluruhan tahun 2022 dapat menjadi lebih rendah dari perkiraan awal meskipun secara keseluruhan tahun masih lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, terdapat beberapa potensi kendala yang dapat menghambat realisasi investasi pada 2022, antara lain; 1. Penguasaan lahan dalam bentuk HGB terlalu singkat (1 atau 3 tahun) sehingga menghambat perusahaan untuk mendapatkan pinjaman modal/kredit dari Perbankan (*unbankable*), 2. Munculnya varian baru COVID-19 berpotensi mempersulit kedatangan kontraktor dari luar negeri (India), 3. Terlambatnya penandatanganan *power purchase agreement* (PPA) menahan investor PLTA memulai konstruksinya.

Sementara itu, ekspor luar negeri secara keseluruhan tahun 2022 diperkirakan mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2021 yang tumbuh sebesar 48,19% (yoy). Hal ini diperkirakan didorong oleh normalisasi harga komoditas ekspor utama Aceh seperti batu bara, kopi, dan minyak kelapa sawit.

Berdasarkan proyeksi harga komoditas dunia yang dirilis oleh Bank Dunia, harga batu bara pada 2022 berpotensi mengalami penurunan menjadi USD 120/ton dari USD 140/ton pada tahun 2021. Harga kopi arabika juga diprediksi mengalami penurunan menjadi USD 4,20/kg dari USD 4,30 /kg pada tahun 2021. Lebih lanjut, harga CPO diproyeksi mengalami penurunan menjadi USD 1.075/ton dari USD 1.100/ton pada tahun 2021.

Dari sisi LU, perkiraan akselerasi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 utamanya didorong oleh positifnya kinerja LU Pertambangan, Perdagangan, dan Transportasi dan Pergudangan. Secara umum proyeksi kinerja positif pada LU tersebut disebabkan oleh membaiknya perekonomian dunia serta normalisasi aktivitas masyarakat sejalan dengan langkah pemerintah melakukan vaksinasi masal COVID-19 di tahun 2021 dan berlanjut di tahun 2022. Faktor penahan pertumbuhan berasal dari lapangan usaha konstruksi dan pertanian. Lapangan Usaha Konstruksi diperkirakan berkontraksi secara tahunan, disebabkan oleh realisasi proyek pemerintah dan swasta yang lebih rendah. Lapangan Usaha Pertanian, kontraksi akibat produksi padi yang lebih rendah dan produksi tanaman perkebunan mengalami penurunan karena harga pasar turun sehingga harga produksi atau perawatan lebih tinggi dari harga pasar.

Dari sisi kinerja LU Pertambangan dan Penggalian, diperkirakan akan lebih baik dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang berkontraksi sebesar -0,95% (yoy). Prospek sektor pertambangan dan penggalian yang lebih baik ditopang oleh cuaca yang kondusif dan larangan ekspor yang sudah dicabut mendukung pertumbuhan produksi batu bara. Dari sisi migas, produksi diperkirakan kembali meningkat setelah beroperasi kembalinya salah satu perusahaan energi yang beroperasi di Aceh. Lebih lanjut, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menyampaikan kegiatan eksplorasi minyak dan gas (migas) di laut Andaman atau 40 mil dari garis pantai Pidie Jaya (Pijay), Pidie, dan Bireuen. Di mana kegiatan pengeboran migas akan dimulai Mei 2022 pada sumur Timphan-1

pada Wilayah Kerja (WK) Andaman II oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Premier Oil sebagai operator di bawah pengawasan SKK Migas.

Selanjutnya, Lapangan Usaha Perdagangan diperkirakan akan relatif stabil dengan tahun lalu yang tumbuh sebesar 4,23% (yoy). Perkiraan pertumbuhan yang masih positif didukung oleh pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat yang tercermin dari peningkatan mobilitas akibat pelonggaran pembatasan sosial. Pada September 2022, mobilitas masyarakat mengalami peningkatan terutama di sektor retail dan pusat perbelanjaan. Sektor retail tumbuh sebesar 18% dibandingkan dengan *baseline*, lebih lanjut, sektor pusat perbelanjaan dan farmasi mengalami kenaikan yang tinggi sebesar 44%. Meskipun demikian, terdapat faktor penahan pertumbuhan yang berasal dari kenaikan harga BBM.

Sementara itu dari sisi Transportasi dan Pergudangan, diperkirakan akan melanjutkan peningkatan dari tahun sebelumnya meskipun tidak sebesar realisasi pada tahun 2021. Pada tahun 2021, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mampu tumbuh sebesar 19,51% (yoy). Kinerja yang diperkirakan positif pada 2022 tersebut sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan tren infeksi COVID-19 yang masih melandai pada beberapa bulan terakhir di Aceh. Berdasarkan data *google mobility index*, sampai dengan Bulan September, mobilitas masyarakat pada stasiun transit meningkat sebesar 5% dibandingkan *baseline*. Dari sisi angkutan udara, tren peningkatan penerbangan domestik diperkirakan akan masih berlanjut di tahun 2022, didukung juga dengan pelonggaran syarat penerbangan udara yang tidak lagi mensyaratkan screening COVID-19 jika telah menerima vaksin booster. Lebih lanjut, adanya pembukaan penerbangan Citilink dan Airasia rute Banda Aceh – Medan juga mendukung kinerja lapangan usaha. Dari sisi pergudangan, dengan meningkatnya *trend* belanja *online* dan pengiriman kargo diperkirakan dapat mendongkrak industri kargo dan pergudangan.

Hal ini juga terkonfirmasi dari laporan salah satu pelaku bisnis pengiriman kargo dan pergudangan yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2022 dan diperkirakan akan berlanjut di tahun 2023.

Prospek pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diperkirakan akan sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sejalan dengan perlambatan ekonomi global dan domestik. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan dalam rentang 2,80-3,60% (yoy). Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga diperkirakan akan sedikit tertahan yang bersumber dari kenaikan suku bunga acuan dan risiko inflasi meskipun diperkirakan akan lebih rendah. Dari sisi Konsumsi Pemerintah, terdapat risiko penurunan akibat turunnya alokasi dana otonomi khusus. Selanjutnya dari komponen Investasi/PMTB diperkirakan akan stabil atau sedikit menurun, disebabkan oleh proyek pemerintah dan swasta yang diperkirakan lebih rendah. Menurut Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), direncanakan tidak ada Proyek Strategis Nasional (PSN) baru di 2023 dan berfokus pada penyelesaian proyek *existing*.

## 7.2. Prospek Inflasi

Berdasarkan perkiraan dari The International Monetary Fund (IMF), Inflasi global diperkirakan meningkat dari 4,7% (yoy) pada 2021 menjadi 8,8% (yoy) pada 2022, meskipun demikian inflasi akan kembali menurun menjadi 6,5% (yoy) pada 2023. Inflasi masih didorong oleh kenaikan harga pada komoditas pangan dan energi akibat dampak konflik global. Sejalan dengan kenaikan inflasi global, inflasi domestik diperkirakan akan berada diatas target inflasi dalam rentang 5,21-6,01% (yoy). Namun, tekanan inflasi domestik diperkirakan akan mereda pada tahun 2023.

**Secara keseluruhan tahun 2022, laju inflasi Aceh diperkirakan akan berada di atas sasaran inflasi nasional sebesar  $3\pm 1\%$  (yoy).** Realisasi inflasi tahun kalender sampai dengan periode Oktober 2022 telah mencapai 5,05% (ytd). Secara umum,

kenaikan inflasi didorong oleh peningkatan daya beli masyarakat seiring dengan lancarnya mobilitas masyarakat yang sempat tertahan akibat pandemi COVID-19 sebelumnya serta kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Secara disagregasi, inflasi diperkirakan akan lebih didorong oleh komoditas *volatile food* dan *administered prices*. Dari sisi komoditas *volatile food*, Pembatasan sosial yang telah ditiadakan diperkirakan akan meningkatkan mobilitas dan permintaan masyarakat akan komoditas terutama pangan. Selain itu, risiko cuaca buruk dan gelombang laut yang tinggi akan berdampak pada tangkapan yang komoditas perikanan. Lebih lanjut, penerapan HPP yang berimbas pada naiknya PPN serta risiko *spillover* konflik eropa diperkirakan akan semakin memperkuat peningkatan inflasi pada *volatile foods*.

Dari sisi *administered prices*, Pemerintah telah menetapkan rata-rata kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) pada 2022 sebesar 12%. Selanjutnya, PT Pertamina (persero) kembali menaikkan harga gas elpiji nonsubsidi menjadi Rp 17.750/kg. Terdapat penyesuaian TDL dengan besaran 17,62% untuk daya listrik 3300VA keatas. Kenaikan harga BBM Pertamina menjadi Rp 12.500, serta kenaikan Peralite menjadi Rp 10.000/liter seiring kenaikan harga minyak dunia.

Dari sisi *core inflation*, Inflasi inti diperkirakan akan bergerak ke atas sejalan dengan peningkatan harga emas akibat ketidakpastian global pada varian omicron maupun konflik eropa. Selanjutnya, permintaan atas sewa rumah diperkirakan meningkat seiring dengan pembatasan sosial yang berkurang sehingga mendukung pembelajaran tatap muka. Lebih lanjut, terdapat penyesuaian harga pasca kenaikan BBM (*Second round effect*) kenaikan BBM. Meskipun demikian, kenaikan yang lebih tinggi diperkirakan akan terbatas akibat respon kebijakan Bank Indonesia yang telah menaikkan suku bunga acuan BI *7 days reverse repo rate* (BI7DRR) 50 basis point menjadi 5,25% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia

November 2022.

Inflasi Aceh pada 2023 diperkirakan mereda jika dibandingkan dengan tahun 2022. Sejumlah program Pemerintah Aceh, Pusat, serta Bank Indonesia diperkirakan mampu meredam gejala kenaikan harga terutama bahan pangan. Kenaikan suku bunga acuan BI *7 days reverse repo rate* (BI7DRR) diperkirakan akan masih terjadi dan diperkirakan mampu menurunkan tekanan inflasi inti. Sehingga secara keseluruhan tahun 2023, inflasi Aceh diperkirakan berada di batas atas sasaran inflasi Nasional.

### 7.3. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kondisi ekonomi Aceh yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa rekomendasi terkait upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi sebagai berikut:

#### Pertumbuhan Ekonomi

1. **Mengurangi tingginya angka kemiskinan Aceh serta peningkatan serapan tenaga kerja** melalui langkah taktis replikasi *piloting* pengembangan kelompok subsisten melalui sinergi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan pemangku kebijakan terkait lainnya. Terdapat beberapa tahapan dalam usulan *piloting* tersebut, i. *initial assessment*, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) dan Dinas Sosial (Dinsos) melakukan *initial assessment* terkait kelompok potensial yang akan dilakukan *piloting* pengembangan kelompok subsisten. ii. *implementing partner*, Dinas Koperasi dan UMKM (Diskopukm), DPMG bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) *screening potential implementing partner* di Aceh (industri yang mampu menjadi *oftaker*) termasuk potensi pemanfaatan BUMG di gampong-gampong. iii. Pendampingan, BI, OJK, Kemenkeu dan OPD teknis melakukan pembinaan teknis pengembangan usaha kepada kelompok subsisten terpilih terkait dengan: Pemberdayaan ekonomi, perluasan akses, dan literasi keuangan, serta harmonisasi kebijakan. iv. pendampingan (lanjutan), fasilitasi promosi produk dari *implementing partner* daerah. v. *monev*, monitoring dan evaluasi pelaksanaan oleh seluruh pihak terkait. Terakhir, vi. replikasi, replikasi *success story* yang telah dilaksanakan secara *rapid* di berbagai kabupaten.
2. **Mendorong pengembangan dan implementasi *green economy* dalam pembangunan berkelanjutan di Aceh.** *Green Economy* adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan, atau juga dapat diartikan sebagai aktivitas perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi gas-gas rumah kaca terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Adapun pengembangan ekonomi berbasis komoditas hijau mencakup penerapan *Good Agricultural Practices*, sertifikasi komoditas pertanian, perkebunan, serta perikanan, pengembangan industri hilir dan usaha turunan, perbaikan rantai pasok dan rantai nilai, dukungan kemitraan dan pemodal, optimalisasi komoditas dengan Indikasi Geografis, serta mendorong intervensi yang bersifat spesifik terhadap komoditas unggulan di Aceh seperti kopi, kelapa sawit, nilam, pala, dan karet.
3. **Mengakselerasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah.** Sebagai daerah yang memiliki kekhususan menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek, termasuk ekonomi, potensi ekonomi dan keuangan syariah cukup besar. Namun, potensi yang besar tersebut belum teroptimalkan dengan baik. Diperlukan perhatian khusus serta kolaborasi antar pemangku kebijakan terutama dalam bidang keuangan syariah, industri halal, keuangan sosial syariah, dan ekonomi pesantren.
4. **Dualisme sertifikasi produk halal di Aceh.**

Berdasarkan Undang-Undang no 33 Tahun 2014 tentang produk Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bertugas untuk menerbitkan sertifikasi halal produk. Sementara Qanun Aceh no 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal Menyatakan sertifikasi produk halal di Aceh diterbitkan oleh LPPOM MPU Aceh. Hingga saat ini proses sertifikasi halal di Aceh masih melalui LPPOM MPU, namun masyarakat yang memerlukan sertifikasi halal nasional masih belum dapat memilikinya. Pemerintah pusat perlu memberikan perhatian terhadap tumpang tindih regulasi sertifikasi halal yang ada di Aceh. Sebab kedua dasar hukum yang digunakan merupakan peraturan yang sah.

5. **Percepatan realisasi belanja pemerintah terutama belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.** Belanja modal diperkirakan memiliki *multiplier effect* terhadap perekonomian sehingga percepatan realisasi belanja modal menjadi hal yang perlu diperhatikan dan tingkatan. Diperlukan langkah kebijakan yang ketat oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mempercepat pelaksanaan belanja di daerah, antara lain melalui: penerapan kebijakan pelaksanaan transfer ke daerah berdasarkan kinerja penyerapan anggaran dan output di daerah, melakukan monitoring posisi kas dan simpanan pemda di perbankan, dan memberlakukan sistem *reward/punishment*. *Reward* dilakukan melalui Dana Insentif Daerah yang diberikan ke daerah berprestasi berdasarkan kinerja keuangan termasuk total penyerapan belanja daerah. *Punishment* diberlakukan melalui kebijakan konversi Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum terhadap daerah dengan jumlah simpanan tidak wajar.
6. **Perlunya mendorong penyaluran KUR dan UMi yang ada di Aceh untuk meningkatkan pembiayaan Kredit Program.** Penyaluran dapat diprioritaskan sesuai dengan program pemerintah Aceh melalui peningkatan pembiayaan di sektor pertanian dan perikanan.

Hal tersebut dapat diwujudkan salah satunya melalui upaya mendorong perbankan untuk lebih memprioritaskan pemberdayaan UMKM yang terdampak COVID-19 dengan memperbesar porsi pembiayaan di tahun 2022.

7. **Mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui penguatan Lapangan Usaha (LU) industri pengolahan.** Potensi pada sektor hulu yang dimiliki Aceh bisa dioptimalkan untuk mendorong sektor industri pengolahan sebagai sektor yang aman untuk dibuka, memiliki daya ungkit, menyerap tenaga kerja serta memberikan *multiplier effect* yang besar. Pemetaan pohon industri dari masing-masing komoditas unggulan serta kajian teknis mengenai potensi dari tiap pohon industri mutlak dibutuhkan agar tidak terjadi *jumping* lapangan usaha dari LU pertanian, perikanan dan kehutanan ke LU perdagangan besar dan eceran, tanpa melalui penambahan nilai yang dapat diberikan oleh LU industri pengolahan. Hal ini penting agar provinsi Aceh tidak kehilangan nilai tambah yang seharusnya bisa diciptakan oleh industri pengolahan.
8. **Mendorong model bisnis *sharing factory* dalam rangka mendorong UMKM dan Industri.** Kawasan industri yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah seperti KIA Ladong berpotensi untuk diarahkan menjadi *sharing factory* yang mana bisa menjadi rumah produksi bersama bagi UMKM-UMKM di Aceh untuk menciptakan nilai tambah dan produk yang berdaya saing. *Sharing factory* berpotensi membantu para pelaku UMKM yang tidak memiliki modal kerja tinggi untuk mengembangkan usahanya karena semua fasilitas dasar akan disediakan oleh pengelola sentra industri. Model *sharing factory* juga sudah diterapkan di beberapa daerah dan mampu meningkatkan kualitas produk dan kapasitas UMKM.
9. **Memperkuat peran Tim Percepatan & Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di setiap daerah** untuk mendukung ekosistem keuangan

digital di Aceh. Di tengah pandemi COVID-19, transaksi non tunai/digital diharapkan dapat menjaga *demand* masyarakat, sehingga roda perekonomian dapat terus bergerak. Melalui transaksi non tunai/digital, diharapkan risiko penularan COVID-19 melalui uang kartal dapat dicegah. Ekosistem non tunai/digital di lingkungan Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan penerapannya melalui Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) dengan sinergi pemda, BI, perbankan, serta pihak terkait lainnya.

10. **Memperkuat peran Satgas percepatan investasi atau *Regional Investment Relations Unit (RIRU) Aceh***. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diperlukan keterlibatan investasi swasta dalam menggerakkan roda perekonomian. Dalam hal ini, peran Satgas percepatan investasi menjadi penting dan perlu ditingkatkan dalam mengidentifikasi proyek *clean and clear*, mengikuti *event* promosi investasi, memetakan calon investor potensial, serta memperkuat peran media dalam memperkenalkan proyek-proyek investasi kepada calon investor.

11. ***Debottlenecking* kendala atau hambatan investasi di Aceh**. Dalam forum *focus group discussion (FGD) Aceh Gayo Investment Dialog (AGASID) 2022*, diketahui beberapa kendala/hambatan investasi antara lain; Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di pihak Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun BUMD di Aceh dalam menyiapkan proposal proyek yang layak dan komprehensif dan juga materi promosi krusial lainnya. Sebagai solusi dari kendala ini, RIRU Provinsi Aceh menyelenggarakan kegiatan *Capacity Building* penyusunan proposal investasi yang didalam terdapat 7 aspek penting dalam penyusunan proposal investasi. Termasuk juga di dalamnya simulasi perhitungan kelayakan proyek investasi. Status *clean and clear* untuk beberapa proyek investasi di Aceh masih belum jelas, selain itu banyak proyek investasi masih

membutuhkan kelengkapan data untuk dapat dikatakan proyek investasi yang dapat memikat investor. Selanjutnya, terdapat kendala sewa lahan maksimal 5 (lima) tahun yang dikeluhkan oleh para investor, sehingga diperlukan percepatan perumusan dan pengesahan aturan perubahan untuk perpanjangan sewa lahan tersebut.

## Inflasi

Pada tahun 2022, tekanan inflasi diperkirakan akan mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya. Untuk itu, diperlukan lebih dari TPID Aceh untuk dapat mengantisipasi inflasi pada 2022. Pada awal 2022, TPID Provinsi Aceh dan 23 Kabupaten/Kota telah merumuskan peta jalan (*roadmap*) pengendalian inflasi untuk jangka waktu 2022-2024. Sebagai respon lanjutan terkait lonjakan inflasi, telah dilakukan kick-off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Provinsi Aceh pada 18 Agustus 2022 oleh Gubernur Aceh. Perlu komitmen dari seluruh pihak untuk dapat mengimplementasikan peta jalan dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) tersebut. Adapun program pengendalian inflasi Aceh masih mengacu pada *framework* 4K, antara lain:

1. **Keterjangkauan Harga melalui stabilisasi harga pangan strategis didukung oleh program-program**, pemantauan dan pencatatan harga bahan pangan pokok (sembako dan komoditas ikan), optimalisasi program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) untuk komoditas beras, pelaksanaan pasar murah (terutama menjelang HBKN), pelaksanaan sidak pasar, dan menetapkan harga eceran tertinggi (komoditas bahan pangan) melalui penyusunan Qanun (Perda).
2. **Ketersediaan Pasokan melalui dua program strategis yaitu peningkatan produksi pangan lokal dan importasi produk pangan**. Peningkatan produksi pangan lokal terutama produksi hortikultura penyumbang inflasi (bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit, produksi komoditas peternakan penyumbang

inflasi (daging sapi, daging ayam, dan telur ayam), Peningkatan produksi/tangkapan/budidaya komoditas perikanan penyumbang inflasi. Peningkatan produksi juga didukung oleh pembangunan dan optimalisasi sarana produksi dan infrastruktur pertanian; pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, dan kanal pengendalian banjir (Aceh Tamiang), korporatisasi klaster petani pangan, dan Pengaturan jadwal tanam komoditas pangan. Selanjutnya, diperlukan juga impor komoditas yang sulit diproduksi secara lokal seperti bawang putih dan gula pasir.

3. **Kelancaran Distribusi melalui dua program strategis yaitu, penguatan dan perluasan kerjasama antar daerah (KAD), serta meningkatkan infrastruktur perdagangan.** Program strategis pertama, dijabarkan menjadi inisiasi KAD di setiap kab/kota baik intra provinsi maupun antar provinsi, Peningkatan transaksi KAD, Fasilitasi Distribusi Pangan oleh Pasar Mitra Tani (PMT)/ Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dan Toko Mitra Tani (TMT)/Toko Tani Indonesia (TTI), pelaksanaan Pasar Lelang (Komoditas lokal dan Ekspor). Selanjutnya, program strategis kedua dijabarkan melalui, peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan yaitu melalui pemanfaatan tol laut, fasilitasi UMKM pangan binaan dengan *e-commerce*, dan optimalisasi pemanfaatan *Cold Storage* untuk komoditas perikanan.
4. **Komunikasi Efektif melalui tiga program strategi yaitu, memperbaiki kualitas data dan laporan, peningkatan kapasitas dan koordinasi Provinsi dan Kab/Kota, dan mengendalikan ekspektasi inflasi.** Perbaikan kualitas dan laporan dicapai melalui penyediaan sistem informasi panel harga dan monitoring stok pangan strategis yang terintegrasi di tingkat provinsi dan kab/kota, serta peningkatan kualitas dan kuantitas laporan TPID baik Provinsi dan Kab/Kota. Selanjutnya,

peningkatan kapasitas dan koordinasi dilakukan melalui penyusunan peta jalan pengendalian inflasi Kab/Kota, pelaksanaan *High Level Meeting* TPID, dan pelaksanaan *Capacity Building* TPID. Terakhir, pengendalian ekspektasi inflasi dilakukan melalui program rilis pers/media terkait perkembangan.

5. **Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Aceh** secara garis besar terdiri dari program jangka pendek (*quick wins*) dan program jangka panjang (*long term*). Program *quick wins* berupa kerjasama antar daerah (KAD) dan operasi pasar/pasar murah. Sementara itu, program *long-term* diarahkan untuk ketahanan pangan dalam bentuk pengembangan klaster pangan. Selain itu, terdapat program komunikasi dalam bentuk Iklan Layanan Masyarakat (ILM) bijak berkonsumsi dan himbuan penggunaan cabai kering.
6. **Mewujudkan ketahanan pangan di Aceh** untuk menjadikan Aceh sebagai daerah produsen pertanian yang menerapkan pertanian modern dan perekonomian sirkular. Secara garis besar, terdapat empat program utama dalam mewujudkan hal tersebut, kemandirian pupuk di tingkat petani, kemandirian bibit di tingkat produsen, informasi scheduling tanam, dan penyimpanan. i) Kemandirian Pupuk (Petani) dilakukan melalui pengembangan pupuk organik mandiri untuk pemenuhan kebutuhan sendiri (*self-sufficiency*) proses produksi perlu dilakukan. Dibutuhkan kapasitas, standarisasi dan legalitas yang cukup serta mumpuni untuk pengembangannya. Salah satu contohnya dengan pengembangan pupuk dengan dekomposer. ii) Kemandirian Bibit (Produsen bibit), bibit cabai merah keriting (CMK) yang dikenal dengan udeng atau odeng dan cabai merah varietas Bemeri adalah varietas cabai lokal unggul berasal dari Kab. Bener Meriah, Provinsi Aceh. Permasalahan yang muncul dalam proses pembibitan varietas lokal di atas adalah masih terbatasnya petani di Aceh yang

membudidayakan varietas tersebut. Selain itu, kualitas bibit yang dibuat masih kurang baik dari segi kualitasnya. Masih perlu dilakukan pemuliaan tanaman agar konsistensi bibit yang dihasilkan sesuai standar dan berkualitas. Kementerian Pertanian dapat membantu proses pengembangan, proses sertifikasi, dan proses perizinan dari pemuliaan bibit lokal. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pasokan bibit dari luar daerah. Begitu pun untuk program kemandirian pupuk. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pupuk NPK yang mana bahan dasar ureanya sangat bergantung dari impor.

iii) Informasi *scheduling* tanam, dilakukan melalui menghubungkan info antara pedagang besar yg mengendalikan pasar dan pedagang pengepul di daerah pertanian yg menjadi pemasok komoditas tersebut. Selanjutnya, pedagang pengepul meneruskan info tersebut ke para petani untuk dilakukan menyesuaikan pola tanam sesuai dengan kebutuhan pasar. Terakhir, iv) penyimpanan, khususnya untuk komoditas pangan dipandang perlu adanya *cold supply chain*, yang suatu wadah untuk mempertahankan hasil panen dari komoditas pertanian. *Buffer stock* yang ada saat ini dapat digunakan untuk memertahankan dan menyeimbangkan jumlah pasokan dan kebutuhan di pasar. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk menghitung jumlah pasokan yang dapat dijual ke luar daerah sebagai Kerja sama Antar Daerah (KAD).

7. **Menindaklanjuti arahan Gubernur Aceh pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi pada 18 Agustus 2022** yang antara lain mencakup usulan, Pembentukan satu data terpadu, Pemetaan pelaku pasar dan sentra produksi di Aceh, *Timing* panen dan sistem *stock* serta koordinasi dengan bulog untuk *cold supply chain*, Anggaran tanggap darurat dapat dimanfaatkan untuk ongkos logistik bahan pangan. Dana gampong bersama-sama membangun pabrik beras premium.

Kemudian akan disusun Pergub untuk ASN wajib membeli beras premium produksi Bulog Aceh/Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Anggaran / APBA pada tahun depan diarahkan untuk mendorong pengendalian inflasi.

8. **Penanganan Inflasi Komoditas Beras.** Pasokan beras kerap kali didatangkan dari luar Aceh pada periode-periode tertentu, padahal jika dihitung secara tahunan, produksi beras Aceh mengalami surplus. Gabah dari Aceh dijual ke Sumatera Utara, kemudian beras dijual kembali ke Aceh. Harga beras dapat meningkat/ lebih tinggi daripada harga lokal. Beras lokal berpotensi untuk kalah saing dengan beras luar dan berdampak pada pendapatan. Hal yang dapat dilakukan antara lain: Menginisiasi optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG) yang dikelola oleh profesional terutama untuk komoditas beras dan Meningkatkan kualitas pengolahan/penggilingan padi di Aceh untuk menjadi beras kualitas super.
9. **Mempercepat implementasi 7 (tujuh) upaya konkrit penanganan inflasi Kabupaten/Kota se-Aceh sesuai arahan Kemendagri.** Program-program tersebut antara lain; Operasi Pasar Murah, Sidak Pasar, Kerjasama Antar Daerah (KAD), Gerakan Menanam, Realisasi Bantuan Tidak Terduga (BTT), Dukungan Transportasi APBD/A, serta Rapat Koordinasi. Sampai dengan Minggu ke-2 November, masih terdapat 6 (enam) kabupaten/kota yang belum melaksanakan/melaporkan program tersebut ke Kemendagri.

## Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Aceh Melalui Pembangunan Berkelanjutan & Berwawasan Lingkungan Bank Indonesia Aceh Menyelenggarakan Aceh Gayo Investment Dialogue (AGASID)

AGASID merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, bekerjasama dengan Regional Investor Relations Unit (RIRU) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dan Jaringan Pengusaha Nasional (JAPNAS) Aceh yang dilaksanakan pada tanggal 30 – 31 Oktober 2022 di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini juga dihadiri oleh Deputi Bidang Perencanaan BKPM Dr. Indra Darmawan, Unsur Pimpinan Daerah Aceh, perwakilan Bappenas, Pj. Walikota Langsa, Pj. Walikota Lhokseumawe, Wakil Bupati Pidie Jaya, Sekda Aceh Barat Daya, para Kepala DPMPTSP Kabupaten/ Kota Se-Aceh, para Kepala Bappeda Kabupaten/kota Se-Aceh, para pimpinan perbankan di Aceh, Asosiasi Pengusaha di Aceh, Jaringan Pengusaha Nasional (JAPNAS), para pelaku usaha, dan tamu undangan lainnya. AGASID 2022 diawali dengan kegiatan *business matching* dan *project presentation* dari berbagai sektor; agroindustri, energi dan mineral, kawasan ekonomi, dan sektor pariwisata dan Kesehatan.

Dalam kegiatan tersebut dihasilkan kesepakatan (MoU) senilai Rp168,6 Miliar yang terdiri dari beberapa proyek investasi yakni pembangunan pabrik minyak goreng di Nagan Raya, pembangunan pabrik gula pasir, proyek pemrosesan *Palm Kernel Charcoal*, proyek investasi pada sektor *waste treatment facility*, dan proyek *joint production palm kernel charcoal*. Kegiatan dilanjutkan secara *parallel* dengan *Industrial Zones Field Trip* ke beberapa proyek investasi di Banda Aceh dan sekitarnya yang dihadiri oleh potential investor, beriringan dengan kegiatan *Field Trip* juga dilaksanakan Grand Final Aceh Plant Design Competition (APDC) 2022 yakni perlombaan desain rancang pabrik yang implementatif di Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun.

Pemenang pada kategori KIA Ladong adalah Applause Team dari Universitas Syiah Kuala yang mengangkat ide Proyek Investasi Byediabet Di Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya untuk kategori KEK Arun Lhokseumawe, dimenangkan oleh Tim Delta dari Universitas Sebelas Maret yang mengangkat ide Perancangan Pabrik Dimetil Eter Berbasis Gasifikasi Cangkang Sawit dan Proses Sintesa Dua Tahap Kapasitas 40.000 ton/tahun. Pada hari kedua pelaksanaan (31 Oktober 2022), kegiatan AGASID dibuka dengan *Opening Ceremony* yang dalam rangkaian kegiatan ini DPMPTSP Aceh juga meluncurkan *Blueprint* Renstra Investasi Aceh. Dokumen Renstra Investasi 2023 - 2026 ini menggambarkan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis penanaman modal Aceh serta arah kebijakan yang diharapkan dapat teratasi dalam 4 tahun mendatang, dimulai sejak tahun 2023-2026 mengusung tema *Green Investment* atau 'konsep investasi hijau melalui prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

DPMPTSP Aceh juga turut *me-launching* website *investaceh.id* yang berisikan informasi *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) serta skema dan insentif investasi di Aceh. Pada rangkaian kegiatan ini, juga dimeriahkan dengan *award giving ceremony* yang terdiri dari beberapa kategori yaitu Penyusunan Proposal Investasi Aceh 2022, APDC 2022 Kategori KIA Ladong dan KEK Arun, dan Anugerah Indeks Daya Saing Daerah. Untuk penghargaan penyusunan Proposal Investasi, diberikan kepada peserta Capacity Building Percepatan Investasi Aceh (CAPABLE) 2022 yang diikuti oleh perwakilan dari DPMPTSP dan Bappeda Aceh dan 23 kabupaten/kota, serta pemilik proyek investasi

lainnya (BUMD dan stakeholders, lainnya) di Aceh. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari pelatihan Business Model Canvas (BMC) yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Kegiatan tersebut menghasilkan 24 proposal investasi yang kemudian dikurasi dan menjadi 10 proposal terbaik dan kemudian akan dilakukan pendampingan intensif oleh Bank Indonesia supaya menghasilkan *Investment Project Ready to Offer* (IPRO). 10 proposal tersebut adalah Hotel Bintang 4 Di Kawasan RTH (Kab. Aceh Selatan), Pengelolaan Limbah B3 Medis Aceh (PT PEMA Kabupaten Aceh Besar), Pembangunan *Rice Milling Unit* (Kabupaten Aceh Jaya), Peternakan Sapi Ketapang (Kabupaten Aceh Tengah) Rumah Sakit Pariwisata (Kota Sabang), Hotel Bintang 5 Pulau Banyak (Kabupaten Aceh Singkil) Resort Gapang (Kota Sabang) Industri pengawetan/Pengolahan Ikan (Kabupaten Aceh Barat), Pengembangan Komoditi Nilam (Kab. Gayo Lues) dan Pengolahan Sampah Terpadu RDF (Kota Langsa).

Selain itu, pemberian penghargaan juga diberikan kepada Kabupaten/Kota yang Berprestasi di Bidang Investasi yakni untuk kategori Indeks Daya Saing Investasi Daerah (IDSI) juara pertama diraih Banda Aceh, peringkat kedua ditempati Aceh Besar dan ketiga ditempati Aceh Utara. Selanjutnya kegiatan diisi dengan diskusi panel yang menghadirkan Setyo Bidiantoro (Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas), Dr. Indra Darmawan (Deputi Perencanaan, BKPM), dan Ir. Brahmantio Isdijoso, M.S. (Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur). Kegiatan diskusi panel ini mengusung *tema Green investment: a vision for sustainable future of Aceh*. Menjadi penutup AGASID 2022 forum *debottlenecking* yang mengusung konsep *focus group discussion*, para peserta dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pengusung kebijakan dan kelompok pelaku usaha. yang menjadi wadah bagi pelaku usaha dan pemerintah untuk menyelesaikan dan menjawab problematika yang terjadi dalam menjalankan usaha serta menetapkan regulasi atas ekosistem investasi di Aceh. Kegiatan ini menghasilkan output berupa rancangan rekomendasi kebijakan, yang terdiri dari: (i) Sinkronisasi kebijakan daerah terkait dengan pelayanan investasi serta regulasi yang berubah-ubah. (ii) Peninjauan kembali regulasi yang sudah ada khususnya terkait insentif daerah agar lebih kompetitif dibanding daerah lain. (iii) Pendirian Mall Pelayanan Publik agar mempermudah dalam hal mengurus serta memperoleh informasi mengenai produk hukum terkait investasi (berupa insentif, perizinan, DLL). (iv) Memperbanyak event tahunan yang mengundang investor dari dalam maupun luar negeri sebagai sarana promosi investasi di Provinsi Aceh. (v) Mendorong bank sistemik yang eksisting di Aceh untuk melengkapi layanan perbankan agar memenuhi kebutuhan pelaku usaha. (vi) Peningkatan kualitas tenaga kerja lokal melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi.



--000--



# DAFTAR ISTILAH

<b>Administered prices</b>	Salah satu disgregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.
<b>Andil inflasi</b>	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
<b>APBA</b>	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
<b>Bobot inflasi</b>	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
<b>Dana Perimbangan</b>	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
<b>Faktor Fundamental</b>	Faktor fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi permintaan-penawaran atau <i>output gap</i> , eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat
<b>Faktor Non Fundamental</b>	Faktor non fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan ( <i>volatile foods</i> ), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah ( <i>administered price</i> )
<b>Indeks Ekspektasi Konsumen</b>	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1–100.
<b>Indeks Harga Konsumen (IHK)</b>	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.
<b>Indeks Kondisi Ekonomi</b>	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1–100.
<b>Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)</b>	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1–100.
<b>Investasi</b>	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.
<b>Inflasi inti</b>	Inflasi inti adalah inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental

<b>Liaison</b>	Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan
<b>Migas</b>	Minyak dan gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas.
<b>Mtm</b>	<i>Month to month</i> . Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.
<b>Omzet</b>	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.
<b>PDRB</b>	Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
<b>Perceived risk</b>	Persepsi risiko yang dimiliki oleh investor terhadap kondisi perekonomian sebuah negara
<b>Qtq</b>	<i>Quarter to quarter</i> . Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
<b>Sektor ekonomi dominan</b>	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.
<b>Volatile food</b>	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.
<b>Yoy</b>	<i>Year on year</i> . Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

## TIM PENYUSUN

### PENANGGUNG JAWAB

**Achris Sarwani**

### KOORDINATOR PENYUSUN

**Yon Widiyono**

### TIM PENULIS

**Muhammad Irfan Octama**

**Garry Rahmadhian Sutiasa**

**Fery Febriansyah**

**Raksaka Ardy Damara**

**Fina Ananda**

**Lintang D. Ratri**

**M. Fikrisani**

## KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI ACEH

JL. Cut Mutia No.15, Banda Aceh

Telp. (0651) 32320 ext. 8205 | Fax. (0651) 34116

*Softcopy* dapat diunduh pada tautan:

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/aceh/Default.aspx>